



BUPATI TEGAL  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL  
NOMOR 29 TAHUN 2015

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 21 TAHUN 2014  
TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN TEGAL TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang: a. bahwa berkenaan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan Asumsi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 285 Ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka Peraturan Bupati Tegal Nomor 21 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014, perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 21 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
16. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 27);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tegal Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 27);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tegal 2014–2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014 Nomor 5);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014 Nomor 12);
26. Peraturan Bupati Tegal Nomor 21 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014 Nomor 20);
27. Peraturan Bupati Tegal Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014 Nomor 45).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 21 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2015.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 21 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014 Nomor 20), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 ditambahkan 1 (satu) Ayat baru, yakni Ayat (2) sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 4**

- (1) Sistematika RKPD Tahun Tegal 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri :

**BAB I : PENDAHULUAN**

**BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2014 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH.**

**BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2016.**

**BAB IV : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016**

**BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2016**

**BAB VI : PENUTUP**

- (2) Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tegal Tahun 2015 disusun dengan Sistematika sebagai berikut :

**BAB I : PENDAHULUAN**

**BAB II : EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2015 KABUPATEN TEGAL SAMPAI DENGAN TRIWULAN KESATU**

**BAB III : RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DALAM PERUBAHAN RKPD TAHUN 2015 KABUPATEN TEGAL**

**BAB IV : PENUTUP**

2. Ketentuan Pasal 5 dirubah, sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

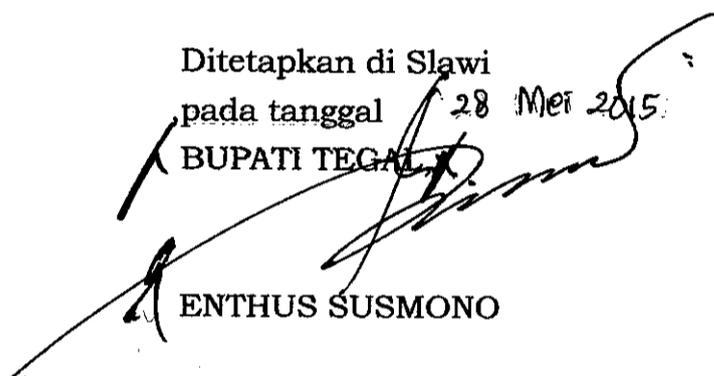
- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 berikut lampirannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
- (2) Isi beserta uraian Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tegal Tahun 2015 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

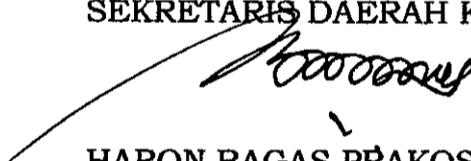
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi  
pada tanggal 28 Mei 2015  
BUPATI TEGAL

  
ENTHUIS SUSMONO

Diundangkan di Slawi  
pada tanggal 28 Mei 2015  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

  
HARON BAGAS PRAKOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2015 NOMOR 29

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TEGAL

NOMOR:

TENTANG

PENGESAHAN RANCANGAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( RENJA SKPD) DAERAH KABUPATEN  
TEGAL TAHUN 2016

RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA -SKPD)

1. DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA.

2. dst

## DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	I -
	1.1 Latar Belakang	I -
	1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I -
	1.3 Hubungan Antar Dokumen	I -
	1.4 Sistematika Dokumen RKPD	I -
	1.5 Maksud dan Tujuan	I -
BAB II	EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	II -
	2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah	II -
	2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD	II
	2.3 Permasalahan Pembangunan dan Isu Strategis 2015	II -
BAB III	PERUBAHAN RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN	III -
	3.1 Perubahan Arah Kebijakan Perekonomian Daerah	III -
	3.2 Perubahan Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III -
BAB IV	PENUTUP	IV - 1

### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan. Penyusunan RKPD mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional, dalam rangka mensinergikan, mensinkronkan dan mengintegrasikan program pembangunan nasional dengan pembangunan di daerah.

Dalam sistem perencanaan pembangunan nasional maka perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan, yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan dengan prinsip transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan. Lebih lanjut perencanaan pembangunan daerah harus mampu mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah yang dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah dan sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Dalam perumusan perencanaan pembangunan daerah maka dokumen RKPD berperan sangat strategis bagi Pemerintah Kabupaten Tegal. Dokumen ini merupakan penjabaran rencana strategis ke dalam rencana operasional. RKPD harus dapat menjamin konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 264 ayat (5) disebutkan bahwa RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Selanjutnya sesuai Permendagri 54 tahun 2010 pada pasal 285 disebutkan RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan, seperti :

- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
- b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
- c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan.

Perubahan RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan

pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 265 ayat (3) disebutkan bahwa RKPD menjadi pedoman Kepala Daerah dalam menyusun KUA serta PPAS. Dengan demikian dokumen perencanaan tahunan ini harus dapat mengarahkan proses penyusunan Rencana Kerja (RENJA) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD). RKPD menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS), RAPBD dan APBD.

RKPD menjadi instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah dan instrumen untuk mengukur capaian target kinerja program pembangunan jangka menengah, target standar pelayanan minimal dan kinerja pelayanan SKPD. Dengan demikian dokumen ini juga dapat menjadi acuan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), dan menyediakan informasi bagi pemenuhan Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD).

Berdasarkan uraian di atas dan dalam kerangka melaksanakan mandatory peraturan perundangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Tegal menyusun dokumen Perubahan RKPD ini sebagai pedoman penyempurnaan pelaksanaan pembangunan tahun 2015.

## **1.2 Dasar Hukum Penyusunan**

Adapun landasan hukum dalam penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Tegal Tahun 2015 ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950, Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5272);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 ;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 13);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 1).
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 5);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014 Nomor 12).

### **1.3 Hubungan Antar Dokumen**

Memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan APBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara dan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan APBD, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 265 ayat (3) yang menyebutkan bahwa RKPD menjadi pedoman Kepala Daerah dalam menyusun KUA serta PPAS maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, perubahan RKPD Tahun 2015 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun 2015 untuk menyusun Perubahan (APBD-P) Tahun 2015.

### **1.4 Sistematika Dokumen RKPD**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Hubungan Antar Dokumen
- 1.4. Sistematika Dokumen RKPD
- 1.5. Maksud dan Tujuan

#### **BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN**

- 2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah
- 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD
- 2.3 Permasalahan Pembangunan

#### **BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH**

- 3.1. Perubahan Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
- 3.2. Perubahan Arah Kebijakan Keuangan Daerah

#### **BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH**

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan
- 4.2 Prioritas Pembangunan

#### **BAB V PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH**

#### **BAB VI PENUTUP**

### **1.5 Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Perubahan RKPD tahun 2015 adalah untuk mewujudkan konsistensi dan sinergitas antara proses perencanaan dan proses

penganggaran pembangunan daerah dan juga konsistensi dalam pelaksanaan dan pengawasannya, serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan RKPD tahun 2015 adalah untuk :

1. menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Tahun 2015 yang akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan KUPA serta PPAS-P antara DPRD dengan Bupati yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD- P) Tahun 2015;
2. menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
3. memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
4. mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;

**BAB II**

**EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN  
KINERJA PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN**

**2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah**

**2.1.1. Aspek Geografis**

**a. Luas dan Batas Wilayah**

Kabupaten Tegal merupakan salah satu kabupaten di wilayah administratif Provinsi Jawa Tengah dengan ibukota kabupaten berada di kota Slawi, yang terletak di pesisir Utara bagian Barat dan sebagian wilayahnya berbatasan dengan Laut Jawa atau dikenal dengan pantai Utara (Pantura). Kecamatan-kecamatan yang wilayahnya berbatasan langsung dengan Laut Jawa adalah Kecamatan Suradadi, Kramat dan Warureja. Kabupaten Tegal secara administratif terdiri dari 18 kecamatan yang terdiri dari 281 desa dan 6 kelurahan. Pembagian kecamatan di Kabupaten Tegal dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut :

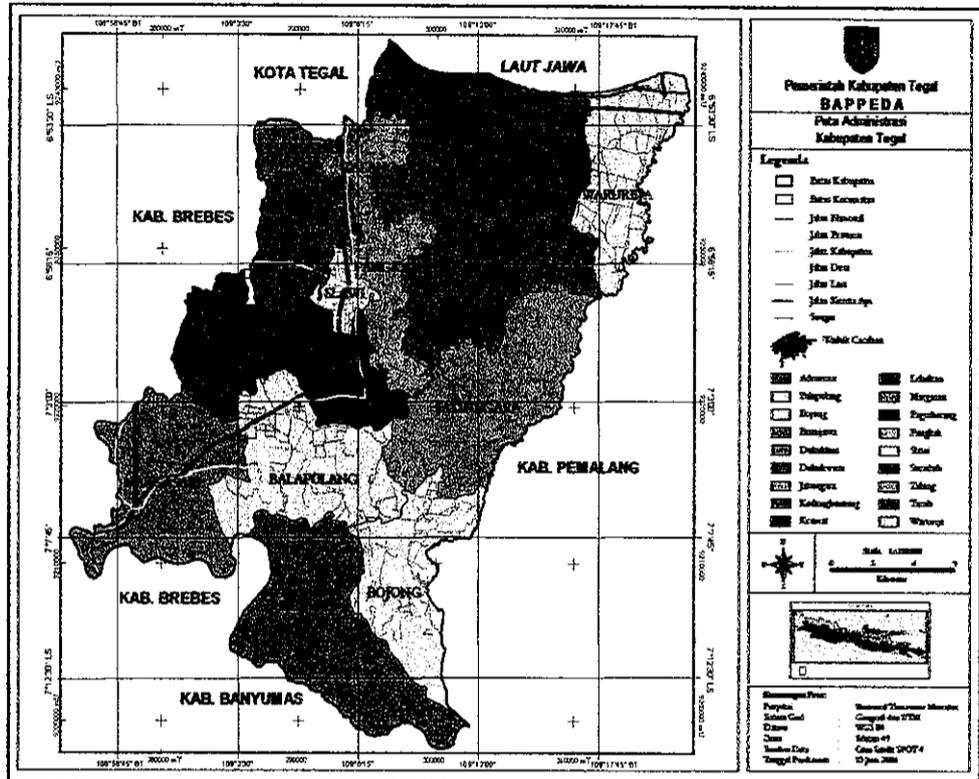
**Tabel 2.1.**  
**Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan di Kabupaten Tegal  
Tahun 2014**

<b>Kecamatan</b>	<b>Luas (ha)</b>	<b>Jumlah Desa/Kelurahan</b>
01. Margasari	8.683	13
02. Bumijawa	8.855	18
03. Bojong	5.852	17
04. Balapulang	7.491	20
05. Pagerbarang	4.300	13
06. Lebaksiu	4.095	15
07. Jatinegara	7.962	17
08. Kedungbanteng	8.762	10
09. Pangkah	3.551	23
10. Slawi	1.363	10 (5 desa, 5 kelurahan)
11. Dukuhwaru	2.658	10
12. Adiwerna	2.386	21
13. Dukuhturi	1.748	18
14. Talang	1.839	19
15. Tarub	2.682	20
16. Kramat	3.849	20 (19 desa, 1 kelurahan)
17. Suradadi	5.573	11
18. Warureja	6.231	12
<b>Jumlah</b>	<b>87.879</b>	<b>281 desa / 6 kelurahan</b>

Sumber: Kabupaten Tegal dalam Angka, 2013

Secara geografis Kabupaten Tegal terletak pada posisi antara 108°57'06" BT - 109°21'30" BT dan 6°50'41" LS - 7°15'03" LS, dengan luas wilayah 87.879 ha atau 878,79 km<sup>2</sup>. Adapun batas wilayah Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Laut Jawa dan Kota Tegal
- b. Sebelah Selatan : Kabupaten Brebes dan Kabupaten Banyumas
- c. Sebelah Barat : Kabupaten Brebes dan Kota Tegal
- d. Sebelah Timur : Kabupaten Pemalang



**Gambar 2.1 Peta Wilayah Kabupaten Tegal**  
 Sumber: RTRW Kabupaten Tegal 2012-2032

Secara geografis wilayah Kabupaten Tegal terdiri dari 3 katagori daerah, yaitu (1) daerah pantai meliputi Kecamatan Kramat, Suradadi dan Warureja; (2) daerah dataran rendah meliputi Kecamatan Adiwerna, Dukuhturi, Talang, Tarub, Pagerbarang, Dukuwaru, Slawi, Lebaksiu sebagian wilayah Suradadi, Warureja, Kedungbanteng dan Pangkah; dan (3) daerah dataran tinggi/pegunungan meliputi Kecamatan Jatinegara, Margasari, Balapulung, Bumijawa, Bojong, sebagian Pangkah dan Kedungbanteng.

**b. Topografi**

Dari segi topografi, wilayah Kabupaten Tegal mempunyai kemiringan tanah yang bervariasi antara 0% hingga lebih dari 40%. Bila ditinjau ketinggiannya terhadap permukaan laut, secara garis besar wilayah Kabupaten Tegal terbagi menjadi 4 (empat) bagian, yaitu dataran rendah, kawasan dengan ketinggian 250-500 m dpl, kawasan dengan

ketinggian 500-750 m dpl, dan kawasan dengan ketinggian di atas 750 m dpl.

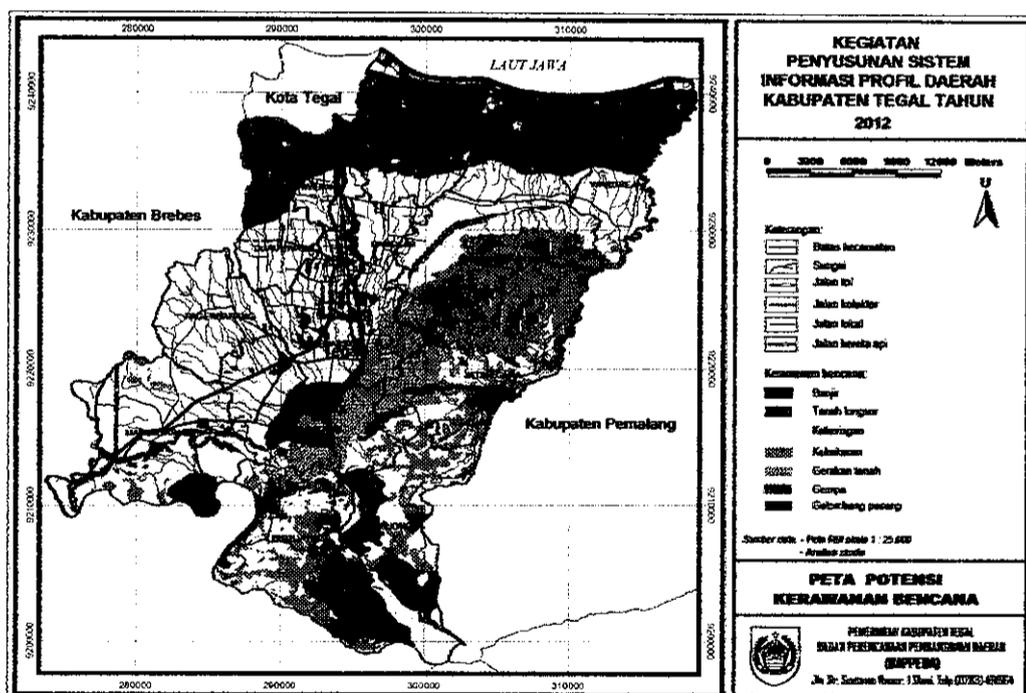
### c. Morfologi dan Geologi

Ditinjau dari aspek morfologi, wilayah Kabupaten Tegal terbagi atas daerah dataran rendah, daerah perbukitan landai, daerah perbukitan bergelombang, dan daerah perbukitan terjal.

Berdasarkan jenis tanahnya, wilayah Kabupaten Tegal terdiri atas tanah aluvial, litosol, regosol, dan grumosol. Sedangkan berdasarkan iklim, Kabupaten Tegal beriklim tropis dengan dua musim bergantian sepanjang tahun, yaitu musim penghujan dan kemarau. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember dan terendah pada bulan September. Kelembaban udara rata-rata berkisar 78 persen; tertinggi pada bulan Februari dan terendah pada bulan September.

### d. Daerah Rawan Bencana

Morfologi wilayah Kabupaten Tegal terdiri atas: wilayah datar/landai, perbukitan dan pegunungan dengan kemiringan bervariasi antara tipe datar 0-2<sup>0</sup> tipe bergelombang 2 -15<sup>0</sup>, tipe curam/berbukit 15 - 40<sup>0</sup> dan tipe sangat curam >40<sup>0</sup> Kondisi alam tersebut, membuat Kabupaten Tegal rentan dengan bencana alam, baik itu bencana banjir, bencana longsor, bencana erosi dan lain sebagainya, yang bisa dilihat dari Gambar 2.4 di bawah ini.



**Gambar 2.4 Peta Potensi Kerawanan Bencana Kabupaten Tegal**

Sumber: SIPD Kabupaten Tegal, 2014

Jenis tanah dengan karakteristik dan sifat dengan angka pelapukan batuan yang sangat tinggi dengan komposisi tanah didominasi material lepas dan berlapis, maka tanah mudah longsor. Kerawanan bencana alam tanah longsor dengan tingkat kerawanan tinggi di Kabupaten Tegal seluas 15.011, 29 ha (15,30%) terinci atas Kecamatan Balapulang (3.601,34 ha), Bojong (1.864, 83 ha), Bumijawa (3.841, 03 ha), Jatinegara (2.258, 77 ha), Kedungbanteng Desa Penujah (393,73 ha), Lebaksiu (1.192,78 ha), Margasari (726, 68 ha) dan Pangkah (1.132, 13 ha).

Faktor-faktor yang mempengaruhi bencana banjir adalah kondisi bentuk lahan fisiografis, topografi, curah hujan, bentuk morfometri DAS dan kondisi drainase kawasan Kerawanan Bencana Banjir di Kabupaten Tegal dengan tingkat kerawanan tinggi seluas 20.794, 86 ha (21, 19%) terinci atas Kecamatan Adiwerna (1.405, 93 ha), Balapulang (637, 80 ha), Bojong (625,22 ha), Bumijawa Desa Sokasari (5,13 ha), Dukuhturi (1.674, 93 ha), Dukuhwaru (370,53 ha), Jatinegara Desa Kedungwungu (92,94 ha), Kramat (4.015,17 ha), Lebaksiu (668, 88 ha), Margasari (1.069,89 ha), Pangkah (234,54 ha), Slawi (110,13 ha), Suradadi (3.326, 91 ha), Talang (1.589, 07 ha), Tarub (1.469, 16 ha) dan Warureja (3.498,65 ha).

Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap bencana gempa bumi adalah kekuatan gempa (*strength/energy*), jarak terhadap pusat gempa (*Distance to Epicenter*), kerapatan patahan/*sear* dan kondisi geologis wilayah. Tingkat bencana gempa bumi di Kabupaten Tegal paling tinggi pada tingkat kerawanan “sedang” yaitu seluas 15.204,43 ha (15,49%) terinci atas Kecamatan Adiwerna (2.184,01 ha), Balapulang (2.690,60 ha), Bojong (6.337, 94 ha), Bumijawa (9.364,63 ha), Dukuhturi (1.674,92 ha), Dukuhwaru (952,29 ha), Jatinegara (4.123,41 ha), Kedungbanteng (13.873, 93 ha), Margasari (425,35 ha), Pangkah (843,99 ha), Suradadi (5.388,83 ha), Talang (1.884,55 ha), Tarub (2.782,30 ha) dan Warureja (6.218,52 ha).

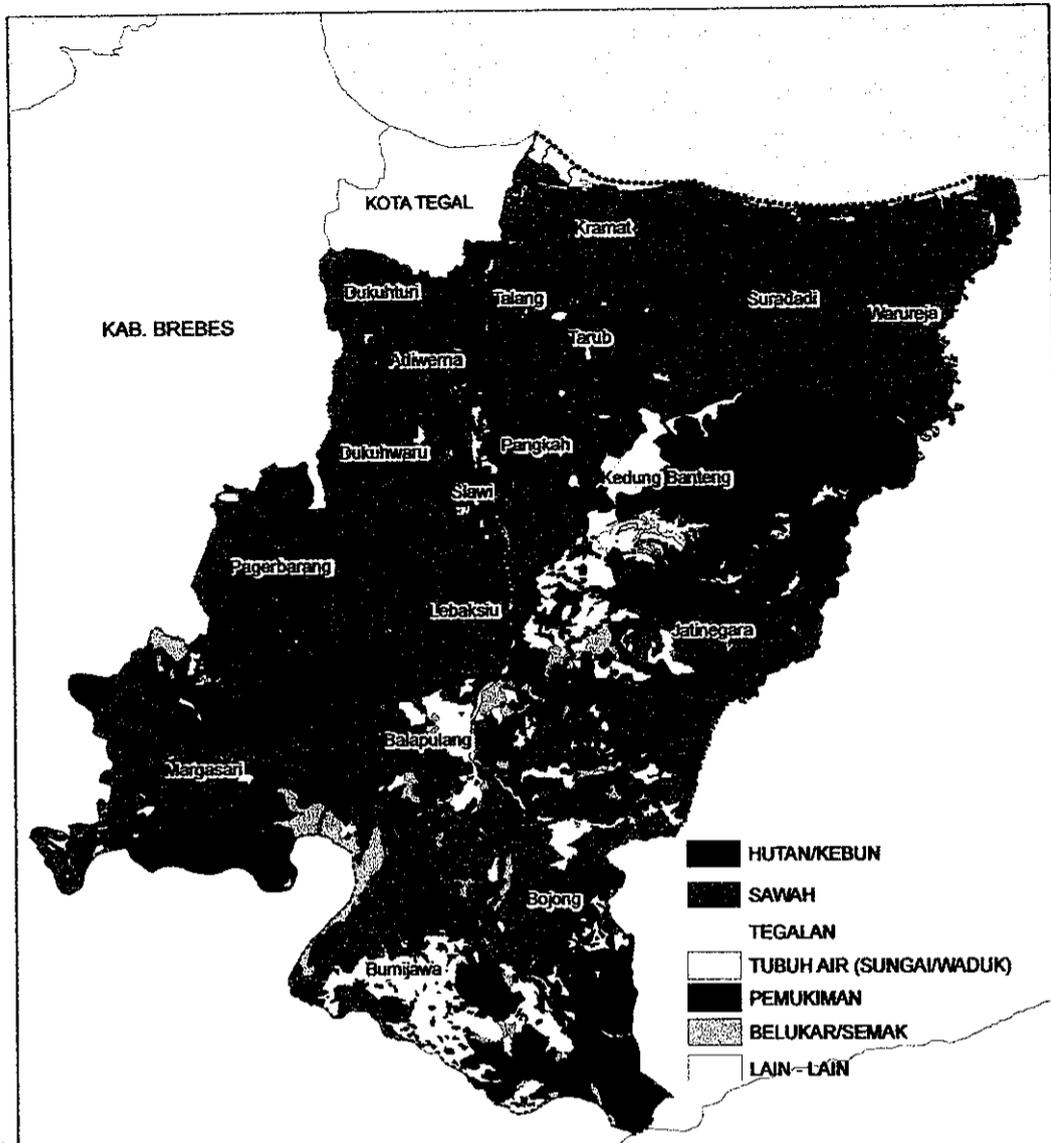
Gelombang pasang terjadi karena adanya angin kencang dan perubahan cuaca secara cepat. Hal ini memicu terjadinya arus laut yang kuat dan menghempaskan air ke pantai sehingga timbul gelombang pasang utamanya daerah morfologi datar. Kerawanan bencana gelombang pasang di Kabupaten Tegal dengan kerawanan bencana gelombang pasang “tingkat tinggi” seluas 130,87 ha (0,13%) utamanya pada 3 daerah di wilayah pantura yaitu Kecamatan Kramat (desa Kramat dan Maribaya) seluas 25,71 ha, Kecamatan Suradadi (desa Suradadi, Purwahamba dan Bojongsana) seluas 70,87 ha dan Kecamatan Warureja desa Demangharja seluas 34,29 ha.

Bencana kekeringan di wilayah Kabupaten Tegal dengan tingkat kerawanan tertinggi ada pada 10 kecamatan seluas 7.697,18 ha, terinci atas Kecamatan Balapulang 161,18 ha, Bojong 391,32 ha, Bumijawa desa guci 1.187,66 ha, Jatinegara 439,65 ha, Kedungbanteng 2.113,75 ha, Lebaksiu 95,52 ha, Margasari 2.611,58 ha, Pagerbarang 117,74 ha, Pangkah 435,40 ha dan Kecamatan Warureja desa Karangjati seluas 143,64 ha.

Terjadinya kebakaran lahan/hutan umumnya cenderung disebabkan oleh kesalahan manusia (*human errors*), seperti penebangan hutan secara liar, pembakaran semak belukar serta berbagai upaya hidup yang mengeksploitasi alam tanpa memperhatikan akibat yang ditimbulkannya. Tingkat kerawanan bencana alam kebakaran lahan di wilayah Kabupaten Tegal dalam kategori tinggi seluas 19.547,87 ha (19,92%) tersebar pada 9 kecamatan, yaitu Balapulang 1.486,65 ha, Bojong 2.815,64 ha, Bumijawa 4.059,98 ha, Jatinegara 5.285,94 ha, Kedungbanteng 3.687,66 ha, Lebaksiu 247,15 ha, Margasari 1.330,76 ha, Pangkah desa Dermasuci dan Dukuhjati Kidul 446,43 ha dan Kecamatan Warureja desa Kedungjati 187,67 ha.

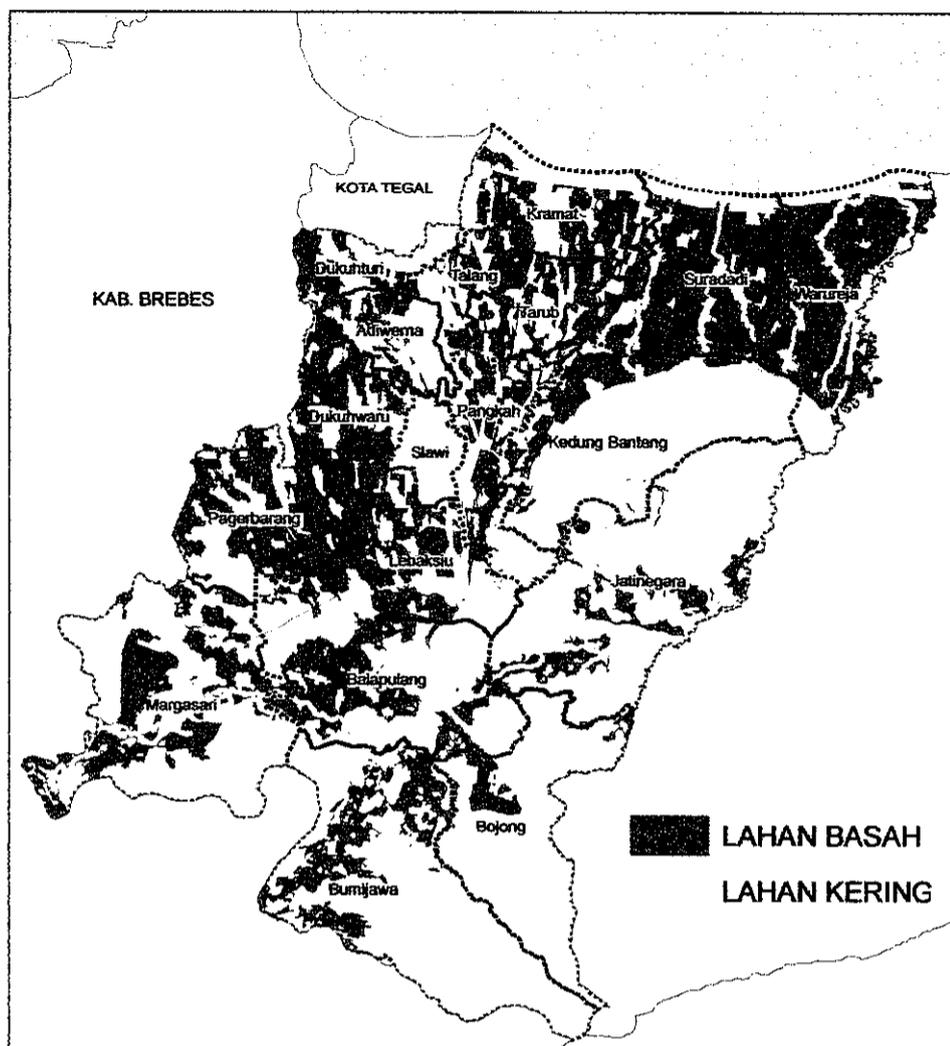
#### **e. Penggunaan Lahan**

Penggunaan lahan di Kabupaten Tegal didominasi oleh area non terbangun. Lahan sawah dapat ditemui di daerah Utara kabupaten yang relatif datar; sementara daerah Selatan yang relatif berbukit didominasi oleh hutan. Dua jalur regional utama (pantura pulau Jawa dan jalur Tegal-Purwokerto) menjadi generator utama pertumbuhan wilayah. Kawasan terbangun tumbuh seturut kedua jaringan jalan tersebut, sebagaimana Gambar 2.2 berikut ini.



**Gambar 2.2. Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Tegal**  
 Sumber: RTRW Kabupaten Tegal 2012-2032

Luasan lahan sawah terus mengalami penurunan, sedangkan luasan permukiman mengalami kenaikan. Hal ini perlu menjadi perhatian, mengingat kecenderungan yang terjadi adalah maraknya konversi dari lahan pertanian subur beririgasi teknis menjadi lahan permukiman. Jika hal ini terjadi pada daerah hulu dan menutup saluran irigasi, maka sawah pada daerah hilir akan otomatis mati. Dengan adanya kebijakan lahan sawah berkelanjutan dan prioritas untuk menguatkan ketahanan pangan, isu konversi lahan ini sepatutnya menjadi hal yang diprioritaskan penanganannya. Sebagaimana Gambar 2.3 berikut ini.



**Gambar 2.3 Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan**  
 Sumber:RTRW Kabupaten Tegal

Luas Lahan Pertanian Yang ditetapkan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berdasarkan Perda No. 10 Tahun 2012 Tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tahun 2012–2032 yaitu :

- a. Kawasan Pertanian Lahan Basah : 35.946 Hektar
- b. Kawasan Pertanian Lahan Kering : 6.630 Hektar

Posisi Kabupaten Tegal pada RTRW Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai kawasan pendukung Kota Tegal, khususnya koridor Adiwerna-Slawi yang ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal. Kawasan pada jalur Tegal-Slawi merupakan kawasan ekonomi yang tidak dapat dipisahkan entitasnya, dan bersama dengan Brebes membentuk kawasan strategis perbatasan Bregas. Sebagai satu koridor ekonomi, titik jual produk yang utama berada di Kota Tegal, sedangkan Kabupaten Tegal dan Brebes menjadi pendukungnya.

#### **f. Potensi Keunggulan Wilayah**

Kabupaten Tegal terletak pada sabuk pembangunan Jawa Tengah, kawasan yang paling cepat perkembangannya dalam provinsi Jawa Tengah. Lokasinya dilewati oleh 2 jalur jalan utama yaitu jalur pantura

pulau Jawa dan jalur Tegal-Purwokerto. Perbedaan kondisi geografis wilayah mengakibatkan perbedaan sumber daya alam yang dimiliki, sehingga berdampak pada perbedaan komoditas unggulan yang diusahakan di setiap wilayah. Oleh karena itu Kabupaten Tegal memiliki banyak komoditas unggulan yang dihasilkan oleh masing-masing wilayah, baik dari sektor pertanian maupun dari sektor industri pengolahan yang memanfaatkan bahan baku hasil pertanian. Diantara komoditas-komoditas unggulan yang dimiliki masing-masing wilayah di Kabupaten Tegal, terdapat beberapa komoditas yang menjadi unggulan tidak hanya di tingkat kabupaten, tetapi sampai ke tingkat provinsi dan nasional. Komoditas-komoditas tersebut dapat dikategorikan sebagai komoditas khas Kabupaten Tegal. Khususnya komoditas unggulan tersebut dapat dilihat dari jenis komoditasnya yang hanya dihasilkan atau sebagian besar produksinya terpusat di Kabupaten Tegal, dan juga dapat dilihat dari citarasa yang dimiliki berbeda dengan komoditas yang sama yang dihasilkan daerah lain.

Komoditas-komoditas khas yang menjadi unggulan di Kabupaten Tegal diantaranya dari sektor pertanian yaitu padi, jagung, sayuran antara lain bawang merah, cabai, kentang dan kubis, dari sektor peternakan yaitu sapi perah, sapi potong, domba, ayam ras pedaging dan itik serta produk turunannya. Sementara dari sektor industri diantaranya kelompok industri kimia dan kertas, kelompok logam mesin dan elektronik, dan kelompok industri agro dan hasil hutan. Komoditas-komoditas tersebut menjadi unggulan baik untuk tingkat provinsi maupun tingkat nasional, bahkan beberapa komoditas telah dapat bersaing di pasar internasional.

### **1). Pertanian**

Pertanian telah mempengaruhi kehidupan masyarakat di wilayah ini, baik secara ekonomi maupun sosial budaya. Berdasarkan pada besarnya potensi yang dimiliki, Pemerintah Kabupaten Tegal telah menetapkan sektor pertanian sebagai salah satu core business dan leading sector disamping industri manufaktur dan pariwisata, serta merupakan andalan pada pembangunan bidang ekonomi. Kabupaten Tegal memiliki kondisi iklim, lahan dan sumberdaya hayati yang sangat mendukung pengembangan usaha aneka jenis komoditas pertanian, mulai dari tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan kehutanan. Kawasan ini juga telah memiliki akses pasar yang cukup baik ke Kota Tegal dan kabupaten/kota se-eks Karisidenan Pekalongan dengan penduduk berdaya beli cukup baik, sehingga sangat berpeluang untuk memposisikan diri sebagai pemasok utama produk agribisnis bagi masyarakat di wilayah tersebut. Secara umum, Kabupaten Tegal sampai saat ini masih merupakan daerah sentra produksi sayuran terbesar di

Jawa Tengah. Budidaya hortikultura Kabupaten Tegal dipusatkan pengembangannya di kawasan Bojong dan Bumijwa dengan komoditas unggulan kentang, kubis, tomat, wortel, bawang merah dan cabe merah. Kondisi budidaya hortikultura di kawasan Tegal bagian Selatan walaupun telah mempunyai tujuan pemasaran yang jelas, tetapi masih dirasakan belum optimal. Hal ini, dikarenakan penjualan komoditas hortikultura masih didominasi oleh produk segar, sedangkan produk olahan hortikultura belum banyak berkembang sehingga nilai tambah produk masih terbatas, produktivitas, kualitas dan diversifikasi produk belum optimal, sehingga kurang memiliki daya saing, sebagaimana dilihat dalam Tabel 2.2 di bawah ini.

**Tabel 2.2.**  
**Tingkat Produksi Pertanian di Kabupaten Tegal**

NO	KOMODITAS	PRODUKSI (ton)					
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	Padi	350.116	368.459	341.480	341.007	354.538	325.928
2	Jagung	173.306	165.649	230.178	117.538	114.344	100.731
3	Bawang Merah	21.384	20.045	21.266	16.683	24.084	28.478
4	Cabai	11.189	11.484	3.975	4.699	4.427	3.994
5	Kentang	24.571	28.950	50.280	57.910	42.560	4.723
6	Kubis	50.375	111.890	114.844	127.222	132.780	17.445
7	Melati	1.258	1.158	4.281	1.091	1.590	8.505
8	Cengkeh	128	118	265	200	206	122
	Tebu (Produksi Gula)	21.335	20.335	20.601	20.029	21.789	18.997

Sumber : Dinas Pertanian Perkebunan Kehutanan Kabupaten Tegal 2014

## 2). Perikanan

Pembangunan di sektor perikanan diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan dan taraf hidup nelayan dan memajukan kualitas kehidupan desa pantai melalui peningkatan dan diversifikasi produksi ikan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi serta meningkatkan nilai ekspor. Usaha perlindungan dan pengembangan perikanan rakyat dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan dan taraf hidup nelayan dan memajukan kehidupan masyarakat desa pantai. Produksi perikanan laut di Kabupaten Tegal pada tahun 2014 menurun mencapai 13,65% dari tahun sebelumnya. Produksi tersebut merupakan hasil dari TPI Larangan 811.538 kg dan dari TPI Suradadi 54.656 kg seperti terlihat dalam Tabel 2.3 di bawah ini.

**Tabel 2.3.**  
**Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Laut Pada Masing-masing TPI**  
**di Kabupaten Tegal Tahun 2010-2014**

Tahun	TPI Larangan		TPI Suradadi		Jumlah	
	Produksi ( Kg )	Nilai ( 000 Rp)	Produksi ( Kg )	Nilai ( 000 Rp)	Produksi ( Kg )	Nilai ( 000 Rp)
2 0 1 4	811.538	6.607.718	54.656	167.510	866.214	6.755.288
2 0 1 3	887.962	6.357.410	115.193	446.479	1.003.155	6.803.889
2 0 1 2	953.519	6.443.442	234.508	840.304	1.188.027	7.283.746
2 0 1 1	670.769	4.642.740	436.134	1.564.333	1.106.903	6.207.073
2 0 1 0	285.141	2.387.012	78.693	204.772	363.834	2.591.784

Sumber : Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tegal, 2014

Sedangkan produksi ikan di perairan umum di waduk Cacaban menurun 6,19% dan pada perairan sungai mengalami penurunan 10,73 %, dapat dilihat pada Tabel 2.4 di bawah ini.

**Tabel 2.4.**  
**Produksi dan Nilai Produksi Ikan Perairan Umum (Waduk dan Sungai)**  
**di Kabupaten Tegal Tahun 2010-2014**

Tahun	Waduk Cacaban		Sungai		Jumlah	
	Produksi ( Kg )	Nilai (000 Rp)	Produksi ( Kg )	Nilai (000 Rp)	Produksi ( Kg )	Nilai (000 Rp)
2 0 1 4	120.050	753.714,5	24.140	131.787,5	144.190	885.502
2 0 1 3	127.970	1.094.937	27.040	219.217	155.010	1.314.155
2 0 1 2	87.015	637.495	18.830	132.570	105.845	770.065
2 0 1 1	58.000	393.062,5	19.220	127.585	77.220	520.647,5
2 0 1 0	53.955	345.960	18.205	112.470	72.160	458.430

Sumber : Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tegal, 2014

### 3). Peternakan

Pembangunan di sektor peternakan diarahkan untuk meningkatkan pendapatan petani ternak, mendorong diversifikasi pangan, perbaikan mutu gizi masyarakat serta mengembangkan ekspor melalui usaha peningkatan diversifikasi, intensifikasi dan ekstensifikasi ternak.

### 4). Pariwisata

Dalam pengembangan sektor pariwisata, Kabupaten Tegal mempunyai cukup banyak potensi dan sebagian besar merupakan wisata alam dan agro. Rincian wisata dan lokasi adalah sebagai berikut:

- a). Kawasan Pariwisata Alam, meliputi: Obyek Wisata Pemandian Air Panas Guci (Kecamatan Bumijawa), Waduk Cacaban (Kecamatan Kedungbanteng), Pantai Purwahamba Indah (Kecamatan Suradadi);

- b). Kawasan Pariwisata Budaya, meliputi: Situs Semedo (Kecamatan Kedungbanteng), Sentra Seni Tari Endel (Kecamatan Lebaksiu), Sentra Seni Wayang (Kecamatan Talang).
- c). Kawasan Pariwisata Agro, meliputi:
- (1). Agrowisata Strawberi: Kecamatan Bojong ;
  - (2). Agrowisata Teh: Kecamatan Bojong, Kecamatan Bumijawa;
  - (3). Agrowisata Sayuran: Kecamatan Bojong, Kecamatan Bumijawa;
  - (4). Agrowisata Herbal: Kecamatan Balapulang, Kecamatan Bumijawa.
- d). Kawasan Pariwisata Terpadu dan Olahraga, yaitu Stadion Tri Sanja Slawi.

### 5). Industri

Kepercayaan diri sektor sub sektor industri besar/ sedang di Kabupaten Tegal mulai bangkit sejak 1999 setelah terjadinya krisis ekonomi pada pertengahan 1997. Dalam kurun waktu 15 tahun terakhir menunjukkan adanya kenaikan baik dari perusahaan maupun dari sisi penyerapan tenaga kerja. Hal ini ditunjang peningkatan upah minimum regional (UMR) yang semakin baik. Bersama-sama dengan sektor pertanian dan pariwisata, sektor industri diharapkan melaju pesat dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan alam sehingga tidak merusak ekosistem.

Industri besar tahun 2014 sebanyak 9 perusahaan dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 6.036 orang. Pada kelompok industri kecil menengah jumlah usaha relatif tetap, yaitu sebanyak 29.194 unit usaha dengan jumlah tenaga kerja 120.308 orang, sebagaimana Tabel 2.5 di bawah ini.

**Tabel 2.5.**  
**Potensi Perindustrian di Kabupaten Tegal Tahun 2009-2014**

Potensi Industri	Satuan	Tahun					
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
<b>a. Industri Kecil Menengah</b>							
1. Unit Usaha	Unit	28.996	29.133	29.161	29.159	29.237	29.194
2. Tenaga Kerja	Orang	122.948	129.948	115.425	121.520	120.351	120.308
3. Nilai Produksi	Juta (Rp)	586.661	585.661	781.348	796.975	798.675	797.875
<b>b. Industri Besar</b>							
1. Unit Usaha	Unit	6	9	9	9	9	8
2. Tenaga Kerja	Orang	6.176	6.176	5.680	5.680	6.036	6.036

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tegal, 2014

#### 2.1.2. Demografis

Jumlah penduduk di Kabupaten Tegal pada tahun 2014 diproyeksikan adalah 1.420.132. Luas wilayah Kabupaten Tegal adalah

87.879 ha, dan kepadatan penduduk Kabupaten Tegal tahun 2013 adalah  $\pm$  1.610 jiwa/km<sup>2</sup>. sebagaimana Tabel 2.5 berikut ini.

**Tabel 2.5.**  
**Jumlah dan Kepadatan Penduduk Per Kecamatan**  
**di Kabupaten Tegal Pada Tahun 2013**

Kecamatan	Luas Wilayah ( Km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk ( Jiwa )	Kepadatan Penduduk ( Jiwa/Km <sup>2</sup> )
010. Margasari	86,83	95.150	1.096
020. Bumijawa	88,56	83.943	948
030. Bojong	58,52	61.675	1.054
040. Balapulang	74,91	81.485	1.088
050. Pagerbarang	43,00	52.341	1.217
060. Lebaksiu	40,95	83.487	2.039
070. Jatinegara	79,62	53.833	676
080. Kedungbanteng	87,62	40.214	459
090. Pangkah	35,51	100.086	2.819
100. Slawi	13,89	70.574	5.081
110. Dukuhwaru	26,30	59.006	2.244
120. Adiwerna	23,86	119.083	4.991
130. Dukuhturi	17,48	88.530	5.065
140. Talang	18,39	99.490	5.410
150. Tarub	26,82	77.320	2.883
160. Kramat	38,49	107.666	2.797
170. Suradadi	55,73	81.169	1.456
180. Warureja	62,31	59.957	962
<b>2013</b>	878,79	1.415.009	1.610
<b>2012</b>	878,79	1.421.001	1.617
<b>2011</b>	878,79	1.400.256	1.593
<b>2010</b>	878,79	1.394.839	1.587
<b>2009</b>	878,79	1.420.760	1.617

Sumber : Kabupaten Tegal dalam Angka Tahun 2013

Secara umum, wilayah yang kepadatan penduduknya relatif lebih tinggi berada pada kawasan perkotaan, terutama kawasan yang mengikuti jalur regional, kawasan kota Slawi, dan kawasan perbatasan dengan Kota Tegal. Hal ini terjadi karena kawasan-kawasan tersebut merupakan pusat aktivitas ekonomi (yang otomatis juga memiliki kualitas layanan sarana dan prasarana yang relatif baik) sehingga menarik orang untuk datang dan tinggal. Jika dilihat dari komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur, maka jumlah penduduk kelompok umur produktif (15-64 tahun) mencapai 974.966 orang, jumlah

non produktif, yaitu penduduk kelompok umur muda (0-14 tahun) dan penduduk kelompok umur tua (65 tahun keatas) mencapai 440.043. Dari hal tersebut di atas, dapat diketahui angka beban ketergantungan (*dependencyratio*) mencapai 45,13 artinya dalam setiap 100 penduduk terdapat 45 penduduk tidak produktif, sebagaimana dalam Tabel 2.6 berikut ini.

**Tabel 2.6.**  
**Penduduk Berdasarkan Usia Tahun 2010-2014**

Usia	2010	2011	2012	2013	2014
0 - 4	107.334	130.171	131.422	124.326	131.184
5 - 9	137.941	134.987	129.357	121.823	130.506
10 - 14	159.048	144.044	140.840	120.519	129.575
15 - 19	116.781	120.389	126.507	116.217	128.175
20 - 24	100.316	101.694	105.095	94.062	113.861
25 - 29	101.162	118.577	111.576	125.951	103.983
30 - 34	103.952	114.949	116.328	126.979	109.998
35 - 39	112.733	105.825	107.048	117.498	106.628
40 - 44	94.025	95.426	95.390	109.572	93.223
45 - 49	89.252	82.874	86.599	98.700	87.375
50 - 54	84.317	72.591	77.174	90.017	80.301
55 - 59	61.423	55.478	61.682	61.715	66.021
60 - 64	51.031	41.172	45.883	38.257	48.733
65 +	75.524	82.079	86.100	73.775	90.569
<b>Jumlah</b>	<b>1.394.839</b>	<b>1.400.256</b>	<b>1.421.001</b>	<b>1.415.009</b>	<b>1.420.132</b>

Sumber : BPS Kabupaten Tegal, 2014

Total jumlah penduduk di Kabupaten Tegal pada tahun 2013 adalah 1.415.009 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 703.494 jiwa dan perempuan 711.515 jiwa sehingga sex ratio mencapai 98,87. Rincian jumlah penduduk Kabupaten Tegal berdasarkan jenis kelamin tahun 2009-2014 tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.7 di bawah ini :

**Tabel 2.7.**  
**Jumlah Penduduk Dirinci Menurut Jenis Kelamin dan Sex Ratio di Kabupaten Tegal Tahun 2009-2013**

Kecamatan	Penduduk		Jumlah	Sex Ratio
	Laki-laki	Perempuan		
1. Margasari	47.213	47.937	95.150	98,49
2. Bumijawa	41.904	42.039	83.943	99,68
3. Bojong	30.011	31.664	61.675	94,78
4. Balapulang	40.318	41.167	81.485	97,94
5. Pagerbarang	25.996	26.345	52.341	98,68
6. Lebaksiu	40.755	42.732	83.487	95,37
7. Jatinegara	26.652	27.181	53.833	98,05
8. Kedungbanteng	20.216	19.998	40.214	101,09
9. Pangkah	50.037	50.047	100.086	99,98
10. Slawi	34.555	36.019	70.574	95,94

Kecamatan	Penduduk		Jumlah	Sex Ratio
	Laki-laki	Perempuan		
11. Dukuwaru	29.049	29.957	59.006	96,97
12. Adiwerna	59.862	59.221	119.083	101,08
13. Dukuhturi	44.562	43.968	88.530	101,35
14. Talang	49.839	49.651	99.490	100,38
15. Tarub	38.825	38.495	77.320	100,86
16. Kramat	52.211	54.455	107.666	97,72
17. Suradadi	40.467	40.702	81.169	99,42
18. Warureja	30.020	29.937	59.957	100,28
2013	703.494	711.515	1.415.009	98,87
2012	706.171	714.830	1.421.001	98,87
2011	699.714	700.542	1.400.256	99,88
2010	694.695	700.144	1.394.839	99,22
2009	709.872	710.888	1.420.760	99,86

Sumber : Kabupaten Tegal Dalam Angka 2011,2012,2013

### **2.1.3 Aspek Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Tegal**

#### **2.1.3.1 Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi**

##### **a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

PDRB Kabupaten Tegal 2013 berdasarkan harga berlaku mencapai Rp 10,989 triliun dan PDRB berdasarkan harga konstan mencapai Rp 4,233 triliun. Struktur ekonomi Kabupaten Tegal didominasi oleh tiga sektor utama yaitu: sektor pertanian, sektor industri dan sektor perdagangan. Ketiga sektor tersebut merupakan sektor riil yang sangat mempengaruhi perekonomian Kabupaten Tegal, dan bisa dilihat pengaruhnya pada penggunaan lahan serta penduduk berdasar matapencaharian.

Berdasar PDRB ADHK Tahun 2013, sektor industri dan sektor perdagangan merupakan dua kontributor terbesar dalam perekonomian wilayah, sedangkan sektor pertanian memberikan kontribusi terbesar ketiga. Hal ini didukung oleh lokasi Kabupaten Tegal yang berada pada jalur regional pantura Pulau Jawa dan jalur Tegal-Purwokerto yang menjadikannya strategis untuk melakukan usaha di bidang perdagangan. Selain itu, sejarah panjang industri logam, makanan, dan konfeksi di Kabupaten Tegal menjadikan sektor industri pengolahan memiliki keunggulan komparatif dan berkembang dengan pesat. Di sisi lain, sektor pertanian juga memberikan kontribusi yang cukup signifikan, dimana banyak masyarakat Kabupaten Tegal yang bekerja pada sektor ini.

Secara umum, industri pengolahan merupakan kontributor yang signifikan karena selain sumbangsuhnya yang besar pada perekonomian Kabupaten Tegal, sifat industrinya adalah padat karya sehingga dapat

memberikan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. Selain itu, kontribusinya relatif stabil –hampir mencapai 30% dari total perekonomian wilayah— serta tren pertumbuhannya juga cenderung meningkat selama lima tahun terakhir. Sebagai sektor ekonomi yang memiliki potensi bagus serta *backward* dan *forward linkage* yang kuat, sudah seharusnya sektor industri pengolahan dijadikan prioritas pembangunan. Perkembangan yang terjadi pada sektor ini akan menarik sektor ekstraktif untuk maju dan mendorong sektor tersier untuk berkembang.

Sektor perdagangan juga mengalami tren yang menaik dari tahun ke tahun, serta kontribusinya juga mengalami peningkatan. Selain karena lokasi Kabupaten Tegal yang relatif baik, perkembangan sektor ini dipengaruhi beberapa faktor diantaranya limpahan pertumbuhan Kota Tegal, kondisi makro ekonomi Indonesia yang stabil, perkembangan kawasan perkotaan kecamatan, dan tumbuhnya sektor industri pengolahan. Pertumbuhan Kota Tegal yang sudah melampaui batas administrasinya menjadikan pertumbuhan meluber ke wilayah Kabupaten Tegal. Hal ini menjadikan kawasan perbatasan dengan Kota Tegal mendapatkan keuntungan dengan tumbuhnya sektor perdagangan dan jasa. Kondisi makro ekonomi Indonesia yang stabil juga mendorong lembaga keuangan untuk ekspansif dalam memberikan kredit investasi dan konsumsi; dimana kredit investasi sebagian besar dipergunakan untuk berusaha di sektor industri pengolahan serta perdagangan ataupun jasa, sedangkan kredit konsumsi secara otomatis akan digunakan untuk keperluan konsumtif yang akan mendorong perkembangan sektor perdagangan. Perkembangan kawasan perkotaan di kecamatan juga memiliki pengaruh yang signifikan; dimana perkembangan fisik dan ekonomi tidak lagi terpusat pada kawasan Slawi-Adiwerna, tetapi juga pada kawasan perkotaan kecamatan, yang berfungsi sebagai pusat pelayanan lokal untuk kawasan sekitarnya. Selain itu, pertumbuhan sektor industri pengolahan yang bagus akan secara langsung mendorong perkembangan sektor perdagangan. Setiap barang yang diproduksi pasti akan dijual, dan setiap penjualan akan meningkatkan pertumbuhan sektor perdagangan.

Sementara, kontribusi sektor pertanian juga relatif besar meskipun tidak terlalu signifikan. Meskipun demikian, sektor ini tetap harus menjadi perhatian karena merupakan sektor yang sangat strategis. Kondisi ketahanan pangan Kabupaten Tegal sangat bergantung pada performa sektor pertanian. Selain itu, jumlah masyarakat yang bekerja pada sektor ini sangat besar dan merupakan kontributor terbesar pada jenis pekerjaan yang ditekuni masyarakat Kabupaten Tegal.

Sayangnya, perkembangan sektor pertanian cenderung mengalami penurunan. Hal ini karena fokus usaha di sektor ini masih berkuat pada cara ekstraktif. Cara ini sangat bergantung pada kondisi alam, dimana ketika hasil yang didapat berkualitas bagus maka sektor pertanian akan tumbuh. Sebaliknya, jika hasil yang didapat berkualitas kurang baik, maka sektor pertanian akan cenderung turun. Di samping itu, luas lahan pertanian yang semakin berkurang (termasuk infrastruktur pendukungnya) juga ikut mendorong turunnya kontribusi sektor pertanian. Kedua hal tersebut menjadikan sektor pertanian hanya menghasilkan nilai tambah yang kecil dalam perekonomian. Kondisi ini diperburuk dengan lemahnya industri pengolahan di Kabupaten Tegal yang berbasis pada produk pertanian yang dihasilkan dari daerah sendiri. Industri pengolahan makanan yang memiliki kontribusi besar yaitu industri teh, mengambil bahan baku bukan dari Kabupaten Tegal. Industri pengolahan makanan kecil juga kebanyakan berbahan dasar terigu yang merupakan bahan impor. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Tegal perlu mendorong industrialisasi pertanian yang berbasis produk pertanian di Kabupaten Tegal. Jika hal ini dapat dilakukan dengan baik, maka sektor industri akan berkembang, dan sektor perdagangan juga akan ikut terdorong.

Tabel 2.8. **Milaidan Kontribusi Sektor dalam PDRBTahun 2009- 2013 atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Tegal (Juta Rupiah)**

No	Sektor	Tahun															
		2009		2010		2011		2012		2013							
		Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%						
1	Pertanian/Agriculture	1.018.773,02	14,29	1.120.895,97	14,12	1.223.219,79	13,90	1.336.175,79	13,63	1.464.711,78	13,33						
2	Pertambangan dan Penggalian/ Mining and Quarrying	151.294,43	2,12	177.827,13	2,24	201.359,84	2,29	226.223,47	2,31	254.874,25	2,32						
3	Industri Pengolahan/ Manufacturing	1.999.738,32	28,05	2.258.449,68	28,46	2.520.861,05	28,65	2.852.306,07	29,10	3.186.992,01	29,00						
4	Listrik, Gas dan Air Bersih/ Electricity Gas and Water Supply	38.693,33	0,54	42.702,74	0,54	45.682,15	0,52	49.611,00	0,51	55.785,43	0,51						
5	Bangunan/Konstruksi/ Construction	373.093,17	5,23	422.839,03	5,33	479.584,89	5,45	528.487,82	5,39	588.700,64	5,36						
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran/ Trade, Hotel and Restaurant	2.232.612,90	31,32	2.469.905,87	31,12	2.742.309,16	31,17	3.044.992,49	31,06	3.434.444,14	31,25						
7	Pengangkutan dan Komunikasi/ Transport and Communication	428.761,35	6,01	469.417,66	5,92	515.073,97	5,85	579.076,46	5,91	657.017,58	5,98						
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan/ Finance, Real Estate and Business Services	444.883,52	6,24	490.925,66	6,19	538.867,81	6,12	596.352,71	6,08	688.867,58	6,27						
9	Jasa-jasa/ Services	441.629,43	6,19	483.065,00	6,09	531.500,68	6,04	589.228,88	6,01	657.748,53	5,99						
	<b>Total</b>	<b>7.129.479,47</b>	<b>100</b>	<b>7.936.028,74</b>	<b>100</b>	<b>8.798.459,34</b>	<b>100</b>	<b>9.802.454,69</b>	<b>100</b>	<b>10.989.141,94</b>	<b>100</b>						

Sumber : Kabupaten Tegal Dalam Angka Tahun 2013

Tabel 2.9.  
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2009- 2013 atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Tegal (Juta Rupiah)

	Tahun										
	2009		2010		2011		2012		2013		
	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	
1	Pertanian / Agriculture	581.583,79	16,81	595.897,98	16,43	601.982,18	15,83	616.463,04	15,41	628.957,21	14,86
2	Pertambangan dan Penggalian / Mining and Quarrying	87.353,96	2,52	93.260,34	2,57	98.166,72	2,58	105.739,77	2,64	111.908,12	2,64
3	Industri Pengolahan / Manufacturing Industry	1.019.359,67	29,46	1.075.035,66	29,64	1.130.961,65	29,75	1.190.720,97	29,76	1.263.833,50	29,85
4	Listrik, Gas dan Air Bersih / Electricity Gas and Water Supply	19.755,64	0,57	20.751,72	0,57	21.747,79	0,57	22.787,86	0,57	24.155,32	0,57
5	Bangunan / Konstruksi / Construction	176.939,43	5,11	188.219,32	5,19	200.498,87	5,27	212.111,98	5,30	226.691,48	5,35
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran / Trade, Hotel and Resto	976.349,58	28,22	1.033.102,87	28,48	1.099.551,16	28,92	1.159.536,11	28,98	1.233.378,29	29,13
7	Pengangkutan dan Komunikasi / Transport And Communication	150.110,73	4,34	157.267,17	4,34	165.723,60	4,36	178.063,37	4,45	189.693,24	4,48
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan /	234.011,43	6,76	241.992,86	6,67	251.174,29	6,61	270.705,71	6,77	297.780,95	7,03
9	Jasa-jasa / Services	214.667,37	6,20	221.670,29	6,11	231.973,22	6,10	245.076,15	6,13	257.115,28	6,07
	<b>Total</b>	<b>3.460.131,60</b>	<b>100</b>	<b>3.627.198,20</b>	<b>100</b>	<b>3.801.779,47</b>	<b>100</b>	<b>4.001.204,96</b>	<b>100</b>	<b>4.233.513,40</b>	<b>100</b>

Sumber : Kabupaten Tegal Dalam Angka Tahun 2013

**Tabel 2.10.**  
**Pertumbuhan PDRB perSektor Tahun 2009- 2013 atas Dasar HargaBerlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk)**  
**Kabupaten Tegal (dalam %)**

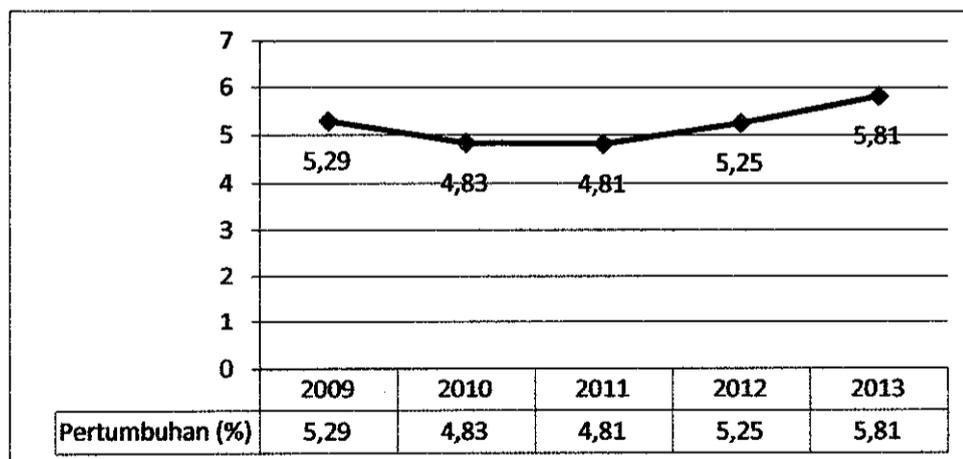
No.	Sektor	Tahun											
		2009		2010		2011		2012		2013			
		Hb	Hk										
1	Pertanian /Agriculture	7,35	2,59	10,02	2,46	9,13	1,02	9,23	2,41	9,62	2,03		
2	Pertambangan dan Penggalian / Miningand Quarrying	12,82	6,32	17,54	6,76	13,23	5,26	12,35	7,71	12,66	5,83		
3	Industri Pengolahan /Manufacturing Industry	12,00	6,79	12,94	5,46	11,62	5,20	13,15	5,28	11,73	6,14		
4	Listrik, Gas dan Air Bersih /Electricity Gas andWater	11,04	4,79	10,36	5,04	6,98	4,80	8,60	4,78	12,45	6,00		
5	Bangunan /Konstruksi /Construction	14,79	7,05	13,33	6,38	13,42	6,52	10,20	5,79	11,39	6,87		
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran /Trade,Hotel and Restourant	12,95	5,77	10,63	5,81	11,03	6,43	11,04	5,46	12,79	6,37		
7	Pengangkutan dan Komunikasi /Transport and Communication	9,21	4,19	9,48	4,77	9,73	5,38	12,43	7,45	13,46	6,53		
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan /	9,69	4,46	10,35	3,41	9,77	3,79	10,67	7,78	15,51	10,00		
9	Jasa-jasa / Services	9,43	3,53	9,38	3,26	10,03	4,65	10,86	5,65	11,63	4,91		
	<b>Total</b>	<b>11,28</b>	<b>5,29</b>	<b>11,31</b>	<b>4,83</b>	<b>10,87</b>	<b>4,81</b>	<b>11,41</b>	<b>5,25</b>	<b>12,11</b>	<b>5,81</b>		

Sumber : Kabupaten Tegal Dalam Angka Tahun 2013

## b. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan daerah. Dalam masa kini, keberhasilan pembangunan ekonomi tidak bisa hanya dimaknai sebagai pertumbuhan ekonomi saja, tetapi harus juga diikuti dengan pemerataan dan kesinambungan. Tujuan akhir yang ingin dicapai adalah pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yaitu yang dapat sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan baru dan mengurangi kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi harus diarahkan untuk meningkatkan dan menyeimbangkan pendapatan masyarakat sehingga dapat mengurangi ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial yang terjadi.

Pertumbuhan ekonomi dilihat dari perkembangan PDRB berdasar harga konstan, yang mengindikasikan pertumbuhan produksi total pada suatu daerah. Secara umum, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tegal sedikit mengalami perlambatan karena pengaruh krisis global pada 2008. Setelah pengaruh krisis melemah, pertumbuhan ekonomi meningkat secara stabil selama dua tahun terakhir dan menunjukkan tren yang bagus. Hanya saja, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tegal relatif masih lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 6%. Hal ini menunjukkan adanya potensi yang belum dioptimalkan, karena dengan lokasi Kabupaten Tegal yang strategis dan keunggulan komparatif yang nyata pada sektor industri pengolahan dan perdagangan, seharusnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tegal dapat mencapai 6%. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2013 adalah sebesar 5,81% sebagaimana Gambar 2.5 di bawah ini.



**Gambar 2.5. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tegal Tahun 2009-2014**  
Sumber : BPS Kabupaten Tegal Tahun 2009-2014

## c. PDRB Perkapita

PDRB perkapita Kabupaten Tegal atas dasar harga berlaku tahun 2009 sebesar 3.757.526,53 rupiah, pada tahun 2010 sebesar 4.180.064,95 rupiah, pada tahun 2011 sebesar 5.422.407,78 rupiah, pada tahun 2012

meningkat menjadi 7.013.736,29 rupiah, dan pada tahun 2013 menjadi 7.766.128,66 rupiah. Sementara, PDRB perkapita Kabupaten Tegal atas dasar harga konstan tahun 2009 sebesar 2.435.408,94 rupiah, pada tahun 2010 sebesar 2.600.442,21 rupiah, pada tahun 2011 sebesar 2.715.060,30 rupiah, pada tahun 2012 meningkat menjadi 2.862.895,00 rupiah, dan tahun 2013 menjadi 2.991.863,23 rupiah. Secara umum, pendapatan perkapita masyarakat Kabupaten Tegal berada pada tren yang baik dan stabil mengalami peningkatan sebagaimana Tabel 2.11 di bawah ini.

**Tabel 2.11.**  
**PDRB Perkapita Kabupaten Tegal per Tahun Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Tahun 2009-2014 (Dalam Rupiah)**

<b>Indikator</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
PDRB Perkapita ADHB (Rp)	3.757.526,53	4.180.064,95	5.422.407,98	7.013.736,29	7.766.128,66
PDRB Perkapita ADHK (Rp)	2.435.408,94	2.600.442,21	2.715.060,30	2.862.895,00	2.991.863,23

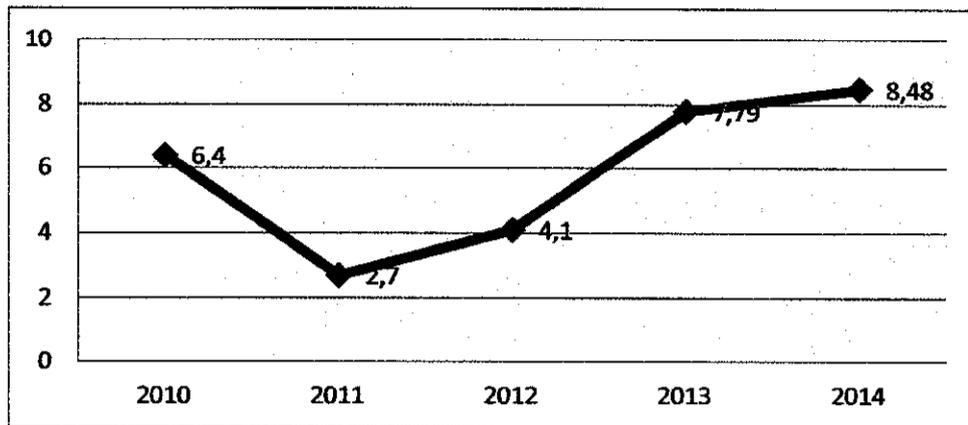
Sumber : BPS Kabupaten Tegal Tahun 2009-2013, diolah

#### **d. Tingkat Inflasi**

Selama tahun 2014 laju inflasi yang terjadi di Kota Slawi secara umum mencapai 8,48 persen, sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 7,79 persen. Kenaikan indeks ini lebih didorong oleh kenaikan indeks pada kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar yang selama tahun kalender 2014 mencapai inflasi 13,95 persen, disusul kelompok transportasi 8,41 persen, kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau 8,00 persen, kelompok bahan makanan 7,23 persen, kelompok kesehatan 3,90 persen, kelompok sandang 1,87 persen, dan paling kecil kelompok pendidikan, rekreasi, dan olah raga 0,44 persen.

Kenaikan indeks pada kelompok perumahan, dikarenakan kenaikan indeks pada sub kelompok biaya tempat tinggal yang mencapai 17,21 persen dan sub kelompok penyelenggaraan rumah tangga yang mengalami inflasi sebesar 14,61 persen. Sub kelompok lain yang mengalami kenaikan indeks cukup tinggi antara lain sub kelompok transport yang mencapai 14,91 persen; sub kelompok padi-padian, umbi-umbian, dan hasilnya mencapai 14,90 persen; dan juga sub kelompok telur, susu, dan hasil-hasilnya yang mengalami kenaikan indeks sebesar 14,51 persen. Sedangkan sub kelompok yang mengalami kenaikan indeks relative tetap atau tidak mengalami perubahan harga terjadi pada sub kelompok jasa kesehatan, sub kelompok jasa pendidikan, dan sub kelompok kursus-kursus/pelatihan. Inflasi tahun 2014

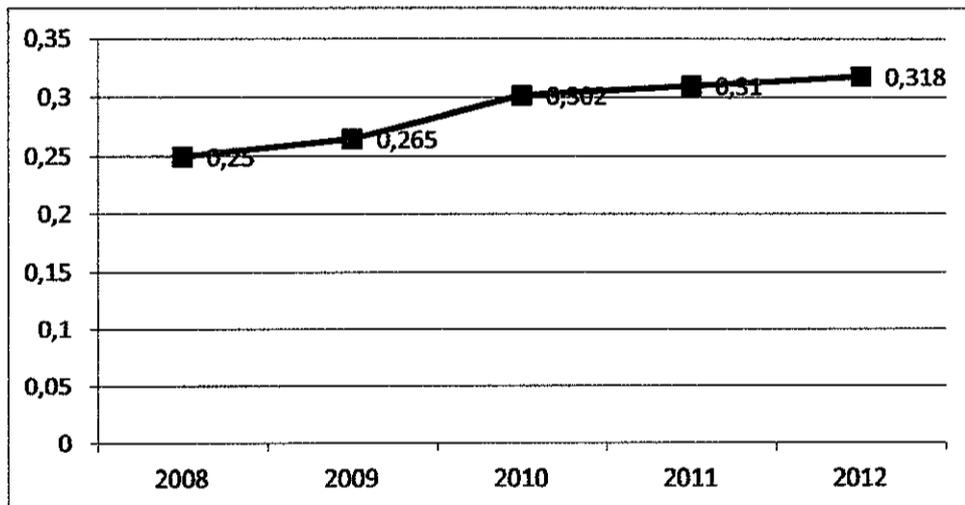
merupakan nilai tertinggi dalam kurun waktu 2009-2014 sebagaimana Gambar 2.6 berikut ini.



**Gambar 2.6. Tingkat Inflasi Kabupaten Tegal Tahun 2010-2014**  
Sumber : BPS Kabupaten Tegal Tahun 2014

#### e. Indeks Gini

Indeks merupakan suatu ukuran untuk melihat ketimpangan pendapatan masyarakat. Indeks Gini Kabupaten Tegal 2008-2012 meningkat yang menunjukkan adanya peningkatan ketimpangan pendapatan dalam masyarakat sebagaimana dapat dilihat dalam Gambar 2.7 di bawah ini.



**Gambar 2.7. Indeks Gini Kabupaten Tegal Tahun 2008-2012**  
Sumber : BPS Kabupaten Tegal Tahun 2013

#### f. Indeks Williamson

Indeks Williamson adalah indeks untuk mengukur ketimpangan daerah. Indeks ini adalah koefisien variasi terbobot dari proporsi populasi di tiap kecamatan dibandingkan dengan total populasi kabupaten. Indeks yang semakin kecil menunjukkan bahwa ketimpangan semakin berkurang, sedangkan semakin besar nilai indeks menunjukkan bahwa ketimpangan semakin bertambah. Pada lima tahun terakhir Indeks Williamson Kabupaten Tegal cukup fluktuatif, dimana pada Tahun 2008 pada angka

0,271, Tahun 2009 dan Tahun 2010 sebesar 0,272, kemudian Tahun 2011 menurun pada angka 0,249, tetapi pada Tahun 2012 kembali naik pada angka 0,258. Dari data indeks Williamson tersebut, Kabupaten Tegal masih bisa dikategorikan dalam tingkat ketimpangan rendah. Meskipun demikian, tren yang terjadi adalah angka Indeks Williamson cenderung naik; yang mengimplikasikan bahwa ketimpangan wilayah cenderung meningkat. Hal ini perlu diwaspadai, bahwa ketimpangan wilayah yang masuk dalam kategori rendah seharusnya tidak boleh melenakan Pemerintah Kabupaten Tegal dalam melaksanakan pembangunan, sehingga arah pembangunan harus berorientasi pada pemerataan dan tidak hanya pada pertumbuhan saja.

#### **g. Kemiskinan**

Kemiskinan merupakan permasalahan krusial yang sangat berpengaruh terhadap masyarakat di dalam mengakses pelayanan dasar yaitu pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan dan kemampuan daya beli. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tegal pada tahun 2013 sebanyak 149.800 jiwa atau 10,58% terhadap total jumlah penduduk. Jumlah ini menurun bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (2009-2012), di mana pada tahun 2009 mencapai 195.500 jiwa atau 13,98% terhadap jumlah penduduk.

Selanjutnya, jumlah penduduk miskin pada tahun 2010 mencapai 182.542 jiwa atau 13,11%, tahun 2011 mencapai 161.116 jiwa atau 11,54%. Tahun 2012 mencapai 152.758 jiwa atau 10,75%.

Berikut adalah Gambaran secara lengkap mengenai angka kemiskinan yang merupakan presentase penduduk miskin terhadap jumlah penduduk selama kurun waktu tahun 2009-2013, dapat dilihat pada Tabel 2.12 di bawah ini.

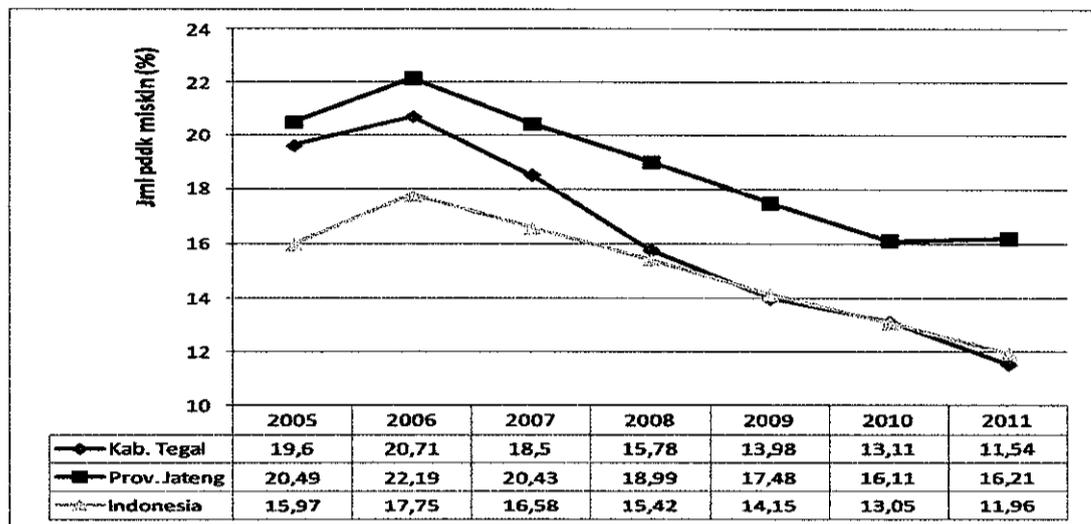
**Tabel 2.12.**  
**Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Tegal**  
**Tahun 2009- 2013**

<b>No.</b>	<b>Uraian</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
1.	Jumlah Penduduk Miskin	195.500	182.542	161.116	152.758	149.800
2.	Jumlah Penduduk	1.420.760	1.394.839	1.400.256	1.421.001	1.420.132
3.	Persentase Penduduk miskin terhadap jumlah penduduk	13,98	13,11	11,54	10,75	10,58

Sumber : BPS Kabupaten Tegal Tahun 2009-2013

Berdasarkan data pada tahun 2011, prosentase jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tegal lebih kecil daripada prosentase jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah dan Indonesia. Selain itu, laju

penurunan prosentase jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tegal juga paling baik (rata-rata 1,34%; Provinsi Jawa Tengah 0,71% dan Indonesia 0,67%). Hanya saja, proporsi penduduk miskin yang masih berada di atas 10% merupakan satu hal yang perlu segera ditangani. Sebagaimana Gambar 2.8 berikut ini.



**Gambar 2.8 Persentase Kemiskinan**

Sumber: Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka, 2011

#### **h. Angka Kriminalitas yang Tertangani**

Penanganan tindak kriminal di Kabupaten Tegal masih belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. Hal ini ditunjukkan dengan angka kriminalitas yang tertangani masih fluktuatif sebagaimana Tabel 2.12 di bawah ini.

**Tabel 2.12.**  
**Angka Kriminalitas yang Tertangani di Kabupaten Tegal Tahun 2010 - 2014**

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Jumlah Perkara	254	234	210	213	226
2.	Jumlah Perkara terselesaikan	254	181	188	196	201
3.	Persentase Perkara yang Tertangani	100	77,35	89,52	92,01	88,93

Sumber : BPS Kabupaten Tegal Tahun 2009-2014

### **2.1.3.2 Kesejahteraan Sosial**

#### **a. Angka Indeks Pembangunan Manusia**

Angka Indeks Pembangunan Manusia merupakan ukuran agregat dari dimensi dasar pembangunan manusia dengan melihat perkembangannya dari waktu ke waktu. Angka IPM berkisar antara 0 hingga 100. Semakin mendekati 100, maka diindikasikan pembangunan manusia semakin baik. IPM Kabupaten Tegal selalu meningkat seiring waktu. Jika dilihat secara lebih detail, semua indikator penyusun IPM juga mengalami peningkatan. Sebagaimana Tabel 2.13 di bawah ini.

**Tabel 2.13.**  
**Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**  
**Kabupaten Tegal Tahun 2009 – 2013**

<b>Komponen IPM</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
1. Harapan Hidup (E <sub>0</sub> )	68,49	68,79	69,08	69,38	69,58
2. Melek Huruf (Lit)	89,21	89,26	89,47	90,64	91,03
3. Rata-Rata Lama Sekolah (MYS)	6,42	6,56	6,60	6,62	6,62
4. PPP ( 000 Rp)	637,090	639,95	643,48	646,190	649,84
<b>Indeks Pembangunan Manusia</b>	<b>70,08</b>	<b>70,59</b>	<b>71,09</b>	<b>71,74</b>	<b>72,22</b>

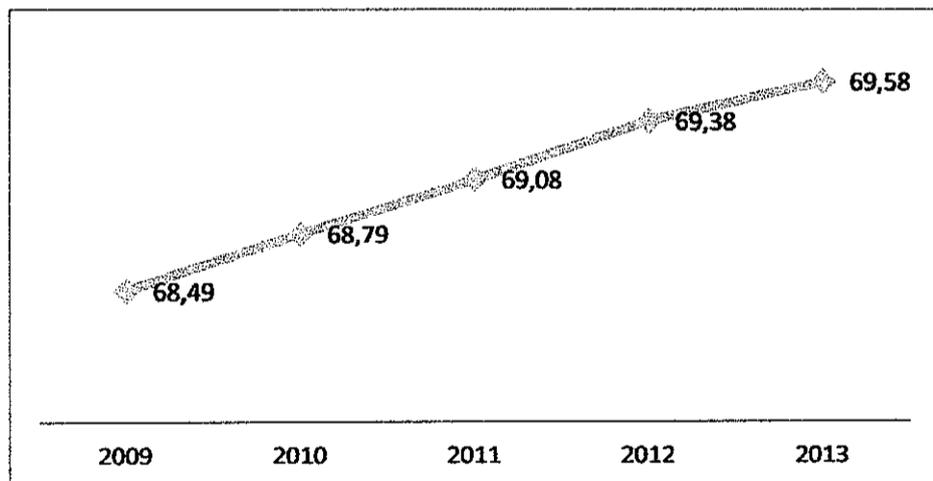
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah 2014

Dari hasil penghitungan menunjukkan bahwa nilai IPM Kabupaten Tegal tahun 2013 mencapai 72,22. Bila dibandingkan dengan tahun 2012 yang hanya 71,74 maka nilai IPM 2013 mengalami peningkatan sebesar 0,48. Kenaikan angka IPM terutama berkaitan dengan kenaikan semua angka indikator pembangunan manusia yang terdiri dari angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, dan tingkat daya beli masyarakat Kabupaten Tegal. Dengan perkataan lain, naiknya Indeks Pembangunan Manusia menunjukkan semakin naiknya tingkat kesejahteraan penduduk Kabupaten Tegal.

Berdasarkan pedoman yang dikeluarkan UNDP, untuk menyusun indeks komposit pembangunan manusia (IPM) indikator yang diperlukan adalah:

**1) Angka Harapan Hidup(e<sub>0</sub>)**

Angka harapan hidup adalah angka yang menggambarkan kesehatan rata-rata yang telah dicapai oleh suatu kelompok masyarakat. Secara umum, angka harapan hidup masyarakat di Kabupaten Tegal mengalami tren yang positif, seperti digambarkan pada Gambar 2.15 di bawah ini.

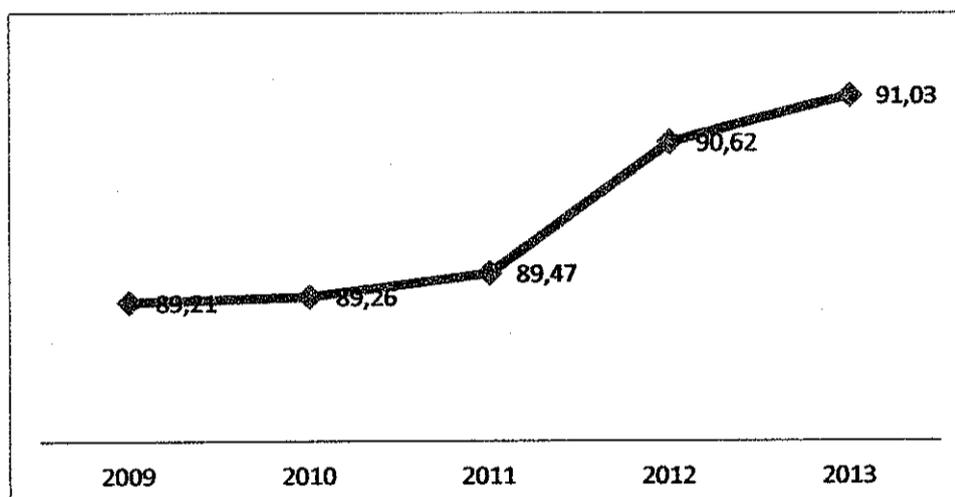


**Gambar 2.9. Usia Harapan Hidup Kabupaten Tegal Tahun 2009-2014**  
 Sumber : BPS Kabupaten Tegal Tahun 2013

**2) Angka Melek Huruf (Lit)**

Kemampuan baca tulis dipandang sebagai kemampuan dasar

minimal yang harus dimiliki oleh penduduk. Angka melek huruf merupakan indikator pendidikan yang menunjukkan banyaknya penduduk yang mampu membaca dan menulis dan sekaligus menggambarkan tentang kualitas penduduk secara umum. Angka melek huruf merupakan rasio penduduk berumur 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis (baik huruf latin maupun lainnya) dengan seluruh penduduk berumur 15 tahun keatas. Angka melek huruf masyarakat Kabupaten Tegal juga selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun sebagaimana terlihat pada Gambar 2.10 di bawah ini:

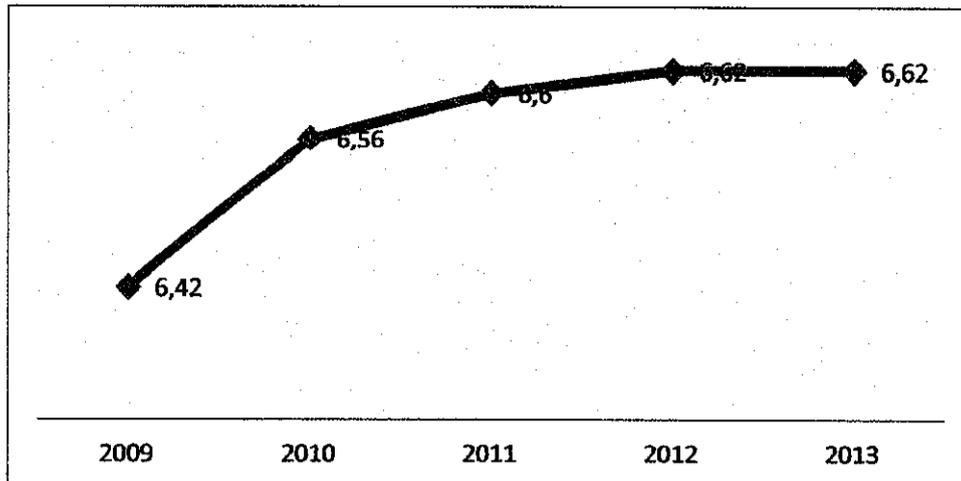


**Gambar 2.10 Angka Melek Huruf Kabupaten Tegal Tahun 2009-2014**

Sumber : BPS Kabupaten Tegal Tahun 2013

### 3) Rata-rata Lama Sekolah (MYS)

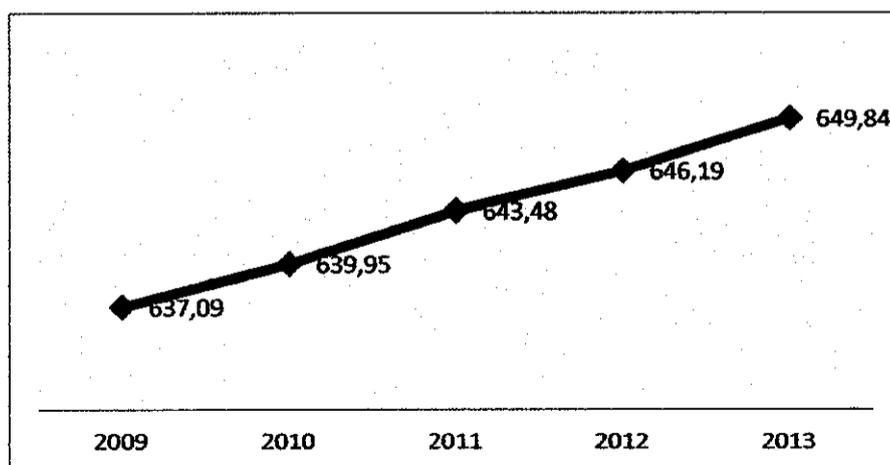
Seperti halnya angka melek huruf (Lit), rata-rata lama sekolah (MYS) merupakan indikator pendidikan yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pengetahuan dan keterampilan secara umum yang dimiliki oleh penduduk. Populasi yang digunakan UNDP untuk penghitungan MYS dibatasi pada penduduk berumur 15 tahun keatas. Batasan itu diperlukan agar angkanya lebih mencerminkan kondisi sebenarnya mengingat penduduk yang berusia kurang dari 15 tahun masih dalam proses sekolah sehingga belum pantas ditanyakan MYS-nya. Data yang digunakan untuk penghitungan MYS adalah data hasil Susenas 2012. MYS Kabupaten Tegal sebesar 6,62 tahun. Berdasarkan hasil Susenas diperoleh bahwa lamanya penduduk bersekolah secara rata-rata masih rendah (dibawah 7 tahun). Hal ini berarti secara rata-rata tingkat pendidikan penduduk dewasa (15 tahun keatas) di Kabupaten Tegal baru tamat Sekolah Dasar. Sebagaimana Gambar 2.11 berikut :



**Gambar 2.11. Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Tegal Tahun 2009-2014**  
 Sumber : BPS Kabupaten Tegal Tahun 2013

#### 4) Purchasing Power Parity (PPP)

Untuk melihat seberapa jauh kemampuan pertumbuhan dan pemerataan hasil pembangunan, yang memberikan output berupa peningkatan kebutuhan fisik dasar manusia menggunakan salah satu komponen yaitu komponen pendapatan. Komponen pendapatan atau lebih dikenal sebagai indikator PPP sebagai ukuran "paritas daya beli", mengukur kemampuan dalam mengakses sumber daya ekonomi. IPM secara konseptual jelas lebih lengkap dalam merefleksikan taraf pembangunan manusia. Menurut UNDP (*United Nations Development Programme*), IPM memberikan gambaran yang ideal karena memasukkan aspek peluang kerja/berusaha yang memadai, sehingga memperoleh sejumlah "uang" yang memiliki daya beli (*purchasing power*). Pemenuhan kebutuhan tersebut diukur dengan PPP (*Purchasing Power Parity*). Gambaran mengenai kemampuan daya beli masyarakat dapat diperoleh dari besarnya angka PPP. Nilai PPP Kabupaten Tegal pada tahun 2013 sebesar Rp 649.840,00. Sebagaimana Gambar 2.12 berikut ini.



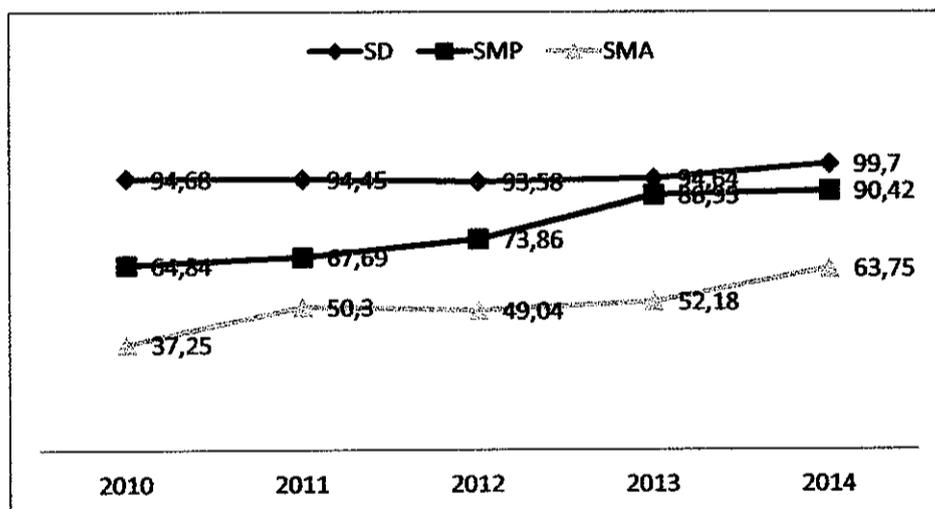
**Gambar 2.12 Purchasing Power Parity Kabupaten Tegal 2009-2013**  
 Sumber : BPS Kabupaten Tegal 2013

## b. Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar

APM (Angka Partisipasi Murni) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah siswa kelompok usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam prosentase. Indikator APM digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan yang sesuai. Di tahun 2014 APM SD/MI mencapai 99,7%. Artinya bahwa anak sekolah setingkat SD/MI di kabupaten Tegal yang sesuai dengan usia sekolah dari jenjang yang ada sebesar 99,7%, selebihnya 0,30% merupakan siswa SD yang tidak atau belum berusia 7-12 tahun.

APM SMP/MTs Tahun 2014 sebesar 90,42% yang artinya masih ada anak usia lebih atau kurang 13-15 tahun duduk di jenjang sekolah SMP/MTs dengan persentase sebesar 9,58% dari jumlah keseluruhan siswa yang ada. APM SMA tahun 2014 sebesar 63,75% yang artinya siswa jenjang sekolah SMA dengan kelompok usia 16-18 tahun sebesar 36,25% selebihnya 47,82 % berada di kelompok usia di bawah atau di atas 16-18 Tahun.

Menurut BPS, APM dianggap sebagai indikator yang lebih baik daripada APK karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut. Sebagaimana Gambar 2.13 di bawah ini.

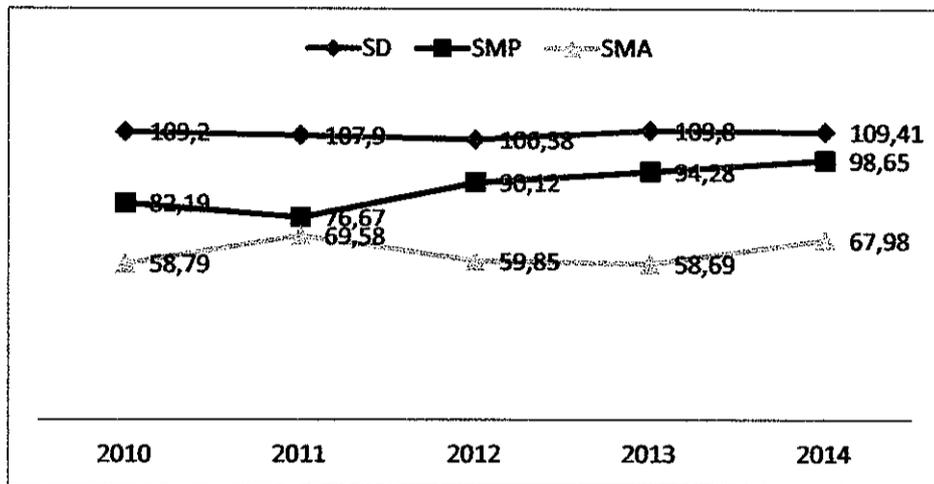


**Gambar 2.13 : Angka Partisipasi Murni Tahun 2009-2014**

Sumber : Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Tegal Tahun 2014

APK (Angka Partisipasi Kasar) digunakan sebagai alat ukur untuk mengetahui banyaknya anak yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan tertentu pada suatu wilayah. Semakin tinggi nilai APK semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah. Nilai APK bisa lebih besar dari 100% karena terdapat murid yang berusia di luar usia resmi sekolah. APK SD/MI Kabupaten Tegal di tahun 2014 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2013. Tahun 2014 mencapai angka 109,41% dan di tahun 2013 mencapai

angka 109,80%. Turun sebesar 0,39%. Hal ini menandakan adanya penurunan anak usia sekolah yang bersekolah di jenjang SD/MI. APK SMP/MTS mengalami peningkatan sebesar 4,37%. Dari 90,12% di tahun 2012, menjadi 94,28% di tahun 2013. APK SMA/MA mengalami kenaikan sebesar 9,29% dibanding dengan tahun 2013. Tahun 2013 sebesar 58,69% dan di Tahun 2014 sebesar 67,98. Sebagaimana Gambar 2.14 dibawah ini.

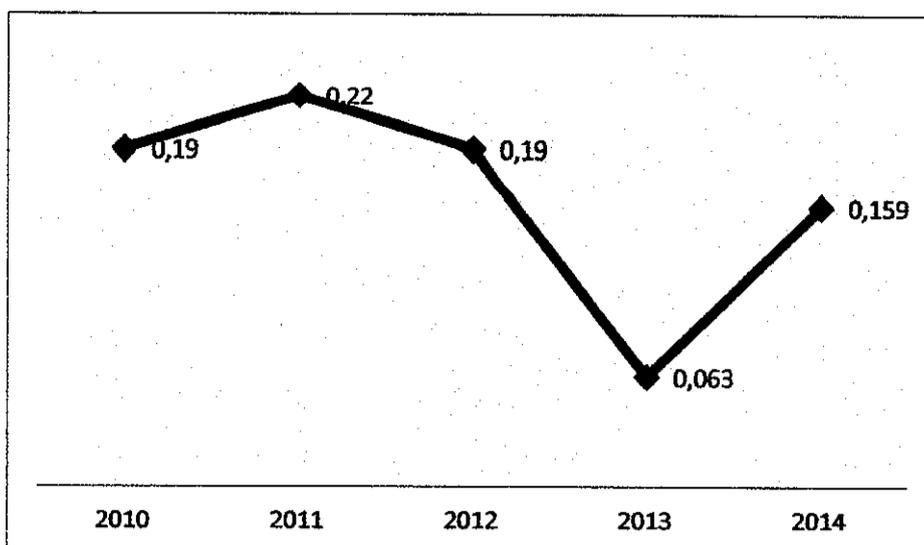


**Gambar 2.14 : Angka Partisipasi Kasar Tahun 2009-2014**

Sumber : Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Tegal Tahun 2013

### c. **Persentase Balita Gizi Buruk**

Persentase balita yang mengalami gizi buruk sejak Tahun 2011 mengalami penurunan sampai dengan Tahun 2013. Kasus balita gizi buruk umumnya terjadi karena tidak ada makanan (faktor kemiskinan), dan ada makanan tetapi tidak diasupkan (faktor perilaku dan pola asuh). Dari 77 kasus balita gizi buruk di Kabupaten Tegal, 70%nya karena faktor kemiskinan, sedangkan sisanya karena perilaku dan pola asuh anak yang salah. Penyebab kedua ini biasanya terjadi karena orang tua malas atau tidak *tlaten* dalam memberikan makanan pada anak balitanya. Bisa juga karena anak diserahkan sepenuhnya kepada pembantu yang tidak tahu mengenai masalah gizi atau tidak peduli pada kesehatan anak, sehingga anak akhirnya kekurangan gizi. Sebagaimana Gambar 2.15 berikut ini.



**Gambar 2.15: Persentase Balita Gizi Buruk Tahun 2009-2014**  
 Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal Tahun 2014

**d. Jumlah Kasus Kematian Ibu dan Kematian Bayi**

Jumlah kematian ibu adalah banyaknya ibu yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya selama kehamilan, melahirkan dan masa nifas. Jumlah kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara setelah bayi lahir sampai berusia satu tahun. Jumlah kasus kematian ibu dan kematian bayi 2009-2014 sebagaimana Tabel 2.14 di bawah ini.

**Tabel 2.14.**  
**Jumlah Kasus Kematian Ibu dan Kematian Bayi**  
**di Kabupaten Tegal Tahun 2009 - 2014**

No.	Uraian	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Jumlah Kasus Kematian Ibu	14	27	51	39	42	47
2.	Jumlah Kematian Bayi	178	209	188	228	256	266

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal Tahun 2014

**e. Indeks Pembangunan Gender (IPG)**

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM yaitu di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM sama dengan IPG. Selama tahun 2012 IPG Kabupaten Tegal tercatat sebesar 60,72 naik 0,54 poin dibanding IPG tahun 2011. Peningkatan IPG ini menunjukkan indikasi keberhasilan dalam pembangunan gender. Namun demikian hasil yang dicapai dalam upaya pembangunan kualitas hidup di Kabupaten Tegal masih terlihat jelas cenderung menguntungkan kepada penduduk laki-laki. Fenomena ini

tercermin dari indikator komposit yang digunakan untuk menilai kesenjangan gender, yaitu IPG menunjukkan angka yang lebih rendah dibanding IPM. Sebagaimana Tabel 2.15 di bawah ini.

**Tabel 2.15**  
**Indeks Pembangunan Gender (IPG)**  
**Kabupaten Tegal dan Provinsi Jawa Tengah**  
**Tahun 2009-2013**

Daerah	2009	2010	2011	2012	2013
Prov. Jateng	65,03	65,79	66,45	66,80	67,97
Kab. Tegal	59,05	59,32	60,18	60,72	61,53

Sumber : BPS, 2013

**f. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)**

IDG merupakan indeks yang digunakan untuk mengkaji lebih jauh peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Dimensi dari IDG mencakup partisipasi berpolitik direpresentasikan dengan keterwakilan perempuan dalam parlemen; partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan direpresentasikan sebagai perempuan sebagai tenaga profesional, teknisi, Kepemimpinan dan ketatalaksanaan, serta penguasaan sumber daya ekonomi yaitu sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja.

Secara umum peranan perempuan dalam pengambilan keputusan di Kabupaten Tegal yang diukur melalui IDG memperlihatkan penurunan 0,14 poin dari 51,70 ditahun 2011 menjadi 51,16 ditahun 2012. Persentase variabel pembentuk IDG tahun 2012 sebagai berikut: keterlibatan perempuan diparlemen 6%, perempuan sebagai tenaga profesional 42,54% dan sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja 26,71%. Perkembangan IDG Kabupaten Tegal tahun 2008-2013 dapat dilihat dalam Tabel 2.16 di bawah ini.

**Tabel 2.16.**  
**Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)**  
**Kabupaten Tegal dan Provinsi Jawa Tengah**  
**Tahun 2009-2013**

Daerah	2009	2010	2011	2012	2013
Prov. Jateng	59,96	67,96	68,99	70,66	71,22
Kab. Tegal	54,80	49,07	51,70	51,16	51,91

Sumber : BPS, 2013

**g. Fokus Seni Budaya, Pemuda dan Olahraga**

Pembangunan kebudayaan di Kabupaten Tegal ditujukan untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah serta mempertahankan jati diri dan nilai-nilai budaya daerah di tengah-tengah semakin derasnya arus informasi dan pengaruh negatif budaya global. Pembangunan seni dan budaya di Kabupaten Tegal sudah mengalami kemajuan yang ditandai dengan meningkatnya pemahaman terhadap nilai

budaya dan penggunaan bahasa daerah namun demikian upaya peningkatan jati diri masyarakat Kabupaten Tegal seperti halnya solidaritas sosial, kekeluargaan, budaya berperilaku positif seperti kerja keras, gotong royong, penghargaan terhadap nilai budaya dan bahasa masih perlu terus ditingkatkan. Kepemudaan dan Olah Raga Pembinaan Generasi muda dilaksanakan melalui kegiatan Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra), penyelenggaraan *aubade*, penyelenggaraan upacara bendera, penyelenggaraan pemuda produktif, kegiatan pemuda pelopor.

Pembinaan olahraga dilaksanakan melalui kegiatan pembinaan olahraga pelajar dan pembinaan olahraga masyarakat yang meliputi pengadaan sarana dan prasarana olahraga, penyelenggaraan pekan olahraga SD, penyelenggaraan pekan olahraga SMP, penyelenggaraan pekan olahraga pelajar daerah (Popda), kegiatan lomba gerak jalan, bimbingan teknis personal, lomba senam dan kegiatan senam masal, tes kesegaran jasmani bagi SMP dan SMA. Pembinaan olah raga melalui penyelenggaraan pekan olahraga pelajar SD,SMP,SMA/SMK yang terdiri dari beberapa cabang olahraga, penyelenggaraan pembinaan teknis personal, penyelenggaraan bantuan sarana dan prasarana. Kegiatan Porseni SD, SMP/SMA/SMK, penyelenggaraan tes kesegaran jasmani guru olahraga, penyelenggaraan lari 10K, penyelenggaraan gerak jalan santai, kegiatan Popda SD, SMP, SMA/ SMK penyelenggaraan lari 10K, kegiatan jalan santai, penyelenggaraan tes kesegaran jasmani SMP dan SMA. Perkembangan Seni, Budaya, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal didukung oleh grup kesenian yang berjumlah 311 grup, 1 gedung kesenian, 1 museum dan pusat kebudayaan, 158 cagar budaya bergerak, 27 cagar budaya tidak bergerak, 16 organisasi pemuda dan 56 klub olahraga. Sebagaimana Tabel 2.17 di bawah ini.

**Tabel 2.17.**  
**Perkembangan Seni, Budaya, Pemuda dan Olahraga**  
**Kabupaten Tegal Tahun 2010 - 2014**

No	Capaian Pembangunan	2010	2011	2012	2013	2014
1	Jumlah Grup Kesenian	311	311	311	311	311
2	Jumlah Gedung Kesenian	1	1	1	1	1
3	Jumlah Museum dan Pusat Kebudayaan	1	1	1	1	1
4	Jumlah Benda Cagar Budaya :					
	a. Bergerak	158	158	158	158	158
	b. Tidak Bergerak	27	27	27	27	27
5	Jumlah Organisasi Pemuda	16	16	16	16	16
6	Jumlah Organisasi / Klub Olahraga	56	56	56	56	56

Sumber : -Dinas Pariwisata dan Kebudayaan,  
-Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal Tahun 2014

### 2.1. 3 Aspek Pelayanan Umum

Fokus aspek pelayanan umum diukur dari Indikator Layanan Pendidikan (Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah, Rasio Guru

Murid), Indikator Layanan Kesehatan (Rasio rumah sakit/penduduk, rasio puskesmas/penduduk), Indikator Layanan perizinan (jumlah perizinan yang dikeluarkan) dan Indikator Layanan kependudukan (rasio penduduk ber KTP).

### 2.1.3.1. Pendidikan

#### a. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Salah satu indikator yang sering digunakan untuk mengukur partisipasi pendidikan murid, diantaranya adalah Angka Partisipasi Sekolah (APS). Indikator ini menunjukkan seberapa besar anak usia menurut tingkat pendidikan tertentu berada dalam lingkup pendidikan dan penyerapan dunia pendidikan formal terhadap penduduk usia sekolah. APS dihitung berdasarkan jumlah murid kelompok usia pendidikan yang masih menempuh pendidikan dasar per 1.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar. Penurunan dan kenaikan nilai APS sangat dipengaruhi oleh banyaknya jumlah murid usia sekolah. Namun, naiknya persentase jumlah murid tidak dapat langsung diartikan sebagai semakin meningkatnya partisipasi sekolah. Kenaikan tersebut dapat pula dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah penduduk usia sekolah yang tidak diimbangi dengan penambahan infrastruktur sekolah serta peningkatan akses masuk sekolah sehingga partisipasi sekolah seharusnya tidak berubah atau malah semakin rendah. Berikut secara lengkap disajikan data mengenai APS di Kabupaten Tegal per jenjang pendidikan selama kurun waktu tahun 2009-2014. Sebagaimana Tabel 2.18 berikut ini.

**Tabel 2.18.**  
**Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kabupaten Tegal**  
**Tahun 2009 – 2014**

N	Jenjang Pendidikan	2010	2011	2012	2013	2014
1	SD/MI					
1.1.	Jumlah murid usia 7-12 tahun	152.669	146.271	170.173	184.944	155.090
1.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	182.538	184.431	186.445	168.432	155.557
1.3.	Angka Partisipasi Sekolah SD/MI	83,63	79,31	91,27	109,80	99,70
2	SMP/MTS					
2.1.	Jumlah murid usia 13-15 tahun	18.635	20.966	72.570	73.490	66.171
2.2.	Jumlah penduduk Kelompok usia 13-15 tahun	39.565	40.012	83.078	77.948	73.199
2.3.	Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs	47,10	52,40	87,35	94,28	90,42
3	SMA/SMK/MA					

3.1	Jumlah murid usia 16-18 tahun	10.649	11.243	15.991	19.099	39.674
3.2	Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	24.594	25.438	34.916	34.916	62.284
3.3	Angka Partisipasi Sekolah SMA/MA/SMK	43,30	44,20	45,80	54,70	63,75

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal Tahun 2014

#### b. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah berdasarkan tingkat pendidikan per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan. Selama kurun waktu 2009-2014 rasio ketersediaan sekolah untuk jenjang pendidikan SD/MI mengalami penurunan, hal ini disebabkan karena pertumbuhan penduduk tidak disertai dengan peningkatan jumlah sekolah SD/MI. Pada tahun 2014, perbandingan ketersediaan sekolah SD/MI di Kabupaten Tegal adalah 1:157,76. Angka ini menunjukkan bahwa 1 sekolah SD/MI menampung 158 siswa. Berbeda dengan SD/MA, rasio ketersediaan sekolah untuk jenjang pendidikan SMA/MA/SMK mengalami peningkatan. Peningkatan ini dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu meningkatnya jumlah sekolah SMA/MA/MK atau tingginya angka putus sekolah pada jenjang SMP/MTs. Berikut secara lengkap disajikan data mengenai kondisi ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah di Kabupaten Tegal per jenjang pendidikan selama kurun waktu tahun 2009-2014. Sebagaimana Tabel 2.19 di bawah ini.

**Tabel 2.19.**  
**Perbandingan Jumlah Sekolah Berdasarkan Penduduk Usia Sekolah Di Kabupaten Tegal Tahun 2009-2014**

No.	Jenjang Pendidikan	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<b>1</b>	<b>SD/MI</b>						
1.1.	Jumlah sekolah	913	909	910	917	903	986
1.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	180.535	182.538	184.431	186.445	161.653	155.557
1.3.	Perbandingan Jumlah Sekolah dengan Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7 -12 Tahun	1 : 197,74	1 : 200,81	1 : 202,67	1 : 203,32	1 : 179,02	1 : 157,76
<b>2</b>	<b>SMP/MTs</b>						
2.1.	Jumlah sekolah	148	150	161	163	186	174
2.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	39.324	39.565	40.012	65.290	65.208	73.199

No.	Jenjang Pendidikan	2009	2010	2011	2012	2013	2014
2.3.	Perbandingan Jumlah Sekolah dengan Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13 - 15 Tahun	1 : 265,70	1 : 263,77	1 : 248,52	1 : 400,55	1:350,58	1 : 420,68
<b>3</b>	<b>SMA/MA/SMK</b>						
3.1	Jumlah sekolah	38	38	40	39	39	103
3.2	Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	23.750	24.594	25.438	34.916	34.916	62.284
3.3	Perbandingan Jumlah Sekolah dengan Jumlah Penduduk Kelompok Usia 16-18 Tahun	1 : 625	1 : 647, 21	1 : 635,99	1 : 895,28	1 : 895,28	1 : 604,69

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemudadan Olahraga Kabupaten Tegal Tahun 2014

### c. Rasio Guru/Murid

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru berdasarkan tingkat pendidikan per 10.000 jumlah murid berdasarkan tingkat pendidikan. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar juga mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Selama kurun waktu tahun 2010-2012 rasio ketersediaan guru di Kabupaten Tegal untuk jenjang pendidikan SD/MI per 10.000 jumlah murid mengalami penurunan, pada tahun 2014 untuk jenjang pendidikan SD/MI mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2013, di mana pada tahun 2013 rasio ketersediaan guru SD/MI mencapai 24,31 dan pada tahun 2012 mencapai 19,15. Demikian pula rasio ketersediaan guru SMA/MA/SMK pada tahun 2014 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2013, di mana pada tahun 2013 rasio ketersediaan guru SMA/MA/SMK mencapai 30,44 dan pada tahun 2012 mencapai 14,08. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai kondisi ketersediaan guru/murid di Kabupaten Tegal per jenjang pendidikan selama kurun waktu tahun 2009-2014. Sebagaimana Tabel 2.20 berikut ini.

**Tabel 2.20.**  
**Jumlah Guru dan Murid berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kabupaten Tegal Tahun 2009-2014**

No.	Jenjang Pendidikan	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<b>1</b>	<b>SD/MI</b>						
1.1.	Jumlah Guru	6.117	6.279	6.232	7.448	7.609	8.848
1.2.	Jumlah Murid	157.263	152.669	146.274	142.640	184.942	170.914
1.3.	Perbandingan Jumlah Guru terhadap Jumlah Murid	1 : 25,71	1 : 24,31	1 : 23,47	1 : 19,15	1 : 24,31	1 : 19,73

<b>2</b>		<b>SMP/MTs.</b>					
2.1.	Jumlah Guru	2.159	2.150	2.185	2.637	3.269	4.103
2.2.	Jumlah Murid	43.153	48.268	48.521	45.100	80.136	72.210
2.3.	Perbandingan Jumlah Guru terhadap Jumlah Murid	1 : 19,98	1 : 22,45	1 : 22,21	1 : 17,1	1 : 24,53	1 : 17,59
<b>3</b>		<b>SMA/MA/SMK</b>					
3.1	Jumlah Guru	1.608	1.898	1.898	2.493	1.510	2.444
3.2	Jumlah Murid	29.963	27.863	34.698	35.109	45.968	42.265
3.3	Perbandingan Jumlah Guru Terhadap Jumlah	1 : 18,63	1 : 14,68	1 : 18,28	1 : 14,08	1 : 30,44	1 : 17,29

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemudadan Olahraga Kabupaten Tegal Tahun 2014

#### **d. Rasio Guru/Murid per Kelas Rata-Rata**

Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata adalah jumlah guru per kelas per 1.000 jumlah murid. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar per kelas. Di samping itu juga untuk mengukur jumlah ideal guru per kelas terhadap jumlah murid agar tercapai mutu pengajaran. Pada tahun 2014, rasio guru/kelas SD/MI terhadap jumlah murid yang berusia 6-12 tahun di Kabupaten Tegal adalah 1: 1,52 : 29,31. Interpretasi dari angka diatas adalah bahwa 1 kelas SD dilayani (diajar) oleh 1,52 ≈ 1 orang guru, dimana kelas tersebut terdiri atas 29,31 ≈ 29 murid SD. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai kondisi ketersediaan guru/murid di Kabupaten Tegal per jenjang pendidikan selama kurun waktu tahun 2009-2014. Sebagaimana Tabel 2.21 di bawah ini.

**Tabel 2.21.**  
**Rasio Guru per Kelas Rata-rata terhadap Jumlah Murid di Kabupaten Tegal Tahun 2009 -2014**

No.	Jenjang Pendidikan	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<b>1</b>	<b>SD/MI</b>						
1.	Jumlah Guru	6.117	6.279	6.232	7.448	7.609	8.848
1.	Jumlah	4.122	4.118	4.113	4.112	5.821	5.817
1.	Rasio	1 : 1,48	1 : 1,52	1 : 1,52	1 : 1,81	1 : 1,31	1 : 1,52
1.	Jumlah	157.263	152.669	146.274	142.640	184.942	170.194
1. 5	Rasio Jumlah Murid Terhadap	1 : 38,15	1 : 37,07	1 : 23,47	1 : 34,69	1 : 24,31	1 : 26,94
1. 6	Rasio Guru/Kelas terhadap Jumlah	1:1,48:38,15	1:1,52:37,07	1:1,52:23,47	1:1,81:34,69	1:1,31:24,31	1:1,52:29,31
<b>2</b>	<b>SMP/MTs</b>						

No.	Jenjang Pendidikan	2009	2010	2011	2012	2013	2014
2.1	Jumlah	2.159	2.150	2.185	2.637	3.269	4.103
2.2	Jumlah	1.166	1.170	1.179	1.180	2.753	2.753
2.3	Rasio Guru/Kelas	1 : 1,85	1 : 2,14	1 ; 1,85	1 : 2,23	1 : 1,19	1 : 1,49
2.4	Jumlah	43.153	48.268	48.521	45.100	80.136	72.210
2.5	Rasio Jumlah Murid Terhadap Jumlah Kelas	1 : 37,09	1 : 41,25	1 : 41,15	1 : 38,22	1 : 29,11	1 : 26,22
2.6	Rasio Guru/Kelas terhadap Jumlah Murid	1:1,85:37,09	1:2,14:41,25	1;1,85:41,15	1:2,23:38,22	1:1,19:29,11	1:1,49:26,22
<b>3</b>	<b>SMA/MA/SMK</b>						
3.	Jumlah Guru	1.608	1.898	1.898	2.493	1.510	2.444
3.	Jumlah	279	280	281	281	214	319
3.3	Rasio Guru/Kelas	1 : 5,76	1 : 6,78	1 : 6,75	1 : 8,87	1 : 7,06	1 : 7,66
3.	Jumlah	29.963	27.863	34.698	35.109	45.968	42.265
3.5	Rasio Jumlah Murid	1 : 107,39	1 : 99,51	1 : 123,48	1 : 124,94	1 : 214,8	1 : 129,7
2.5	Rasio Guru/Kelas terhadap Jumlah Murid	1:5,76:107,39	1:6,78:99,51	1:6,75:123,48	1:8,87:124,94	1:7,06:214,8	1:7,66:132,49

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemudadan Olahraga Kabupaten Tegal Tahun 2014

#### e. Persentase Kondisi Ruang Kelas Baik

Ketersediaan ruang kelas yang baik merupakan salah satu indikator dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Tegal. Pada tahun 2014, ketersediaan jumlah ruang kelas baik untuk jenjang pendidikan SD/MI baru mencapai 91%. Jumlah ini meningkat bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (2009-2013). Demikian pula ketersediaan jumlah ruang kelas baik untuk jenjang pendidikan SMP/MTs dan SMA/MS/SMK mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai kondisi ruang kelas baik di Kabupaten Tegal per jenjang pendidikan selama kurun waktu tahun 2009-2014. Sebagaimana di lihat dalam Tabel 2.22 di bawah ini.

**Tabel 2.22.**  
**Kondisi Ruang Kelas Baik Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kabupaten Tegal Tahun 2009-2014**

No	Jenjang Pendidikan	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	SD/MI						

1.1.	Jumlah ruang kelas kondisi baik	3.165	3.364	3.563	4.875	5.108	5.334
1.2.	Jumlah seluruh ruang kelas	4.122	4.118	4.113	5.521	5.722	5.817
1.3.	Persentase	76 %	81 %	86 %	88 %	89 %	91%
<b>2</b>	<b>SMP/MTs</b>						
2.1.	Jumlah ruang kelas kondisi baik	892	901	920	937	2.252	2.251
2.2.	Jumlah seluruh ruang kelas	1.166	1.170	1.179	1.180	2.753	2.753
2.3.	Persentase	76,5 %	77 %	78,03 %	79,04 %	81 %	81%
<b>3.</b>	<b>SMA/MA/SMK</b>						
3.1	Jumlah ruang kelas kondisi baik	688	669	667	927	947	950
3.2	Jumlah seluruh ruang kelas	898	905	979	1.109	1.120	1.122
3.3	Persentase	76 %	73,9 %	68 %	83,49 %	84 %	84,67%

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemudadan Olahraga Kabupaten Tegal Tahun 2014

#### **f. Persentase Siswa Jenjang Pendidikan Usia Dini/TK**

Pendidikan anak usia dini (PAUD)/Taman Kanak-kanak (TK) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, non formal dan informal. Saat ini berbagai bidang ilmu pendidikan berkembang sangat pesat. Keadaan itu membuka wawasan baru dalam memahami dan mengubah cara mendidik anak. Di Kabupaten Tegal pelaksanaan PAUD/TK baru menjangkau sebagian kecil masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari persentase jumlah siswa TK/RA yang baru mencapai sebesar 28,80% pada tahun 2014. Jumlah ini menurun bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai kondisi capaian PAUD di Kabupaten Tegal selama kurun waktu 2009-2014. Sebagaimana dilihat dalam Tabel 2.23 di bawah ini.

**Tabel 2.23.**  
**Persentase Siswa Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Tegal Tahun 2009 - 2014**

No.	Uraian	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1.1.	Jumlah Siswa PAUD	12.857	12.064	18.071	22.403	47.765	49.401
1.2.	Jumlah Penduduk Usia 0-6 Tahun	148.877	172.223	181.421	183.769	185.111	172.851
1.3.	Persentase	8,64	7,00	9,96	12,19	25,80	28,80

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemudadan Olahraga Kabupaten Tegal Tahun 2014

#### **g. Angka Putus Sekolah**

Angka putus sekolah mencerminkan anak-anak usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau tidak menamatkan suatu jenjang

pendidikan tertentu. Hal ini sering digunakan sebagai salah satu indikator berhasil/ tidaknya pembangunan di bidang pendidikan. Data yang ada menunjukkan bahwa angka putus sekolah SD/MI di Kabupaten Tegal cukup rendah, tidak mencapai 1%. Angka putus sekolah pada tingkat SMP/MTs pada tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 0,88 dari tahun 2012. Penurunan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2011 ke 2012, yaitu pada tingkat SD/MI sebesar 0,91% dan tingkat SMP/MTs sebesar 1,09%, namun, angka putus sekolah pada tingkat SMA/MA/SMK mengalami peningkatan yang cukup signifikan pula pada tahun 2010 ke 2012, yaitu sebesar 1,22%. Peningkatan angka putus sekolah ini dapat disebabkan oleh tingginya biaya pendidikan pada tingkat SMA/MA/SMK sehingga sejumlah siswadi Kabupaten Tegal yang tidak mampu melanjutkan pendidikannya atau mengalami putus sekolah. Sebagaimana dilihat dalam Tabel 2.24 di bawah ini.

**Tabel 2.24.**  
**Jumlah Siswa Putus Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kabupaten Tegal Tahun 2009-2014**

No	Jenjang Pendidikan	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<b>1</b>	<b>SD/MI</b>						
1.1.	Jumlah Siswa Putus Sekolah	2.972	1.893	1.638	299	370	218
1.2.	Jumlah seluruh Siswa	157.263	152.669	146.274	142.640	184.942	156.729
1.3.	Angka Putus Sekolah (Persentase)	1,89	1,24	1,12	0,21	0,20	0,13
<b>2</b>	<b>SMP/MTs</b>						
2.1.	Jumlah Siswa Putus Sekolah	867	902	883	329	489	413
2.2.	Jumlah seluruh Siswa	43.153	48.268	48.521	45.100	80.136	68.978
2.3.	Angka Putus Sekolah (Persentase)	2,01	1,87	1,82	0,73	1,61	0,60
<b>3.</b>	<b>SMA/MA/SMK</b>						
3.1	Jumlah Siswa Putus Sekolah	266	217	288	248	230	129
3.2	Jumlah seluruh Siswa	29.963	27.863	34.698	35.109	45.968	41.386
3.3	Angka Putus Sekolah (Persentase)	0,89	0,78	0,83	0,70	0,50	0,03

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemudadan Olahraga Kabupaten Tegal Tahun 2014

#### **h. Angka Kelulusan Siswa**

Meningkatnya jumlah angka kelulusan siswa pada berbagai jenjang pendidikan setiap tahun ajaran, menjadi harapan semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Namun jika terjadi penurunan, hal tersebut perlu dicermati secara bijak dengan melihat korelasi dan

sinergitas di antara siswa, guru serta orang tua. Jumlah kelulusan siswa di Kabupaten Tegal per jenjang pendidikan pada tahun 2013, baik SD/MI, SMP/MTs. Maupun SMA/MA/SMK, seluruhnya mengalami peningkatan kelulusan. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pendidikan di Kabupaten Tegal sedikit demi sedikit mulai membaik. Peningkatan tersebut tentunya didukung dengan ketersediaan ruang kelas terhadap rombongan belajar, ketersediaan tenaga pendidik/ guru terhadap jumlah murid/ siswa, serta ketersediaan tenaga pendidik/guru. Berikut secara lengkap disajikan data mengenai kondisi angka kelulusan siswa di Kabupaten Tegal per jenjang pendidikan selama kurun waktu tahun 2009-2014. Sebagaimana dilihat dalam Tabel 2.25 di bawah ini.

**Tabel 2.25.**  
**Jumlah Kelulusan Siswa Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kabupaten Tegal Tahun 2009 - 2014**

No.	Jenjang Pendidikan	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<b>1</b>	<b>SD/MI</b>						
1.1.	Jumlah Siswa Lulus Sekolah	29.106	29.569	24.490	24.586	23.716	26.793
1.2.	Jumlah seluruh Siswa Kelas VI	29.569	30.230	24.493	24.589	23.718	26.798
1.3.	Angka Kelulusan Siswa (Persentase)	98,43 %	97,80 %	99,98 %	99,99 %	99,99 %	99,985
<b>2</b>	<b>SMP/MTs</b>						
2.1.	Jumlah Siswa Lulus Sekolah	19.471	20.161	21.341	20.619	20.650	21.342
2.2.	Jumlah seluruh Siswa Kelas III	20.161	21.341	22.664	20.777	20.696	21.347
2.3.	Angka Kelulusan Siswa (Persentase)	96,38 %	99,49 %	99,57 %	99,24 %	99,78 %	99,97%
<b>3.</b>	<b>SMA/MA/SMK</b>						
3.1	Jumlah Siswa Lulus Sekolah	9.959	10.041	10.984	11.529	9.353	12.615
3.2	Jumlah seluruh Siswa Kelas III	10.037	10.057	10.998	11.531	9.534	12.620
3.3	Angka Kelulusan Siswa (Persentase)	97,81 %	98,44 %	99,64 %	99,69 %	99,95 %	99,96%

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal Tahun 2014

#### **i. Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D4**

Kualitas pendidik salah satunya ditunjukkan melalui indikator kualifikasi S1/D4 pendidik. Selama kurun waktu tahun 2009-2014 persentase pendidik yang memiliki kualifikasi S1/D4 di berbagai jenjang pendidikan mengalami peningkatan sebagaimana terlihat dalam Tabel 2.26 di bawah ini.

**Tabel 2.26.**  
**Persentase Pendidik Berkualifikasi S1/D4 di Kabupaten Tegal**  
**Tahun 2009 - 2014**

Jenjang Pendidikan		Tahun					
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	SMA/MA/SMK	81,25	83,08	85,38	88,02	89,82	91,20
2	SMP/MTS	80,81	82,62	84,92	87,54	89,33	90,10
3	SD	62,59	64,00	65,78	67,81	69,20	70,13
4	PAUD	30,36	31,04	31,90	32,89	33,56	35,20

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemudadan Olahraga Kabupaten Tegal Tahun 2014

### 2.1.3.2 Kesehatan

#### a. Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) per Satuan Balita

Pemeliharaan kesehatan ibu dan anak-anak sejak usia dini merupakan suatu strategi dalam upaya pemenuhan pelayanan kesehatan dasar yang meliputi: peningkatan status kesehatan dan gizi yang baik, lingkungan yang sehat dan aman, pengembangan psikososial/emosi, kemampuan berbahasa dan pengembangan kemampuan kognitif (dayapikir dan daya cipta) serta perlindungan anak. Pengalaman empirik di beberapa tempat menunjukkan, bahwa strategi pelayanan kesehatan dasar masyarakat dengan fokus pada ibu dan anak seperti itu, dapat dilakukan pada Posyandu.

Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat, dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat, dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar, untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi. Jumlah Posyandu di Kabupaten Tegal pada tahun 2014 sebanyak 1.518 buah dan jumlah Balita sebanyak 110.223 jiwa. Dengan demikian rasio Posyandu terhadap Balita mencapai 1:72. Hal ini berarti bahwa dari 1 posyandu di Kabupaten Tegal melayani 72 balita. Berikut secara lengkap disajikan data mengenai kondisi rasio Posyandu di Kabupaten Tegal selama kurun waktu tahun 2009-2014. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai kondisi rasio Posyandu di Kabupaten Tegal selama kurunwaktu tahun 2009-2014. Sebagaimana dilihat dalam Tabel 2.27 di bawah ini.

**Tabel 2.27.**  
**Jumlah Posyandu dan Balita di Kabupaten Tegal**  
**Tahun 2009 -2014**

No	Uraian	2009	2010	2011	2012	2013	2014
----	--------	------	------	------	------	------	------

1.	Jumlah Posyandu	1.447	1.483	1.495	1.517	1.517	1.518
2.	Jumlah Balita	133.040	128.610	126.258	112.154	120.121	110.223
3.	Rasio	1 :91,94	1 : 86,72	1 : 84,45	1 : 73,93	1 : 79,18	1 : 72,61

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal Tahun 2014

**b. Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Puskesmas Pembantu (Pustu) Per Satuan Penduduk**

Puskesmas, Poliklinik dan Pustu merupakan salah satu sarana penunjang kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Semakin banyak jumlah ketersediannya, maka semakin memudahkan masyarakat dalam menjangkau pelayanan kesehatan. Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu terhadap jumlah penduduk di Kabupaten pada tahun 2014 mencapai 1 : 399. Ini artinya bahwa 1 Puskemas/Poliklinik/Pustu harus melayani jumlah penduduk sebanyak 399 jiwa. Adapun rasio Puskesmas terhadap jumlah kecamatan mencapai 2:1. Ini artinya bahwa dalam satu kecamatan terdapat 2 unit Puskesmas. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu terhadap jumlah penduduk di Kabupaten Tegal selama kurun waktu tahun 2009-2014. Sebagaimana dilihat dalam Tabel 2.28 berikut ini.

**Tabel 2.28.**  
**Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu di Kabupaten Tegal Tahun 2009 - 2014**

No	Uraian	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	Jumlah Puskesmas	29	29	29	29	29	29
2	Jumlah Puskesmas Keliling	27	29	30	30	30	30
3	Jumlah Poliklinik/PKD/Polindes	182	182	215	231	231	210
4	Jumlah Puskesmas Pembantu	64	64	64	64	64	64
	Jumlah 1s/d 4	302	304	338	354	354	333
5.	Jumlah Penduduk	1.420.760	1.394.839	1.400.256	1.421.001	1.415.009	
6	Rasio Puskesmas persatuan penduduk	1 : 48.909	1 : 48.090	1 : 48.280	1 : 49.000	1 : 48.793	
7	Rasio Poliklinik persatuan Penduduk	1 : 7.806	1 : 7.664	1 : 6.531	1 : 6.152	1 : 6.125	
8	Rasio Puskesmas Pembantu persatuan penduduk	1 : 22.199	1 : 21.794	1 : 21.879	1 : 22.203	1 : 22.109	
9	Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu	1 : 470	1 : 450	1 : 414	1 : 401	1 : 399	
9	Jumlah Kecamatan	18	18	18	18	18	18
10	Jumlah Desa/Kelurahan	287	287	287	287	287	287
11	Rasio Puskesmas per Kecamatan	2:1	2:1	2:1	2:1	2 : 1	2 : 1

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal Tahun 2014

### c. Pelayanan Rumah Sakit

Jumlah rumah sakit di Kabupaten Tegal pada tahun 2013 sebanyak 7 unit, terdiri dari rumah sakit daerah sebanyak 2 unit, rumah sakit swasta sebanyak 4 unit dan rumah sakit AD sebanyak 1 unit. Rasio pelayanan rumah sakit terhadap jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Tegal tahun 2014 mencapai 1 : 202.144. Hal ini berarti bahwa untuk 1 rumah sakit di Kabupaten Tegal melayani 202.144 penduduk. Pada Tahun 2014, rasio tempat tidur yang tersedia 7 Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta serta 10 Puskesmas Rawat di Kabupaten Tegal dapat dilihat dari total jumlah tempat tidur yang ada yaitu sebanyak 884 tempat tidur dibandingkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Tegal yang sebanyak 1.415.009 jiwa, jika berpedoman pada standar WHO dimana 1 tempat tidur untuk melayani 1000 penduduk, maka standar rasionya adalah 1400 tempat tidur atau masih ada kekurangan jumlah tempat tidur sebanyak 516 tempat tidur. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai rasio/ketersediaan rumah sakit di Kabupaten Tegal selama kurun waktu tahun 2009-2014, dapat dilihat pada Tabel 2.29 berikut.

**Tabel 2.29.**  
**Jumlah dan Rasio Rumah Sakit per Jumlah Penduduk**  
**Di Kabupaten Tegal Tahun 2009 -2014**

No.	Uraian	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Jumlah Rumah Sakit Daerah	1	1	2	2	2	2
2.	Jumlah Rumah Sakit Swasta	3	4	4	4	4	4
3.	Jumlah Rumah Sakit AD/AU/AL/POLRI	1	1	1	1	1	1
4.	Jumlah seluruh Rumah Sakit	5	6	7	7	7	7
5.	Jumlah Penduduk	1.420.760	1.394.839	1.400.256	1.409.406	1.415.009	N/A
6.	Rasio	1:284.152	1: 232.473	1 : 200.036	1 : 201.343	1 : 202.144	N/A

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal Tahun 2014

### d. Rasio Dokter per Satuan Penduduk

Indikator ini dapat menggambarkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan jumlah penduduk yang ada. Apabila dikaitkan dengan standar sistem pelayanan kesehatan terpadu, idealnya satu orang dokter melayani 2.500 penduduk. Jumlah dokter umum di Kabupaten Tegal pada tahun 2012 sebanyak 115 orang, adapun jumlah penduduk sebanyak 1.409.406 jiwa. Dari data tersebut dapat diketahui

rasio ketersediaan dokter terhadap 1.000 jumlah penduduk mencapai 0,102. Hal ini berarti bahwa dari 1.000 jiwa penduduk dapat dilayani oleh dokter sebanyak 0,102. Rasio dokter terhadap jumlah penduduk Kabupaten Tegal tahun 2012 adalah 1:12.356,53. Ini artinya 1 dokter melayani 12.356 jiwa penduduk. Jumlah ini lebih kecil bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2009 rasio dokter terhadap penduduk adalah 1:31.572,44; tahun 2010 sebesar 1:28.466,1 ; tahun 2011 rasio sebesar 1:12.846,4. Sedangkan pada tahun 2013 dengan jumlah penduduk yang bertambah dan jumlah dokter tetap rasionya sebesar 1:15.684,57 artinya 1 dokter melayani 15.684 jiwa penduduk, jumlah ini lebih besar dibandingkan dengan tahun 2012. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai rasio dokter per satuan penduduk di Kabupaten Tegal selama kurun waktu 2009-2013, dapat dilihat pada Tabel 2.30 di bawah ini.

**Tabel 2.30.**  
**Jumlah Dokter di Kabupaten Tegal**  
**Tahun 2009 -2013**

No	Uraian	2009	2010	2011	2012	2013
1.	JumlahDokter	45	49	109	115	115
2.	Jumlah Penduduk	1.420.760	1.394.839	1.400.256	1.409.406	1.415.009
3.	Rasio dokter per 1.000 penduduk	1 : 311,11	1 : 285,71	1 : 128,44	1 : 121,74	1 : 156,52
4.	Rasio dokter Terhadap penduduk	1: 31.572,44	1:28.466,1	1:12.846,4	1:12.356,53	1:15.684,57

Sumber : Dinas KesehatanKabupatenTegal Tahun 2014

**e. Persentase Ibu Bersalin yang Ditolong oleh Tenaga Kesehatan**

Komplikasi dan kematian ibu maternal serta bayi baru lahir sebagian besar terjadi pada saat proses persalinan. Persalinan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dapat meminimalisir jumlah komplikasi/kematian ibu dan bayi. Jumlah ibu bersalin pada tahun 2013 mencapai 31.266 orang. Dari jumlah tersebut yang mendapat pertolongan oleh tenaga kesehatan sebanyak 28.430 orang atau sekitar 90,96%. Angka ini lebih kecil bila dibandingkan dengan tahun 2011 dan 2012, namun lebih besar bila dibandingkan dengan tahun 2009. Pada tahun 2009, jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan mencapai 87,84 %. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai persalinan di Kabupaten Tegal yang ditolong oleh tenaga kesehatan selama kurun waktu tahun 2009-2014. Sebagaimana dilihat dalam Tabel 2.31 berikut ini.

**Tabel 2.31.**  
**Persentase Ibu Bersalin yang Ditolong oleh Tenaga Kesehatan**  
**Di Kabupaten Tegal Tahun 2009-2014**

NO	Uraian	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Jumlah Ibu Bersalin	24.888	26.410	27.935	27.399	28.430	26.797

	yang Ditolong oleh Tenaga Kesehatan						
2.	Jumlah Total Ibu Bersalin	28.332	28.940	29.530	29.555	31.266	28.591
3.	Persentase	87,84	91,26	92,77	92,71	90,96	93,73

Sumber : Dinas Kesehatan KabupatenTegal Tahun 2014

#### f. Jumlah Balita Gizi Baik

Peranan ibu sangat penting dalam mendukung upaya mengatasi masalah gizi, terutama pada asupan gizi keluarga, mulai dari penyiapan makanan, pemilihan bahan makanan, sampai menu makanan. Ibu yang memiliki status gizi baik akan melahirkan anak yang bergizi baik. Anak yang bergizi baik menjadi aset dan investasi bangsa masa depan.

Banyak upaya dilakukan untuk mengatasi masalah gizi di Kabupaten Tegal. Data menunjukkan prevalensi balita gizi buruk mengalami penurunan dari 1,44% pada tahun 2012 menjadi 0,92% pada tahun 2013. Jumlah balita gizi buruk tahun 2012 meningkat tajam dikarenakan sistem pelaporan yang lebih baik. Sementara itu balita gizi baik mengalami peningkatan, yaitu dari 98,56% pada tahun 2012 menjadi 99,08% pada tahun 2013, peningkatan tersebut dikarenakan kenaikan jumlah balita seluruhnya pada tahun 2013 menjadi 157.432. Berikut adalah gambaran secara lengkap kondisi balita gizi baik di Kabupaten Tegal selama kurun waktu 2009-2014. Sebagaimana dilihat dalam Tabel 2.32 di bawah.

**Tabel 2.32.**  
**Persentase Balita Gizi Baik di Kabupaten Tegal**  
**Tahun 2009-2014**

No.	Uraian	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Jumlah Balita Gizi Baik	132.996	128.112	126.203	110.532	155.991	108.900
2.	Jumlah Balita Gizi Buruk	44	48	55	1.622	1.441	175
3.	Jumlah Balita seluruhnya	133.040	128.160	126.258	112.154	157.432	110.223
4.	Persentase:						
	- Gizi Baik	99,97	99,97	99,96	98,56	99,08	98,80
	- Gizi Buruk	0,03	0,037	0,043	1,44	0,92	0,159

Sumber : Dinas Kesehatan KabupatenTegal Tahun 2014

#### 2.1.3.3 Kependudukan dan Catatan Sipil

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan kependudukan dan catatan sipil dapat dilihat dari capaian standar pelayanan minimal Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil. Indikator Standar Pelayanan Minimal inidapat menggambarkan tertib administrasi kependudukan. Salah satu bentuk tertib administrasi kependudukan dapat dilihat cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP). Cakupan penerbitan e-KTP ditargetkan 100% pada tahun 2015. Namun di Kabupaten Tegal sampai dengan tahun 2013 dari 1.299.859 jiwa

penduduk yang memiliki KTP, baru sebanyak 663.586 penduduk yang sudah melakukan perekaman KTP elektronik. Indikator SPM lainnya adalah cakupan penerbitan Kartu Keluarga (KK) yang telah ditetapkan target capaiannya sebesar 100% pada tahun 2015. Sementara itu, jumlah penerbitan KK di Kabupaten Tegal meningkat dari 30.697 pada tahun 2009 menjadi 87.467 pada tahun 2013. Untuk Indikator cakupan layanan penerbitan kutipan akta kelahiran di Kabupaten Tegal dari tahun ke tahun menunjukkan adanya peningkatan. Terdata pada tahun 2009 sebanyak 217.804 orang, dan pada tahun 2013 sebanyak 331.449 orang. Namun demikian, jika disandingkan dengan penduduk di Kabupaten Tegal yang jumlahnya sebanyak 1.415.009 jiwa, maka cakupan kepemilikan kutipan akta kelahiran masihlah sangat kecil. Cakupan penerbitan kutipan akta nikah, oleh Pemerintah telah ditetapkan target capaiannya sebesar 70% pada tahun 2020. Sementara itu, cakupan penerbitan kutipan nikah di Kabupaten Tegal dari tahun 2009 sampai dengan 2013 cukup besar, yaitu sejumlah 582.404 pada tahun 2009, kemudian bertambah menjadi 619.812 pada tahun 2010, dan mengalami peningkatan cukup besar menjadi 834.059 pada tahun 2011, kemudian tahun 2012 mengalami kenaikan menjadi 901.819 dan 902.055 pada tahun 2013. Dari jumlah penduduk yang telah memiliki KTP, KK, Akte Kelahiran dan Akte Nikah bila dilihat selama kurun waktu 5 tahun (tahun 2009-2014), jumlah penduduk yang telah memiliki KTP, KK, Akte Kelahiran dan Akte Nikah rata-rata mengalami peningkatan. Peningkatan ini menggambarkan bahwa telah meningkat pula kesadaran kependudukan. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai kepemilikan administrasi kependudukan selama kurun waktu tahun 2009-2014 sebagaimana Tabel 2.33 di bawah ini.

**Tabel 2.33**  
**Jumlah Kepemilikan KTP, KK, Akta Lahir, Akta Nikah di Kabupaten Tegal Tahun 2009 -2013**

No.	Uraian	2009	2010	2011	2012	2013
1.	KepemilikanKTP	749.687	812.715	1.092.011	1.021.213	1.299.859
2.	Kartu Keluarga	30.697	32.735	58.308	87.467	87.467
3.	AkteKelahiran	217.804	268.651	303.551	316.869	331.449
4.	Akte Nikah	582.404	619.812	834.059	901.819	902.055

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal Tahun 2014

#### **2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah**

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Suatu daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan

pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

#### 2.1.4.1 Kemampuan Ekonomi Daerah

##### a. Komposisi Pengeluaran Rata-rata Konsumsi Rumah Tangga dan Persentase Rumah Tangga menurut Golongan Pengeluaran PerKapita PerBulan

Komposisi pengeluaran penduduk dapat dijadikan sebagai salah satu ukuran tingkat kesejahteraan penduduk suatu wilayah. Semakin kecil persentase pengeluaran penduduk untuk konsumsi makanan merupakan indikasi tingkat kesejahteraan yang semakin baik. Pengeluaran untuk konsumsi makanan dan bukan makanan berkaitan erat dengan tingkat pendapatan masyarakat. Pengeluaran makanan dan bukan makanan selama ini menggunakan data hasil Susenas, dan digunakan sebagai salah satu komponen dalam penghitungan indeks PPP. Sebagaimana Tabel 2.34 dibawah ini.

**Tabel 2.34.**  
**Persentase Rumahtangga Kabupaten Tegal Menurut Golongan Pengeluaran Per Kapita Per bulan Tahun 2011 - 2013**

<b>Golongan Pengeluaran Per Kapita Per Bulan (Rp)</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
1. 60.000-79.999	-	-	-
2. 80.000-99.999	-	-	-
3. 100.000-149.999	1,62	1,47	1,63
4. 150.000-199.999	6,00	8,25	4,92
5. 200.000-299.999	27,82	23,41	27,29
6. ≥300.000	64,56	66,88	66,16

Sumber : BPS Kabupaten Tegal Tahun 2014

Pola pengeluaran rumah tangga Kabupaten Tegal per kapita per bulan menarik untuk dianalisa. Seperti tahun sebelumnya, tahun 2012 sebagian besar rumah tangga beradapadatingkatpengeluaran per kapita per bulan ≥Rp300.000,00 yaitu sebesar 66,88% kemudian disusul golongan pengeluaran Rp200.000,00–Rp299.999,00 yaitu sebesar 23,41%. Dari Tabel diatas dapat dilihat tidak ada rumah tangga pada dua golongan pengeluaran terkecil. Ini mengindikasikan tingkat kesejahteraan penduduk yang cukup baik. Selain itu juga dapat dilihat adanya pergeseran tingkat pengeluaran dari tahun sebelumnya yang menunjukkan bahwa semakin meningkatnya daya beli penduduk. Hal ini sejalan dengan kenaikan pendapatan perkapita penduduk pada tahun 2012.

Apabila dilihat dari sisi pengeluaran per kapita per bulan setiap rumah tangga di Kabupaten Tegal terjadi pergeseran pola pengeluaran. Pengeluaran makanan menunjukkan adanya penurunan sebaliknya pengeluaran untuk nonmakanan cenderung mengalami peningkatan. Struktur perekonomian dengan pola pengeluaran per kapita per bulan pada rumah tangga di

Kabupaten Tegal sudah menuju ke pola masyarakat yang lebih modern dengan ciri pengeluaran untuk non makanan cenderung lebih besar daripada pengeluaran untuk makanan. Dari Tabel di bawah dapat dilihat bahwa pengeluaran perkapita per bulan Kabupaten Tegal cenderung lebih besar untuk makanan yaitu 56,98% dan sisanya 43,02% pengeluaran untuk non makanan. Kondisi ini menggambarkan bahwa sebagian besar pengeluaran rumah tangga di Kabupaten Tegal masih digunakan untuk pemenuhan kebutuhan pangan. Sebagaimana Tabel 2.35 di bawah ini.

**Tabel 2.35.**  
**Persentase Jenis Pengeluaran Per Kapita per Bulan**  
**di Kabupaten Tegal Tahun 2011- 2013**

Jenis Pengeluaran	2011	2012	2013
1. Makanan	59,33	56,98	56,91
2. Non Makanan	40,67	43,02	43,09

Sumber: BPS Kabupaten Tegal Tahun 2014

#### **b. Nilai Tukar Petani (NTP)**

Dari luas wilayah Kabupaten Tegal yang mencapai 87,879 ha, sekitar 45,71% lebih merupakan lahan sawah. Kondisi ini didukung jumlah penduduk usia produktif yang mata pencahariannya bergantung pada sektor pertanian sebesar 25,58%. Pada tahun 2012 perekonomian Kabupaten Tegal didukung oleh sektor pertanian sebesar 13,63% (Atas Dasar Harga Berlaku/ADHB) atau 15,41% (Atas Dasar Harga Konstan/ADHK) dengan pertumbuhan sektor ini 9,23% (Atas Dasar Harga Berlaku/ADHB) dan 2,41% (Atas Dasar Harga Konstan/ADHK). Hasil-hasil yang telah dicapai pembangunan sektor pertanian di Kabupaten Tegal, khususnya yang berkaitan dengan kesejahteraan petaninya diketahui melalui Nilai Tular Petani (NTP). NTP merupakan hubungan antara hasil pertanian yang dijual petani dengan barang jasa lain yang dibeli petani. Dari tabel diatas dapat dilihat Indeks harga yang diterima petani mengalami kenaikan dari 137.23 pada tahun 2013 menjadi 167.18 pada tahun 2014, artinya harga di tingkat produsen atas hasil produksi petani untuk sektor pertanian mengalami kenaikan 21.83 persen. Indeks harga yang dibayar petani juga mengalami kenaikan dari 119.15 pada tahun 2013 menjadi 134.15 pada tahun 2014, artinya harga eceran barang dan jasa yang dibeli petani untuk memenuhi konsumsi rumah tangga maupun untuk biaya produksi dan penambahan barang modal mengalami kenaikan sebesar 12.59 persen. Secara umum Nilai Tukar Petani di Kabupaten Tegal mengalami kenaikan dari 115.17 pada tahun 2013 menjadi 124.62 pada tahun 2014 sebagaimana Tabel 2.36 di bawah ini.

**Tabel 2.36.**  
**Nilai Indeks Variabel NTP Gabungan Tahun 2010-2014**  
**Kabupaten Tegal (Tahun 2007 = 100)**

VARIABEL	2010	2011	2012	2013	2014
----------	------	------	------	------	------

1	Indeks Harga yang Diterima Petani	139,05	157,28	170,79	184,65	167,18
2	Indeks Harga yang Dibayar Petani	132,98	144,77	152,08	171,33	134,15
2.1	Konsumsi Rumah Tangga	137,88	151,11	158,37	178,50	137,19
2.2	Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (BPPBM)	116,97	122,76	130,91	147,37	127,51
3	Nilai Tukar Petani	104,56	108,64	112,30	107,78	124,62

Sumber : BPS Kabupaten Tegal, 2014

#### 2.1.4.2 Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan merupakan salah satu indikator penting aksesibilitas daerah yang digunakan untuk melihat ketersediaan sarana jalan terhadap jumlah kendaraan dalam rangka memberikan kemudahan/akses bagi seluruh masyarakat dalam melakukan segala aktivitas di semua lokasi dengan kondisi dan karakteristik fisik yang berbeda. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan perekonomian suatu daerah menyebabkan jumlah perjalanan/mobilisasi yang dilakukan setiap individu semakin meningkat. Oleh karenanya kebutuhan akan transportasi akan semakin tinggi. Meningkatnya kebutuhan transportasi harus disertai dengan pengembangan sarana/prasarana transportasi (kendaraan, jalan dan lingkungan). Rasio panjang jalan Kabupaten Tegal per jumlah kendaraan dapat dilihat pada Tabel 2.37 dibawah ini.

**Tabel 2.37.**  
**Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan**  
**Di Kabupaten Tegal Tahun 2009 - 2013**

No.	Uraian	2009	2010	2011	2012	2013
1.	Panjang Jalan (km)	886,82	886,82	886,82	886,82	886,82
2.	Jumlah Kendaraan (unit)	134.254	134.478	134.614	134.581	134.516
3.	Rasio	66,05	65,94	65,87	65,89	65,92

Sumber: BPS Kabupaten Tegal , 2013

#### 2.1.4.3 Sumber Daya Manusia

Tingkat ketergantungan penduduk atau Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong maju atau sedang berkembang. *Dependency ratio* merupakan salah satu indikator demografi yang menunjukkan jumlah kelompok usia non produktif (0-15 tahun dan di atas 65 tahun) yang ditanggung oleh kelompok usia produktif (diatas 15-65 tahun). Semakin tinggi persentase *dependency ratio* maka semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum

produktif dan tidak produktif lagi. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Tegal selama kurun waktu 2010-2014 sebagaimana Tabel 2.38 di bawah.

**Tabel 2.38.**  
**Rasio Ketergantungan di Kabupaten Tegal**  
**Tahun 2010-2014**

No.	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Penduduk Produktif	905.575	908.975	933.282	974.966	938.298
2.	Penduduk Non	489.264	482.335	507.101	440.043	481.834
3.	Rasio Ketergantungan	54.02	53.06	54.33	45,13	51,35

Sumber BPS Kabupaten Tegal Tahun 2014

## **2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD**

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD dan Realisasi RPJMD tahun 2014 meliputi Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2015, dan Pencapaian Indikator Kinerja RPJMD Tahun 2014-2019.

### **2.2.1 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun 2015**

#### **a. Urusan Wajib**

Alokasi anggaran yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan yang dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2015 oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Tegal dapat dilihat pada tabel 2.39 berikut :

**Tabel 2.39.**  
**Rekapitulasi Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Wajib SKPD**  
**Tahun 2015 sampai dengan Tri wulan I (Urusan dan Non Urusan)**

No	SKPD	Anggaran (Rp)	Realisasi s.d TW I (Rp)	%
1	DIKPORA	86.442.311.000	492.183.260	0.08
2	DINKES	90.196.288.000	1.406.710.506	1.140
3	RSUD Dr. SOESELO	132.373.084.000	8.155.089.610	1.810
4	RSUD SURADADI	8.733.900.000	1.355.979.561	0.178
5	DPU	257.018.265.000	1.225.915.230	1.740
6	BAPPEDA	6.379.000.000	502.397.434	0.102
7	DISHUBKOMINFO	9.858.782.000	242.540.808	0.143
8	BLH	3.844.923.000	413.383.935	0.071
9	DISDUKCAPIL	3.332.660.000	231.363.123	0.090
10	DINSOSNAKERTRANS	10.519.000.000	949.617.813	0.197
11	DINKOP, UKM DAN PASAR	24.692.782.000	300.166.312	0.179
12	KANTOR PENANAMAN MODAL	1.500.000.000	147.031.617	0.019
13	KESBANGPOLINMAS	1.590.000.000	121.747.295	0.020
14	SATPOL PP	3.836.280.000	416.426.112	0.059
15	SETDA	7.631.856.620	1.800.925.079	
16	SET DPRD	12.581.945.000	1.346.392.738	0.176
17	DPPKAD	31.065.968.000	8.180.188.697	1.111
18	BKD	6.543.016.000	961.699.189	0.162
19	INSPEKTORAT	1.982.335.000	348.171.320	0.060
20	BPPT	1.400.000.000	134.956.201	0.102
21	KECAMATAN ADIWERNA	497.000.000	62.060.954	0.008

22	KECAMATAN BALAPULANG	403.720.000	58.843.203	0.008
23	KECAMATAN BOJONG	480.000.000	48.566.000	0.010
24	KECAMATAN BUMIJAWA	470.400.000	-	-
25	KECAMATAN DUKUHTURI	1.953.800.000	101.135.768	0,033
26	KECAMATAN DUKUHWARU	521.000.000	90.505.062	0.012
27	KECAMATAN JATINEGARA	492.000.000	-	-
28	KECAMATAN KEDUNGBANTENG	409.350.000	65.451.888	0.008
29	KECAMATAN KRAMAT	390.720.000	71.992.200	0.009
30	KECAMATAN LEBAKSIU	453.700.000	80.189.497	0.010
31	KECAMATAN MARGASARI	1.952.390.000	58.475.559	0.009
32	KECAMATAN PANGKAH	526.500.000	93.763.073	0.012
33	KECAMATAN PAGERBARANG	388.166.000	25.659.666	0.003
34	KECAMATAN SLAWI	530.700.000	57.843.912	0.008
35	KECAMATAN SURADADI	475.100.000	-	-
36	KECAMATAN TALANG	471.500.000	-	-
37	KECAMATAN TARUB	489.100.000	57.679.099	0.008
38	KECAMATAN WARUREJA	588.500.000	73.873.964	0.010
39	KELURAHAN DAMPYAK	650.000.000	10.145.000	0.001
40	KELURAHAN KAGOK	850.000.000	28.487.064	0.004
41	KELURAHAN KUDAILE	650.000.000	13.530.304	0.002
42	KELURAHAN PAKEMBARAN	650.000.000	28.993.197	0.007
43	KELURAHAN PROCOT	650.200.000	12.400.488	0.002
44	KELURAHAN SLAWI WETAN	650.000.000	22.576.739	0.003
45	BPBD	2.090.000.000	-	-
46	BAPERMADES	7.826.500.000	332.842.084	0.148
47	KANTOR PERPUSARDA	976.400.000	102.392.848	0.026

Sumber : Bappeda Kabupaten Tegal, 2015

Pemerintah Kabupaten Tegal pada tahun Anggaran 2015 telah menganggarkan program dan kegiatan pada urusan wajib dengan target anggaran sebesar Rp.2.053.949.022.000,00 dan realisasi anggaran sampai dengan Tri Wulan I tahun 2015 sebesar Rp.30.230.293.409,00

#### b. Urusan Pilihan

Rincian realisasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan pilihan setiap satuan perangkat daerah pada Kabupaten Tegal dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Adapun rekapitulasi realisasi pelaksanaan program dan kegiatannya dapat dilihat pada tabel 2.40. dibawah ini:

**Tabel 2.40.**

**Rekapitulasi Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Pilihan SKPD Tahun 2015 Sampai Dengan Tri wulan I (Urusan dan Non Urusan)**

No	SKPD	Anggaran (Rp)	Realisasi s.d TW I (Rp)	%
1	DISTANBUNHUT	7.825.557.000	305.424.742	0.091
2	BP4K	3.442.311.000	963.250.740	0.125

3	DINAS KPP	6.824.805.000	186.118.974	0.065
4	DISPARBUD	5.924.300.000	505.311.661	0.125
5	DISPERINDAG	4.370.000.000	442.637.722	0.091
6				

Sumber : Bappeda Kabupaten Tegal 2015

Pemerintah Kabupaten Tegal pada tahun Anggaran 2015 telah menganggarkan program dan kegiatan pada urusan pilihan dengan target anggaran sebesar Rp.76.523.733.000,00 dan realisasi anggaran sampai dengan Tri wulan I sebesar Rp.2.402.743.839,00

### 2.2.2 Evaluasi Pencapaian Indikator Kinerja RPJMD Tahun 2014-2019

Evaluasi indikator makro mencakup realisasi dari target pencapaian yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2014-2019 untuk tahun pelaksanaan tahun 2015 sampai dengan Tri Wulan I yang belum dapat terevaluasi dengan uraian sebagai berikut.

MISI	Indikator	Target Capaian 2015	Realisasi Capaian s.d TW I
1. Mewujudkan birokrasi yang bersih dan responsif terhadap pemenuhan hak dasar rakyat melalui reformasi birokrasi	a) Jumlah kasus KKN	0	0
	b) Jumlah Program Kerja Pengawasan Tahunan	120	0
	c) Persentase tindak lanjut hasil temuan pengawasan	89	0
	d) Jumlah kasus kepegawaian	48	0
	e) Jumlah PNS yang mendapat hukuman disiplin	22	0
	f) Persentase rata-rata tingkat kehadiran PNS dalam 1 (satu) tahun	99,4	0
	g) Jumlah pejabat struktural yang dinilai kompetensinya ( <i>skill, knowledge, attituted</i> )	6	0
	h) Persentase pengaduan masyarakat tentang layanan publik yang ditindaklanjuti	25	0
	i) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik	75,25	0
	j) Jumlah SIM	11	0
	k) Persentase SIM yang berfungsi	100	0
	l) Opini BPK terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	WDP	-
	a) Persentase penduduk memiliki:	98,00	0
	- KTP	40	0
	- Kartu Keluarga	10	0
	- Akta Kematian	40	0
	- Akta Kelahiran (0-18 tahun)	67	0
	b) APK PAUD/TK (4-6 tahun)	65	0
	c) APK PAUD/TK (0-4 tahun)	111	0
	d) APK SD/SDLB/MI/Paket A	96,28	0
	e) APK SMP/SMPLB/MTs/Paket B	61,85	0
	f) APK SMA/SMALB/MA/Paket C	60,02	0
	g) APM PAUD TK	97,93	0
h) APM SD/SDLB/MI/Paket A	90,74	0	
i) APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B	56,04	0	
	99,79	0	

	j) APM SMA/SMALB/MA/Paket C	74,00	0
	k) AT SD ke SMP sederajat	91,64	0
	l) AT SMP ke SMA sederajat	99,99	0
	m) AMH	99,99	0
	n) Angka lulusan SD/MI	99,99	0
	o) Angka Lulusan SMP/ MTs	69,48	0
	p) Angka Lulusan SMA/MA/SMK	38	0
	q) Angka Harapan Hidup	8,40	0
	r) Jumlah kematian ibu	9,1	0
	s) AKB	48,28	0
	t) AKABA	58,62	0
	u) Persentase Puskesmas Terakreditasi	100	0
	v) Persentase Puskesmas Rawat Inap mampu PONED	Kelas B 20%	- 0
	w) Persentase PPK BLUD Puskesmas	Madya	-
	x) Klasifikasi RSUD dr. Soeselo	4,3	0
	y) ISO RSUD dr. Soeselo	11,3	0
	z) Akreditasi RSUD dr. Soeselo	9,3	0
	aa) Persentase penyandang cacat (difabel) yang direhabilitasi	9,2	0
	bb) Persentase pengguna narkoba yang direhabilitasi	4,3	0
	cc) Persentase lansia terlantar yang dibina	27	0
	dd) Persentase jumlah anak yang terlantar, anak nakal, anak jalanan dan anak yang menjadi korban kekerasan direhabilitasi	6,3 62,72 60,16	0 0 0
	ee) Persentase pengidap HIV/AIDS yang direhabilitasi	100	0
	ff) Persentase PMKS ditangani		
	gg) Persentase eks WTS yang diberdayakan		
	hh) Indeks Pembangunan Gender		
	ii) Indeks Pemberdayaan Gender		
	Persentase korban bencana alam ditangani		
<b>2. Mewujudkan Kesejahteraan rakyat Melalui Pembangunan Ekonomi Kerakyatan Yang difokuskan Pada Sektor Perdagangan, Industri dan Pertanian.</b>	a) Jumlah kelompok petani organik	1	0
	b) Jumlah jenis komoditas pertanian organik (1) yang didelegasikan (2) Yang bersertifikat	5 ha 1 jenis	0 0
	c) Jumlah produsen pertanian organik	5	0
	d) Jumlah luas lahan pertanian organik	5 ha	0
	e) Kajian produk unggulan dan <i>origin-destination</i> produk pertanian	1	0
	f) Jumlah STA	1	0
	g) Jumlah pasar induk	1	0
	h) Jumlah PPI (Pusat Pendaratan Ikan)	2	0
	i) Jumlah pasar hewan	3	0
	j) Panjang jalan usaha tani (dan nelayan) yang ditingkatkan	8,5 km 11,5 km	0 0
	k) Panjang saluran irigasi tersier yang ditingkatkan	3.250 m 14.784 ha	0 0
	l) Panjang saluran irigasi utama yang ditingkatkan	30	0
	m) Jumlah/cakupan air irigasi yang tersedia	470	0
	n) Jumlah embung lapangan berfungsi baik	240	0
	o) Jumlah Kelompok Tani, Nelayan, Peternak: (1) Madya (2) Utama	28 120 10	0 0 0
	p) Jumlah penyuluh yang lulus sertifikasi	1	0
	q) Jumlah penyuluh swadaya	100% dari	0
	r) Jumlah kantor BPPP yang memenuhi persyaratan.	perda 0,05	0 0
	s) Perda lahan pertanian pangan berkelanjutan	2	0
	t) Persentase luas lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dipertahankan	2	0
	u) Persentase maksimal laju alih fungsi lahan pertanian	1 3	0 0

v) Jumlah demplot	2	0
w) Jumlah rekayasa TTG	3	0
x) Jumlah pemanfaatan hasil penelitian	302	0
y) Jumlah klaster pertanian		
z) Jumlah <i>telecenter</i> bidang pertanian	6	0
aa) Jumlah <i>website</i> terkait pertanian	300	0
bb) Jumlah kerjasama pengusaha besar dan petani	2 28 km	0 0
cc) Jumlah Kelompok (KPK, KWT, LMDH) industri pengolahan hasil pertanian	3	0
a) Jumlah pasar kabupaten dan desa yang direvitalisasi	5 2	0 0
b) Jumlah pelaku usaha perdagangan baru	11	0
c) Persentase kenaikan retribusi pasar	1	0
d) Panjang jalan pendukung perdagangan lokal yang terpelihara	Sesuai	-
e) Jumlah sistem informasi pasar ( <i>telecenter</i> dsb)		
f) Jumlah pasar yang berjejaring	52	0
g) Jumlah dokumen kajian penataan PKL		
h) Kawasan yang tertata PKL-nya	26	0
i) Jumlah produk hukum daerah tentang jaringan toko ritel modern	3 3	0 0
j) Tingkat kesesuaian penambahan jaringan toko ritel modern dengan aturan yang berlaku	250	0
k) Jumlah pelaku UMKM yang menerima bantuan permodalan	75 1	0 0
l) Jumlah jenis usaha/kelompok usaha	60	0
m) Jumlah lembaga yang menyalurkan bantuan permodalan	3 5 120	0 0 0
n) Jumlah kegiatan perlindungan konsumen	24	0
o) Jumlah produsen /pedagang yang menerima sertifikat sehat	1 3 TTG	0 0
p) Persentase pengaduan konsumen yang masuk dan tertangani		
a) Jumlah <i>roadmap</i> pengembangan industri unggulan	2	0
b) Jumlah pelaku industri kreatif	1	0
c) Jumlah jenis industri kreatif		
d) Jumlah pelatihan kewirausahaan industri kreatif pemuda	persiapan lokasi 12	0
e) Jumlah IKM yang mengikuti pelatihan		0
f) Jumlah IKM yang menerapkan manajemen Industri	9 4	0
g) Jumlah kearifan lokal yang diadaptasi		0
h) Jumlah TTG yang diterapkan melalui LIK (industri) dan Balai Penyuluhan Pertanian Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan (pertanian)	2 1	0
i) Jumlah kerjasama tentang pengembangan ekonomi lokal unggulan	1 1	0
j) Pnetapan lokasi lokasi kawasan industri terpadu ( <i>boned zone</i> )	9	0
k) Promosi lokasi kawasan industri terpadu ( <i>boned zone</i> ) pada invenstor	1 1	0
l) Jumlah klaster industri dan pertanian aktif	3 km	0
m) Jumlah kerjasama pengembangan klaster industri dan pertanian	9 1	0
n) Jumlah klaster wisata aktif (Cacaban, Purin, Guci, Semedo)	Sesuai SPM	-
o) Jumlah peraturan tentang sistem insentif ekonomi lokal unggulan	2 1	0
p) Jumlah <i>telecenter</i> yang dipelihara	1	0
q) Jumlah <i>telecenter</i> baru		
r) Jumlah produk lokal yang tersertifikasi dan		0

	terstandarisasi	18	0
	s) Jumlah kebijakan penggunaan produk lokal dalam kegiatan Pemerintah Daerah	14	0
	a) Daftar wilayah tertinggal	20	0
	b) Panjang jalan yang ditingkatkan di wilayah tertinggal	30	0
	c) Jumlah pasar desa yang diperbaiki	2 kali	0
	d) Jumlah pasar kota yang diperbaiki	3 kali	0
	e) Jumlah kota satelit	3	0
	f) Kualitas layanan di kota satelit (SMA/K: akreditasi A; pasar: bersih dan aman; puskesmas: ISO terkait pelayanan)	4	0
	g) Jumlah <i>telecenter</i> aktif di wilayah tertinggal	4	0
	h) Jumlah pelatihan pengembangan wilayah tertinggal	1	0
	i) Terbentuknya lembaga kemasyarakatan yang aktif memberikan masukan dalam pengembangan wilayah tertinggal	80	0
	j) Jumlah kajian RDTR	1	0
	k) Jumlah Perda RDTR	6	0
	l) Persentase pembangunan Jalingkos sisi barat	30	0
	m) Persentase pembangunan Terminal Dukuhsalam		
	n) Frekuensi diseminasi Rencana Tata Ruang (termasuk sistem informasi) per tahun		
	o) Frekuensi pemantauan lapangan per tahun		
	p) Jumlah pelanggaran rencana tata ruang yang diproses per tahun		
	q) Jumlah ruang terbuka publik		
	r) Jumlah taman kota		
	s) Jumlah tempat berkumpul masyarakat		
	t) Portal pengaduan masalah pembangunan daerah		
	u) Persentase usaha penambangan yang dipantau		
	v) Jumlah kawasan industri B3 yang terkontrol		
	w) Persentase pemantauan dokumen pengelolaan lingkungan (UKL-UPL)		
	x) Persentase perusahaan pertambangan yang melakukan pemulihan lingkungan hidup		
<b>3. Mewujudkan kehidupan paseduluran dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan budaya</b>	a) Jumlah petatar (guru) nilai-nilai agama dan kepercayaan budaya rukun dan toleran	7.929	0
	b) Jumlah lembaga pewarisan nilai-nilai agama dan kepercayaan	1.381	0
	c) Jumlah media publikasi kerukunan umat beragama	1	0
	d) Frekuensi dialog antarumat beragama	1	0
	e) Jumlah kerjasama antarumat beragama	1	0
	f) Jumlah dialog wawasan kebangsaan		
	g) Rasio tempat ibadah agama dan kepercayaan dengan jumlah penduduk:	1:450	0
	(1) Masjid/Mushola	1:185	0
	(2) Gereja	1:337	0
	(3) Pura	1:300	0
	(4) Vihara	1:294	0
	(5) Klenteng	1:100/7H	0
	(6) Sanggar Himpunan Penghayat Kepercayaan (HPK)	PK	
<b>4. Mengembangkan seni budaya dan pengetahuan tradisional</b>	a) Jumlah <i>data base</i> seni budaya dinamis	1	0
	b) Infrastruktur seni yang dibangun/difasilitasi	10	0
	c) Jumlah pentas seni budaya yang diinisiasi pemda	36	0
	d) Jumlah promosi seni budaya lokal di tingkat kabupaten/provinsi dan nasional	3	0
	e) Jumlah kerjasama pemda di bidang kesenian	1	0
	f) Jumlah seni budaya yang mendapat HKI	1	0
		350	0

	g) Jumlah kelompok kesenian	2	0
	h) Jumlah destinasi wisata dengan menu pentas seni dan budaya	1	0
	i) Jumlah pendataan pengetahuan tradisional	1	0
	j) Jumlah saintifikasi pengetahuan tradisional	5	0
	k) Jumlah promosi pengetahuan tradisional	23	0
	l) Jumlah pengetahuan tradisional yang diterapkan	1	0
	m) Jumlah Pusat Pengobatan Tradisional aktif	2	0
	n) Jumlah kelompok petani pemasok bahan baku	25	0
	o) Rata-rata pengunjung Pusat Pengobatan Tradisional/hari		
<b>5. Memperkuat kelembagaan desa untuk pemberdayaan masyarakat :</b>	a) Jumlah BPD yang menginisiasi Perdes	20	0
	b) Jumlah PKK desa/kelurahan yang melaksanakan 10 Program Pokok PKK	99	0
	c) Strata Posyandu (Jumlah Posyandu 1.517):		
	(1) Pratama	33	0
	(2) Madya	303	0
	(3) Purna	852	0
	(4) Mandiri	329	0
	d) Jumlah Pos Kesehatan Desa yang memenuhi SPM (Misal: Peralatan, Bidan)	287	0
	e) Jumlah Badan Keswadayaan Masyarakat PNPM Mandiri Perkotaan (Jumlah BKM: 116):		
	(1) Mandiri	24	0
	(2) Berdaya	87	0
	(3) Madani	5	0
	f) Jumlah Unit Pengelola Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan (13 UPK):		
	(1) UPK surplus	11	0
	(2) UPK belum surplus	2	0
	g) Peringkat desa Kab. Tegal dalam lomba desa Tingkat Prov. Jateng	Harp.3	0
	h) Jumlah KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa) yang terlatih	111	0
	i) Jumlah RTLH yang terpugar berdasar PPLS 2011 (27.013 RTLH kategori: lantai tanah/bambu, dinding kayu/bambu, tidak ada tempat BAB. Total PPLS: 116.073 RT)	3.359	0
	j) Jumlah kelompok keluarga mitra dalam P2MBG	12	0
	k) Tipologi Desa	75	0
	(1) Swadaya	95	0
	(2) Swakarya	113	0
	(3) Swasembada	12	0
l) Terbangunnya jalan tembus desa/poros desa oleh TNI-Masyarakat			
m) Jumlah desa yang mengisi data Profil Desa dan Data Dasar Keluarga (DDK)	33	0	
(1) Data terisi 0-50%	224	0	
(2) Data terisi 51-80%	30	0	
(3) Data terisi 81-100%	1,5	0	
n) Rasio sarana pendidikan di desa	3	0	
(1) PAUD	0,7	0	
(2) SD/MI	1:77	0	
(3) MDA	83,88	0	
o) Rasio Posyandu per Balita	4.640	0	
p) Rasio Akseptor KB	1	0	
q) Jumlah pengunjung perpustakaan keliling	3	0	
r) Jumlah mobil layanan perpustakaan keliling	60	0	
s) Jumlah lokasi layanan perpustakaan silang terpadu			

### 2.3 Permasalahan Pembangunan dan Isu Strategis Tahun 2015

Permasalahan pembangunan daerah tahun 2015 dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2014-2019, adalah merupakan perkiraan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi

#### 2.3.1 Permasalahan Pembangunan Kabupaten Tegal

Permasalahan Pembangunan Kabupaten Tegal tahun 2015 diidentifikasi berdasarkan interaksi dan dinamika perkembangan berbagai sektor yang terjadi, baik pada skala lokal, regional maupun global. Permasalahan pembangunan daerah yang ada di Kabupaten Tegal, adalah sebagai berikut :

##### a. Kemiskinan

Permasalahan besar bagi semua daerah adalah menurunkan angka kemiskinan. Jumlah *penduduk miskin* di Kabupaten Tegal dalam kurun waktu 4 tahun terakhir (2009-2013) menunjukkan tren positif atau dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan. Meskipun demikian tantangan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin masih menjadi salah satu prioritas kebijakan pembangunan di Kabupaten Tegal.

##### b. Pengangguran

Penduduk di Kabupaten Tegal didominasi oleh penduduk usia produktif yaitu 15-64 tahun. Banyak masyarakat Kabupaten Tegal yang merantau di daerah lain untuk bekerja. Kondisi ini harus dapat dimanfaatkan secara optimal, karena jika tidak dapat dimanfaatkan justru akan menjadi beban. Penduduk usia produktif 15-64 tahun, menyediakan jumlah tenaga kerja potensial yang relatif murah, tetapi pemanfaatan yang kurang baik justru akan menambah jumlah pengangguran. Terkait dengan tingkat pengangguran terbuka, dari kurun waktu Tahun 2009-2013 cenderung mengalami penurunan dan dengan angka tertinggi yaitu pada tahun 2009 pada angka 7,30% dan terendah pada tahun 2013 yaitu pada angka 4,36%. Penanganan masalah pengangguran menjadi prioritas dalam program pembangunan di Kabupaten Tegal.

##### c. Kualitas Pelayanan Publik

###### 1) Pelayanan Administrasi Kependudukan

Pelayanan administrasi kependudukan merupakan hak dasar masyarakat yang harus dipenuhi, karena menyangkut hajat hidup seluruh warga negara mulai lahir hingga menemui ajalnya. Mengingat strategisnya urusan administrasi kependudukan, maka Pemerintah Kabupaten Tegal

diharapkan mampu menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan secara berkualitas.

## **2) Pelayanan Kesehatan Dasar**

Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar melalui dukungan dana dan fasilitas/ sarana dan prasarana kesehatan serta dukungan sumberdaya manusia bidang kesehatan yang belum memadai, baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya.

## **3) Pelayanan Dasar Pendidikan**

Sederet permasalahan pelayanan pendidikan dasar disebabkan beberapa hal, antara lain: belum optimalnya penyelenggaraan manajemen pendidikan dasar, terbatasnya jumlah dan kapasitas tenaga kependidikan, kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan masih perlu ditingkatkan, utamanya dari keluarga kurang mampu, serta kondisi sekolah yang kurang representative sehingga menjadi permasalahan prioritas pembangunan Kabupaten Tegal.

### **d. Infrastruktur Jalan**

Kinerja jaringan jalan berdasarkan kondisi, dapat dikategorikan dengan jalan kondisi baik, sedang, rusak sedang, rusak dan rusak berat. Kondisi kualitas infrastruktur jalan di Kabupaten Tegal yang masih perlu peningkatan lebih dikarenakan keterbatasan sumberdaya finansial dan sumberdaya manusia untuk bisa melakukan pemeliharaan berkala yang tidak sebanding dengan panjangnya infrastruktur jalan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Tegal.

### **e. Pengelolaan Kepegawaian**

Kinerja sebuah instansi atau unit kerja seringkali berujung pada permasalahan sumber daya manusia. Alasan yang dikemukakan oleh SKPD seringkali akibat permasalahan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang ada. Pembinaan kepegawaian membutuhkan beberapa instrumen antara lain: pemetaan kompetensi pegawai, seleksi terbuka penempatan jabatan, penataan pegawai sesuai dengan kompetensinya, dan tersusunnya data profil pegawai secara baik serta penerapan sistem *reward and punishment*. Untuk itu penataan sistem manajemen sumberdaya manusia perlu menjadi perhatian dengan baik.

### **f. Kondisi Pasar Tradisional**

Di Kabupaten Tegal terdapat 27 Pasar yang tersebar di seluruh Kabupaten Tegal. Namun demikian persebaran pasar sampai dengan saat ini belum merata, masih ada 3 (tiga) kecamatan yang di wilayahnya tidak terdapat pasar yaitu Kecamatan Pagerbarang, Dukuhwaru dan Tarub. Sebanyak 27 pasar tersebut dikelola oleh 6 UPTD Pasar. Adapun kondisinya sebanyak 26 pasar tidak representatif dan hanya 1 Pasar yang representatif yaitu Pasar Trayeman di Kecamatan Slawi. Kondisi pasar tradisional yang tidak representatif dikarenakan keterbatasan sumber dana untuk rehabilitasi pasar dan manajemen pasar yang belum optimal perlu menjadi prioritas utama bagi Pemerintah Kabupaten Tegal untuk mewujudkan

pembangunan Pasar Tradisional yang layak sehingga mampu bersaing dengan pasar modern (ritel), dan tetap diminati masyarakat.

**g. Alih Fungsi Lahan Pertanian.**

Luasan sawah terus mengalami penurunan, sedangkan luasan permukiman mengalami kenaikan. Hal ini perlu menjadi perhatian, mengingat tren yang terjadi adalah maraknya konversi dari lahan pertanian subur beririgasi teknis menjadi lahan permukiman. Jika hal ini terjadi pada daerah hulu dan menutup saluran irigasi, maka sawah pada daerah hilir akan otomatis mati. Dengan adanya kebijakan lahan sawah berkelanjutan dan prioritas untuk menguatkan ketahanan pangan, isu konversi lahan ini sepatutnya menjadi hal yang diprioritaskan penanganannya. Alih fungsi lahan pertanian tersebut terjadi, karena lemahnya fungsi pengendalian dan penegakan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2012-2032. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Tegal belum memiliki kebijakan lahan sawah berkelanjutan yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah dalam mempertahankan lahan sawah berkelanjutan, guna penguatan ketahanan pangan.

**2.3.2 Isu-isu Strategis**

Isu Strategis adalah keadaan atau kondisi yang harus mendapatkan perhatian atau prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah karena mempunyai dampak yang signifikan bagi daerah. Isu strategis mempunyai karakteristik antara lain penting, mendasar, mendesak, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Isu-isu strategis pembangunan di Kabupaten Tegal dirumuskan berdasarkan permasalahan-permasalahan pembangunan daerah, tantangan dan potensi pembangunan daerah kedepan, yang meliputi aspek fisik-lingkungan, sosial-budaya, ekonomi-keuangan dan legal-kelembagaan. Isu-isu strategis Kabupaten Tegal tahun 2016 tidak terlepas dari isu-isu Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal 2014-2019 sebagai berikut :

**a. Peningkatan Kualitas Pendidikan**

Pembangunan sektor pendidikan mempunyai peran penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal ini, dilakukan melalui peningkatan kelembagaan sumber daya manusia dan tata laksana yang meliputi penyediaan prasarana dan sarana, peningkatan kualitas tenaga pendidik, pengelolaan sistem pendidikan yang berkualitas dan pembiayaan pendidikan. Pelaksanaan Wajar Dikdas belum tuntas karena masih tingginya angka putus sekolah tingkat SD dan SMP, terutama di wilayah perdesaan dan perkotaan khususnya wilayah industri, distribusi guru belum merata, pengelolaan pendidikan non formal dan informal belum maksimal untuk menampung angka putus sekolah.

**b. Pembangunan Kesehatan Masyarakat**

Pembangunan kesehatan masyarakat perlu difokuskan pada peningkatan akses terhadap layanan kesehatan bagi masyarakat. Peningkatan atas apa yang akan dicapai itu akan diformulasikan dalam bentuk kebijakan yang bermuara pada perbaikan gizi masyarakat melalui penumbuhan prakarsa masyarakat, layanan kesehatan keliling, dan program kesehatan ibu dan anak serta meningkatkan kampanye budaya hidup bersih dengan semakin memaksimalkan layanan kesehatan keliling dengan orientasi preventif di seluruh wilayah Kabupaten Tegal.

**c. Peningkatan Kualitas Permukiman dan Lingkungan Perumahan**

Beberapa permasalahan dan potensi terkait permukiman dan lingkungan perumahan antara lain masih banyaknya lingkungan pemukiman yang kurang sehat; masih banyaknya pemukiman yang tidak layak huni dan kumuh; perlu perhatian terhadap sanitasi dan drainase di lingkungan pemukiman; dan kurangnya area hijau sebagai resapan air di lingkungan pemukiman khususnya di perkotaan.

**d. Penguatan Sarana Prasarana dan Infrastruktur Wilayah**

Beberapa masalah dan potensi terkait sarana prasarana dan infrastruktur wilayah antara lain masih kurang memadainya infrastruktur yang mendukung pertanian (khususnya pertanian wilayah utara Kabupaten Tegal), perlu perhatian terhadap irigasi tersier yang menjadi kewenangan dari P3A. Isu yang lain adalah masih tingginya kerusakan jaringan jalan kabupaten antar wilayah kecamatan. Kondisi jalan rusak, baik kategori sedang maupun berat di Kabupaten Tegal pada Tahun 2013 lebih dari setengah dari jalan yang ada atau tepatnya 56,96% dari seluruh jalan Kabupaten yang ada. Kurang memadainya akses jalan pada beberapa titik wilayah di Kabupaten Tegal yang berakibat rawan kemacetan (di pasar Pagongan, Suradadi, Lebaksiu, dan Bojong). Hal lain yang menjadi isu sarana prasarana infrastruktur wilayah adalah masih terdapat kesenjangan kelengkapan sarana prasarana dan kondisi infrastruktur jalan khususnya di wilayah perbatasan antara Kabupaten Tegal dan Kota Tegal.

**e. Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Pengendalian pemanfaatan kawasan dalam rangka mewujudkan tata ruang wilayah yang berkualitas adalah dalam rangka mengoptimalkan Kelestarian lingkungan hidup. Isu yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup antara lain belum optimalnya penyediaan air bersih khususnya di wilayah pedesaan; belum optimalnya pengelolaan sampah dan masih belum tertanggulangi secara optimal pencemaran lingkungan karena limbah B3. Isu lain terkait lingkungan hidup adalah menurunnya kualitas lingkungan di wilayah pesisir Kabupaten Tegal, kerusakan yang terjadi antara lain sedimentasi muara sungai, erosi dan abrasi garis pantai, kerusakan *mangrove*, dan kerusakan terumbu karang.

**f Penguatan Daya Saing Ekonomi Lokal, Industri Kreatif dan Hak Kekayaan Intelektual**

Posisi Kabupaten Tegal dalam konstelasi kewilayahan yang merupakan simpul (hub) dalam kegiatan perekonomian regional khususnya di wilayah pantai utara Jawa harus memiliki daya saing ekonomi lokal yang handal. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat maka pembangunan ekonomi diarahkan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan dan pengendalian stabilitas harga kebutuhan pokok. Dalam rangka mendukung peningkatan perekonomian daerah diperlukan inovasi dan kreativitas daerah dalam berbagai aspek dan skala inovasi dan kreativitas daerah meliputi lokal, maupun nasional. Dalam upaya mengurangi ketimpangan ekonomi di Kabupaten Tegal diperlukan keberpihakan pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah termasuk pedagang informal baik melalui kebijakan maupun penyediaan fasilitas dan modal kerja.

**g. Pengembangan Pariwisata dan Budaya Lokal**

Potensi pariwisata di Guci, Purwahamba dan Cacaban termasuk Wisata Kesehatan Jamu Kalibakung dan situs purbakala Semedo, perlu mendapat perhatian yang serius. Kerjasama dengan pihak ketiga atau investor merupakan salah satu upaya yang sebaiknya dilaksanakan untuk mengembangkan potensi wisata yang ada. Isu lain terkait pengembangan pariwisata adalah akan berakhirnya kontrak pemanfaatan sarana di obyek wisata Guci pada 5 (lima) tahun ke depan. Perlu ada kebijakan untuk mengantisipasi hal tersebut, baik dari sisi legalitas kerjasama maupun *action plan* pemanfaatan sarana prasarana oleh Pemerintah Kabupaten Tegal. Isu terkait dengan budaya dan kearifan lokal adalah perlunya upaya menggali nilai-nilai luhur yang ada di masyarakat yang mengedepankan pengetahuan, seni, budaya, bahasa Tegal dan industri kreatif melalui pengembangan strategi kebudayaan sebagai sarana pembinaan mental yang berbudi luhur yang dibarengi dengan pengembangan nilai-nilai tradisi, sejarah dan kepahlawanan dalam kehidupan sehari-hari, yang didukung dengan pengembangan sistem informasi budaya, tanpa mengesampingkan upaya pelestarian dan pengembangan potensi budaya lokal.

**h. Penanggulangan Permasalahan Sosial**

Meningkatnya dinamika demografi di wilayah Kabupaten Tegal berdampak pada tumbuhnya permasalahan sosial di kalangan masyarakat. Pertumbuhan penduduk, mobilitas penduduk dan persebaran penduduk serta gaya hidup penduduk yang dipengaruhi faktor alami dan perubahan sosial dalam skala eksternal menyisakan permasalahan kependudukan dalam konteks sosio demografi. Untuk itu diperlukan adanya pengendalian kependudukan yang dilakukan secara sistematis dengan pola tepat dan memperhatikan aspek struktur, jumlah, kualitas, serta distribusi penduduk untuk mengantisipasi permasalahan sosial yang berkembang pesat di kalangan penduduk Kabupaten Tegal.

**i. Reformasi Birokrasi**

Seiring meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap Kualitas

pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di Kabupaten Tegal maka salah satu upaya yang harus dilakukan adalah dengan melalui reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal. Reformasi birokrasi harus dilakukan bersamaan dengan pengembangan reformasi pada bidang-bidang lain misalnya reformasi badan usaha daerah dan swasta serta lembaga-lembaga lainnya agar terjalin sinergi yang saling menguntungkan dan bermanfaat. Pemerintah daerah harus melakukan reformasi birokrasi dengan memfokuskan pada aspek kelembagaan, aparatur, dan tata laksana dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*. Salah satu wujudnya berupa penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih cepat, lebih murah, lebih mudah dan lebih baik.

**j. Pertanian dan Ketahanan Pangan**

Salah satu isu dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah dengan mewujudkan ketahanan pangan. Hal tersebut dikarenakan dengan pengelolaan ketahanan pangan diharapkan dapat mendukung ketahanan sosial, stabilitas ekonomi, stabilitas politik, dan keamanan serta ketahanan nasional. Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk yang relatif pesat menyebabkan kemampuan penyediaan pangan semakin terbatas. Hal itu disebabkan oleh meningkatnya konversi lahan sawah dan lahan pertanian produktif lainnya, rendahnya peningkatan produktivitas hasil pertanian, dan menurunnya kondisi jaringan irigasi dan prasarana irigasi. Selain itu, praktik pertanian konvensional mengancam kelestarian sumber daya alam dan keberlanjutan sistem produksi pertanian.

**k. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**

Untuk mendukung kinerja pembangunan di Kabupaten Tegal diperlukan sumber dana pembangunan yang signifikan. Meskipun besaran APBD Kabupaten Tegal dari tahun ke tahun cenderung meningkat namun belum mampu membiayai pembangunan secara keseluruhan sesuai kebutuhan. Seiring dengan penerapan prinsip *good governance*, maka akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah harus semakin ditingkatkan. Pengelolaan keuangan daerah sebagai sumber pendanaan pembangunan perlu dilakukan melalui keterlibatan peran serta masyarakat yang proporsional untuk mendukung pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel. Dalam pelaksanaannya, diperlukan dukungan penguatan kelembagaan, sumber daya manusia dan tata laksana pemerintahan yang handal. Beberapa permasalahan dan potensi terkait pengelolaan keuangan dan aset daerah antara lain Laporan Keuangan Pemerintah Daerah belum mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK; Pengelolaan dan penataan aset daerah khususnya aset tetap belum mendapat opini wajar dari BPK; dan belum adanya koordinasi dan kesamaan pandang dalam permasalahan dan penanganan aset daerah khususnya aset tetap.

**l. Pengembangan Industri**

Pertumbuhan ekonomi daerah perlu didukung oleh sektor-sektor yang sesuai dengan karakteristik perekonomian lokal. Sektor industri

merupakan salah satu sektor perekonomian yang tumbuh dan berkembang di wilayah Kabupaten Tegal. Untuk itu diperlukan adanya dukungan dari pemerintah daerah guna mendorong pertumbuhan dan perkembangannya. Daya saing produk IKM pengolahan logam dan Industri makanan kecil di Kabupaten Tegal serta kuliner khas Tegal yaitu sate kambing dan teh poci perlu mendapat perhatian serius untuk memberikan nilai tambah pada produk.

**BAB III**

**RANCANGAN PERUBAHAN KERANGKA EKONOMI DAERAH  
DAN KERANGKA PENDANAAN**

**3.1 Perubahan Arah Kebijakan Perekonomian Daerah**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2015 merupakan Tahun ke-1 (satu) atau tahun pertama pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tegal 2014-2019. Pada Tahun 2015 tema perencanaan Kabupaten Tegal adalah "**Perencanaan Inovatif berbasis penguatan kewilayahan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan**". Pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tegal tahun 2015 mengupayakan pola pembangunan inovatif bagi keterwujudan visi Kabupaten Tegal tahun 2014-2019 yaitu terwujudnya masyarakat Kabupaten Tegal yang Mandiri Unggul Berbudaya Religius dan Sejahtera.

Berdasarkan hasil evaluasi RJPMD Kabupaten Tegal Tahun 2014, yang merupakan tahun terakhir dalam pelaksanaan RPJMD 2009-2014 sehingga bisa dikatakan sebagai tahun transisi, beberapa pencapaian realisasi angka-angka target RPJMD telah dapat mencapai target-target yang telah ditetapkan meskipun beberapa target masih memerlukan akselerasi. Pada aspek ekonomi, indikator makro pembangunan ekonomi tahun 2014 menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi diperkirakan pada kisaran 5,86% dengan nilai PDRB (harga konstan) diperkirakan mencapai Rp.4.483.655,28 (dalam juta). Tingkat inflasi diperkirakan cukup tinggi mencapai sebesar 8,48% yang dipengaruhi oleh kondisi perekonomian nasional. Pada tahun 2014, realisasi investasi cukup menggembirakan dengan capaian senilai Rp.642.443.030.000 untuk PMDN dan Rp70.000.000.000 untuk PMA. Namun demikian, Kabupaten Tegal masih menghadapi masalah jumlah penduduk miskin yang masih berada pada kisaran 10,58%.

Untuk tahun 2015 sesuai dengan target dalam RPJMD Kabupaten Tegal tahun 2014-2019 maka laju pertumbuhan ekonomi diperkirakan pada kisaran 5,81% dengan nilai PDRB (harga konstan) diperkirakan mencapai Rp.4.479.481 (dalam juta). Tingkat inflasi diperkirakan cukup moderate mencapai sebesar 5,75% masih dipengaruhi oleh kondisi perekonomian nasional. Pada tahun 2015, realisasi investasi diperkirakan meningkat dengan capaian senilai Rp.754.269.500.000 untuk PMDN dan Rp41.000.000.000 untuk PMA.

Untuk mensinergikan pembangunan Kabupaten Tegal dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, penentuan prioritas pembangunan Kabupaten Tegal merujuk pada prioritas program dan kegiatan yang

ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang tercantum dalam RKPD Provinsi Jawa Tengah. Prioritas pembangunan tersebut yaitu:

1. Peningkatan kinerja birokrasi dan tata kelola pemerintahan serta kualitas pelayanan publik dengan didukung penerapan teknologi informasi dan SPM ;
2. Penyediaan infrastruktur pendukung perekonomian daerah dan peningkatan kinerja penyelenggaraan penataan ruang, serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ;
3. Perluasan kesempatan kerja dan percepatan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi dan budaya;
4. Penguatan akses dan mutu pelayanan dasar maupun penunjang guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia ;
5. Percepatan pembangunan perdesaan dengan dukungan penerapan dan pengembangan teknologi tepat guna ;
6. Pengembangan ketahanan pangan dan energy.

Secara umum kondisi perekonomian Kabupaten Tegal tahun 2015 relatif stabil sehingga arah kebijakan perekonomian daerah yang menyangkut indikator-indikator perekonomian daerah diperkirakan sesuai dengan target-target yang telah ditentukan dalam RPJMD Kabupaten Tegal tahun 2014-2019.

## **3.2 Perubahan Arah Kebijakan Keuangan Daerah**

### **3.2.1. Prioritas Perubahan Pendapatan**

Berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 62 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2014 ditetapkan jumlah pendapatan daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014 adalah sebesar Rp.1.708.553.904.000,00. Jumlah tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Penerimaan daerah diperoleh dengan menghitung rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan berdasarkan perkembangan realisasi setiap objek pendapatan daerah, yaitu dengan membandingkan antara yang dianggarkan dalam perubahan APBD dengan realisasi pendapatan daerah pada tahun anggaran berkenaan sebagai dasar perhitungan proyeksi kapasitas pendapatan daerah tahun berikutnya. Meski demikian, dalam realisasinya seringkali terjadi perkembangan penerimaan daerah yang tidak sesuai asumsi sebagai dampak perubahan kebijakan dibidang keuangan negara dan daerah sebagaimana yang terjadi pada penetapan pendapatan APBD Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2014.

Perkiraan pendapatan daerah tahun ini diproyeksikan bertambah sebesar Rp. 353.390.369.000,00 atau meningkat 17,14% dari penetapan

APBD 2014 menjadi Rp. 2.061.944.273.000,00. Penambahan pendapatan daerah tersebut merupakan penambahan penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 64.657.643.000,00, Dana Perimbangan bertambah sebesar Rp. 1.213.149.797.000,00 dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp. 176.434.013.000,00.

Kenaikan penerimaan PAD disebabkan oleh adanya kenaikan penerimaan BLUD RSUD Soeselo dan BLUD RSUD Suradadi, dan terdapat kenaikan penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Sebagaimana telah diatur dalam Permendagri No. 59 Tahun 2007, capaian target kinerja program dan kegiatan dalam perubahan APBD Kabupaten Tegal Tahun 2015 ini harus ditingkatkan karena asumsi pendapatan dalam KUA penetapan terlampaui. Oleh karenanya, kebijakan belanja daerah dilaksanakan dengan merubah alokasi pendanaan sejumlah program dan kegiatan melalui penambahan anggaran dalam rangka ekstensifikasi dan intensifikasi kinerja pembangunan. Adapun program dan kegiatan dimaksud merupakan program dan kegiatan yang tercantum dalam RKPD Kabupaten Tegal Tahun 2015 dan RKPD Kabupaten Tegal Perubahan Tahun 2015, serta mendukung kebijakan Pemerintah maupun pemerintah daerah.

Adapun rincian target perubahan dalam struktur perubahan pendapatan daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1. Perubahan Pagu Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015

NO	URAIAN	RKPD 2015	PERUBAHAN RKPD 2015	BERTAMBAH (BERKURANG)
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>1,708,553,904,000</b>	<b>2.061.944.273.000</b>	<b>83,924,712,000</b>
<b>1 . 1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>180,429,994,000</b>	<b>268,697,920,000</b>	<b>33,566,946,000</b>
1 . 1 . 1	Pendapatan Pajak Daerah	50,606,822,000	64,657,643,000	2,190,000,000
1 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	55,549,539,000	18,531,704,000	(17,274,848,000)
1 . 1 . 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6,571,628,000	9.074.560.000	773,321,000
1 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	67,702,005,000	176,434,013,000	47,878,473,000
<b>1 . 2</b>	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>1,166,227,022,000</b>	<b>1.213.149.797.000</b>	<b>(1,263,173,000)</b>
1 . 2 . 1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	37,153,282,000	41.988.934.000	(1,263,173,000)
1 . 2 . 2	Dana Alokasi Umum	1,044,211,310,000	1.085.549.293.000	-
1 . 2 . 3	Dana Alokasi Khusus	84,862,430,000	85.611.570.000	-
<b>1 . 3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>361,896,888,000</b>	<b>498.476.397.000</b>	<b>51,620,939,000</b>
1 . 3 . 1	Pendapatan Hibah	5,117,012,000	6.117.012.000	-

1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	59,381,370,000	106.895.678.000	22,101,812,000
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	208,382,950,000	350.179.981.000	29,519,127,000
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	89,015,556,000	35.283.726.000	-

### 3.2.2. Prioritas Perubahan Belanja

Belanja daerah diarahkan pada peningkatan proporsi belanja untuk memfasilitasi kepentingan publik, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam penggunaannya, belanja daerah harus tetap mengedepankan efisiensi, efektivitas dan penghematan sesuai dengan prioritas dan diseimbangkan dengan jumlah pendapatan daerah yang ada, yang diharapkan dapat memberikan dukungan pada program-program strategis daerah. Untuk lebih meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam mendorong pencapaian target pembangunan, pada tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Tegal telah merumuskan kebijakan belanja daerah berdasarkan pagu indikatif kewilayahan dan pagu indikatif sektoral. Pada perubahan Anggaran tahun 2015 dialokasikan untuk belanja kegiatan yang secara spesifik bersumber dari tambahan Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) serta adanya Sisa Lebih Pembiayaan Tahun sebelumnya (SILPA) tahun 2014.

Kelompok Belanja Langsung mengalami peningkatan sebesar 17,23% atau terjadi penambahan belanja sebesar Rp.133.299.663.000,00. Penambahan alokasi anggaran yang cukup signifikan terdapat pada SKPD pengelola kegiatan yang langsung berkaitan dengan fungsi pelayanan masyarakat dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, diantaranya DPU, RSUD dr. Soeselo, Setda, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan dan Olahraga serta DPPKAD.

Tabel 3.2. Perubahan Pagu Belanja Langsung per SKPD Kabupaten Tegal Tahun 2015

NO.	URAIAN	RKPD 2015	PENETAPAN APBD 2015	PERUBAHAN RKPD 2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>688,796,356,000</b>	<b>773.694.961.000</b>	<b>906.994.624.000</b>
2	DIKPORA	76,767,536,000	86.442.311.000	96.811.619.000
3	Dinas Kesehatan	69,090,189,000	90.196.288.000	104.982.958.000
4	Badan RSUD Dr Soeselo	106,366,418,000	132.373.084.000	166.709.324.000
5	RSUD TYPE D Suradadi	6,565,291,000	8.733.900.000	22.341.941.000
6	DPU	264,920,489,000	257.018.265.000	270.782.265.000
7	BAPPEDA	6,800,844,000.00	6.379.000.000	6.889.200.000
8	Dinas Perhubungan Kom.info.	4,554,376,000	9.858.782.000	12.065.282.000
9	Badan Lingkungan Hidup	5,545,177,000	3.844.923.000	3.884.923.000
10	DUKCAPIL	3,414,464,000	3.332.660.000	3.694.660.000
11	BPPKB	4,230,411,000.00	4.749.062.000	5.066.973.000

12	Dinas Sosial, Nakertrans	7,483,116,000	10.519.000.000	10.478.985.000
13	Dinas Koperasi UKM & Pasar	5,964,114,000	24.692.782.000	28.565.782.000
14	Kantor penanaman Modal	1,038,195,000	1.500.000.000	1.630.000.000
15	Kantor Kesbangpolinmas	1,772,235,000	1.590.000.000	1.596.758.000
16	Kantor Satpol PP	5,252,660,000	3.836.280.000	3.964.954.000
17	Setda	29,166,763,000	18.975.122.000	20.211.622.000
18	Set DPRD	11,330,000,000	12.581.945.000	15.028.945.000
19	DPPKAD	25,052,260,000	31.065.968.000	39.629.507.000
20	BKD	5,232,200,000	6.543.016.000	6.414.254.000
21	Inspektorat	1,847,936,000	1.982.335.000	2.487.335.000
22	BPPT	1,162,314,000.0	1.400.000.000	1.403.000.000
23	Kecamatan Adiwerna	215,150,000	497.000.000	502.000.000
24	Kecamatan Balapulang	275,250,000	403.720.000	468.720.000
25	Kecamatan Bojong	252,969,000	480.000.000	485.000.000
26	Kecamatan Bumijawa	248,438,000	470.400.000	575.400.000
27	Kecamatan Dukuhturi	223,250,000	1.953.800.000	1.958.800.000
28	Kecamatan Dukuhwaru	254,200,000	521.000.000	826.000.000
29	Kecamatan Jatinegara	231,240,000	492.000.000	489.500.000
30	Kecamatan Kedungbanteng	204,300,000	409.350.000	414.350.000
31	Kecamatan Kramat	273,818,000	390.720.000	440.720.000
32	Kecamatan Lebaksiu	207,017,000	453.700.000	558.700.000
33	Kecamatan Margasari	278,215,000	1.952.390.000	1.957.788.000
34	Kecamatan Pagerbarang	210,650,000	388.160.000	479.160.000
35	Kecamatan Pangkah	274,800,000	526.500.000	531.500.000
36	Kecamatan Slawi	266,960,000	530.700.000	535.700.000
37	Kecamatan Suradadi	274,470,000	475.100.000	480.100.000
38	Kecamatan Talang	212,132,000	471.500.000	478.500.000
39	Kecamatan Tarub	289,298,000	489.100.000	511.600.000
40	Kecamatan Warurejo	295,121,000	588.500.000	593.500.000
41	Kelurahan Dampyak	223,825,000	650.000.000	650.000.000
42	Kelurahan Kagok	226,990,000	850.000.000	650.000.000
43	Kelurahan Kudaile	227,000,000	650.000.000	900.000.000
44	Kelurahan Pakembaran	227,000,000	650.000.000	683.050.000
45	Kelurahan Procot	227,000,000	650.200.000	675.000.000
46	Kelurahan Slawi Wetan	227,000,000	650.000.000	650.200.000
47	Badan Penanggulangan Bencana daerah	2,000,000,000	2.090.000.000	2.190.000.000
48	Kantor Ketahanan pangan	1,938,013,000	1.206.836.000	1.254.736.000
49	BAPERMADES	4,982,700,000	7.826.500.000	8.230.700.000
50	Perpustakaan dan Arsip Daerah	896,950,000	976.400.000	1.205.400.000
51	TANBUNHUT	11,173,426,000	7.825.557.000	27.164.507.000
52	BP4K	4,141,612,000	3.442.000.000	3.527.000.000
53	Pariwisata dan Kebudayaan	4,282,208,000	5.924.300.000	7.423.050.000
54	DKPP	6,449,979,000	6.824.805.000	7.970.256.000
55	Disperindag	4.270.000.000	4.370.000.000	6.893.400.000

Kelompok Belanja Tidak Langsung juga mengalami peningkatan sebesar 3,51% atau bertambah Rp. 47.592.936.000,00 dimana penambahannya pada jenis Belanja Bantuan Keuangan kpd Prov/Kab/Kota, Pemdes dan Parpol yang mencapai 28,38 %, dan pengurangan untuk Belanja Hibah sebesar 11,93%, Belanja Bantuan Sosial 1,36% akibat penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 khususnya Pasal 298 Ayat (4) dan Ayat (5), dan Belanja Pegawai sebesar 0,42% sebagaimana diuraikan pada tabel 3.3 berikut.

Tabel 3.3. **Rekapitulasi Perubahan Belanja Tidak Langsung untuk Belanja Pegawai, Bunga, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Belanja Tak Terduga Tahun Anggaran 2015**

No.	Belanja Daerah (Belanja Tidak Langsung)	RKPD 2015	PENETAPAN APBD 2015	PERUBAHAN RKPD 2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Belanja Pegawai	964,540,272,000	1.156.988.972.000	1.161.863.116.000
2.	Belanja Bunga	60,000,000	60,000,000	60,000,000

3.	Belanja Hibah	17,581,700,000	10.392.000.000	9.152.000.000
4.	Belanja Bantuan Sosial	15,733,800,000	23.308.800.000	23.626.400.000
5.	Belanja Bagi Hasil kepada Prov/Kab/ Kota dan Pem Desa	-	8.241.333.000	8.241.333.000
6.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Prov/Kab/Kota, Pem Desa dan Parpol	73,133,999,000	153.786.689.000	197.427.881.000
7.	Belanja Tidak Terduga	4,000,000,000	4.000.000.000	4.000.000.000
	<b>Jumlah</b>	<b>1,075,049,771,000</b>	<b>1.356.777.794.000</b>	<b>1.404.370.730.000</b>

### 3.2.3. Prioritas Perubahan Pembiayaan

Prioritas untuk perubahan pembiayaan daerah adalah pada Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA) yang menyesuaikan dengan pertanggungjawaban APBD tahun 2014 dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Tegal tahun 2014. Pada sisi pengeluaran pembiayaan adalah penambahan pada penyertaan modal untuk penguatan modal perusahaan daerah, khususnya PD BPR Bank TGR Rp4.000.000.000,00 dan PDAM Rp6.000.000.000,00. Rincian perubahan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam rangka menutup defisit perubahan anggaran Tahun 2014 adalah sebagai dalam tabel 3.4 berikut :

Tabel 3.4. **Alokasi dan Perubahan Pembiayaan Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2014**

No.	URAIAN	RKPD 2015	PENETAPAN APBD 2015	PERUBAHAN RKPD 2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>1.</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>61.739.911.000</b>	<b>168.809.028.000</b>	<b>263.289.769.000</b>
1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	61.596.951.000	168.809.028.000	263.289.769.000
1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-
1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah	-	-	-
1.4	Pinjaman Daerah	-	-	-
1.5	Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	142.960.000	-	-
<b>2.</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>6.447.688.000</b>	<b>13.868.688.000</b>	<b>13.500.000.000</b>
2.1	Penyertaan Modal Pemda	6.079.000.000	6.000.000.000	13.500.000.000
2.2	Pembayaran Pokok Utang	368.688.000	368.688.000	-
	<b>Pembiayaan Neto</b>	<b>55.292.223.000</b>	<b>162.440.340.000</b>	<b>249.421.081.000</b>

Secara keseluruhan perubahan RKPD tahun 2014 tercermin dalam struktur perubahan pagu pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dilihat dalam tabel 3.5 berikut :

Tabel 3.5. **Struktur Rencana Perubahan Pagu Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014**

NO	URAIAN	RKPD 2015	PENETAPAN APBD 2015	PERUBAHAN RKPD 2015
1	2	3	4	5

<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>1,708,553,904,000</b>	<b>1.968.032.415.000</b>	<b>2.061.944.273.000</b>
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	180,429,994,000	255.732.920.000	268,697,920,000
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	50,606,822,000	61.657.643.000	64,657,643,000
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	55,549,539,000	18.531.704.000	18,531,704,000
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6,571,628,000	8.174.560.000	9.074.560.000
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	67,702,005,000	167.369.013.000	176,434,013,000
				-
<b>1.2</b>	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>1,166,227,022,000</b>	<b>1.169.764.463.000</b>	<b>1.213.149.797.000</b>
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	37,153,282,000	33.909.800.000	41.988.934.000
1.2.2	Dana Alokasi Umum	1,044,211,310,000	1.085.549.293.000	1.085.549.293.000
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	84,862,430,000	50.305.370.000	85.611.570.000
				-
<b>1.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>361,896,888,000</b>	<b>504.187.161.000</b>	<b>498.476.397.000</b>
1.3.1	Pendapatan Hibah	5,117,012,000	6.117.012.000	6.117.012.000
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	59,381,370,000	91.408.612.000	106.895.678.000
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	208,382,950,000	352.384.981.000	350.179.981.000
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	89,015,556,000	54.276.556.000	35.283.726.000
<b>2</b>	<b>BELANJA</b>	<b>1,763,846,127,000</b>	<b>2.130.472.755.000</b>	<b>2.311.365.354.000</b>
<b>2.1</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>1,075,049,771,000</b>	<b>1.356.777.794.000</b>	<b>1.404.370.730.000</b>
2.1.1	Belanja Pegawai	964,540,272,000	1.156.988.972.000	1.161.863.116.000
2.1.2	Belanja Bunga	60,000,000	60.000.000	60.000.000
2.1.4	Belanja Hibah	17,581,700,000	10.392.000.000	9.152.000.000
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	15,733,800,000	23.308.800.000	23.626.400.000
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Prov/Kab/Kota dan Pem Desa	-	8.241.333.000	8.241.333.000
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Prov/Kab/Kota, Pem Desa dan Parpol	73,133,999,000	153.786.689.000	197.427.881.000
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	4,000,000,000	4.000.000.000	4.000.000.000
<b>2.2</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>688,796,356,000</b>	<b>773.694.961.000</b>	<b>906.994.624.000</b>
1	DIKPORA	76,767,536,000	86.442.311.000	96.811.619.000
2	Dinas Kesehatan	69,090,189,000	90.196.288.000	104.982.958.000
3	Badan RSUD Dr Soeselo	106,366,418,000	132.373.084.000	166.709.324.000
4	RSUD TYPE D Suradadi	6,565,291,000	8.733.900.000	22.341.941.000
5	DPU	264,920,489,000	257.018.265.000	270.782.265.000
6	BAPPEDA	6,800,844,000	6.379.000.000	6.889.200.000
7	Dinas Perhubungan Kom.Info.	4,554,376,000	9.858.782.000	12.065.282.000
8	Badan Lingkungan Hidup	5,545,177,000	3.844.923.000	3.884.923.000
9	DUKCAPIL	3,414,464,000	3.332.660.000	3.694.660.000
10	BPPKB	4,230,411,000	4.749.062.000	5.066.973.000
11	Dinas Sosial, Nakertrans	7,483,116,000	10.519.000.000	10.478.985.000
12	Dinas Koperasi UKM & Pasar	5,964,114,000	24.692.782.000	28.565.782.000

13	Kantor penanaman Modal	1,038,195,000	1.500.000.000	1.630.000.000
14	Kantor Kesbangpolinmas	1,772,235,000	1.590.000.000	1.596.758.000
15	Kantor Satpol PP	5,252,660,000	3.836.280.000	3.964.954.000
16	Setda	29,166,763,000	18.975.122.000	20.211.622.000
17	Set DPRD	11,330,000,000	12.581.945.000	15.028.945.000
18	DPPKAD	25,052,260,000	31.065.968.000	39.629.507.000
19	BKD	5,232,200,000	6.543.016.000	6.414.254.000
20	Inspektorat	1,847,936,000	1.982.335.000	2.487.335.000
21	BPPT	1,162,314,000.0	1.400.000.000	1.403.000.000
22	Kecamatan Adiwerna	215,150,000	497.000.000	502.000.000
23	Kecamatan Balapulang	275,250,000	403.720.000	468.720.000
24	Kecamatan Bojong	252,969,000	480.000.000	485.000.000
25	Kecamatan Bumijawa	248,438,000	470.400.000	575.400.000
26	Kecamatan Dukuhturi	223,250,000	1.953.800.000	1.958.800.000
27	Kecamatan Dukuhwaru	254,200,000	521.000.000	826.000.000
28	Kecamatan Jatinegara	231,240,000	492.000.000	489.500.000
29	Kecamatan Kedungbanteng	204,300,000	409.350.000	414.350.000
30	Kecamatan Kramat	273,818,000	390.720.000	440.720.000
31	Kecamatan Lebaksiu	207,017,000	453.700.000	558.700.000
32	Kecamatan Margasari	278,215,000	1.952.390.000	1.957.788.000
33	Kecamatan Pagerbarang	210,650,000	388.160.000	479.160.000
34	Kecamatan Pangkah	274,800,000	526.500.000	531.500.000
35	Kecamatan Slawi	266,960,000	530.700.000	535.700.000
36	Kecamatan Suradadi	274,470,000	475.100.000	480.100.000
37	Kecamatan Talang	212,132,000	471.500.000	478.500.000
38	Kecamatan Tarub	289,298,000	489.100.000	511.600.000
39	Kecamatan Warurejo	295,121,000	588.500.000	593.500.000
40	Kelurahan Dampyak	223,825,000	650.000.000	650.000.000
41	Kelurahan Kagok	226,990,000	850.000.000	650.000.000
42	Kelurahan Kudaile	227,000,000	650.000.000	900.000.000
43	Kelurahan Pakembaran	227,000,000	650.000.000	683.050.000
44	Kelurahan Procot	227,000,000	650.200.000	675.000.000
45	Kelurahan Slawi Wetan	227,000,000	650.000.000	650.200.000
46	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2,000,000,000	2.090.000.000	2.190.000.000
47	Kantor Ketahanan pangan	1,938,013,000	1.206.836.000	1.254.736.000
48	BAPERMADES	4,982,700,000	7.826.500.000	8.230.700.000
49	Perpustakaan dan Arsip Daerah	896,950,000	976.400.000	1.205.400.000
50	TANBUNHUT	11,173,426,000	7.825.557.000	27.164.507.000
51	BP4K	4,141,612,000	3.442.000.000	3.527.000.000
52	Pariwisata dan Kebudayaan	4,282,208,000	5.924.300.000	7.423.050.000
53	DKPP	6,449,979,000	6.824.805.000	7.970.256.000
54	PERINDAG	3,528,387,000.00	4.370.000.000	6.893.400.000
				-
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(55,292,223,000)</b>	<b>(162.440.340.000)</b>	<b>(249.421.081.000)</b>
				-
<b>3</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>55,292,223,000</b>	<b>162.440.340.000</b>	<b>249.421.081.000</b>
				-
<b>3.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>61,739,911,000</b>	<b>168.809.028.000</b>	<b>263.289.769.000</b>
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	61,596,951,000	168.809.028.000	263.289.769.000
3.1.5	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	142,960,000		-
<b>3.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>6,447,688,000</b>	<b>6.368.688.000</b>	<b>13.868.688.000</b>
3.2.1	Penyertaan Modal (Investasi)	6,079,000,000	6.000.000.000	13.500.000.000

2	Pemerintah Daerah			
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	368,688,000	368,688,000	-
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>55,292,223,000</b>	<b>162.440.340.000</b>	<b>249.421.081.000</b>
	<b>SILPA TA BERKENAAN</b>	-	<b>0</b>	-

Program dan kegiatan yang disusun dalam perubahan RKPD ini merupakan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran Tahun 2015. Penyelenggaraan program dan kegiatan prioritas daerah dilaksanakan berdasarkan urusan pemerintah daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Pada Perubahan RKPD tahun 2015, rencana program dan kegiatan pembangunan daerah disusun didasarkan pada evaluasi capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah dan rancangan kerangka ekonomi daerah, sebagaimana yang telah diuraikan pada bab II. Tahun 2015 ini juga merupakan tahun pertama atau tahun transisi antara periode RPJMD 2009-2014 dengan pelaksanaan RPJMD 2014-2019. Oleh karena itu dalam perubahan RKPD ini Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan telah diarahkan pada pelaksanaan RPJMD 2014-2019. Adapun rencana program dan kegiatan pembangunan pada Perubahan RKPD tahun 2015 beserta tolok ukur kinerja dan pagu indikatif sesuai urusan pemerintah daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), diuraikan secara detail pada tabel sebagaimana terlampir. Indikator Capaian Program dan Kegiatan serta Pagu Indikatif dan prakiraan maju dapat dilihat pada Tabel perubahan Rencana Kerja (Renja) per-SKPD 2015.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Perubahan-RKPD) Kabupaten Tegal Tahun 2014 merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang memuat perubahan kerangka ekonomi daerah, pergeseran kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan ataupun pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan. Perubahan RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang menjabarkan pelaksanaan dari kebijakan pembangunan daerah untuk tahun ketiga melalui program-program pembangunan daerah sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tegal Tahun 2014-2019.

Perubahan RKPD Kabupaten Tegal tahun 2015 sebagai dokumen rencana operasional pembangunan tahun 2015 yang memusatkan pada pencapaian tujuan, sasaran, prioritas dan tema pembangunan tahun 2015 dengan mengacu pada isu-isu strategis, rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan dan dilaksanakan melalui program dan kegiatan.

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka Perubahan RKPD Tahun 2015 sebagai acuan penyusunan perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD). Perubahan RKPD Tahun 2015 sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014 untuk menyusun Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.

Masyarakat dan dunia usaha wajib berperan serta dalam pembangunan, baik sebagai pelaksana maupun sebagai pengawas dalam pelaksanaan kebijakan dan program/kegiatan. Untuk menjaga efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program, setiap kepala SKPD wajib melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan melalui upaya koreksi dan melaporkannya kepada Bupati melalui Bappeda Kabupaten Tegal.

BUPATI TEGAL,

ENTHUS SUSMONO